

Isu KEPENDUDUKAN dan PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Isu Kependudukan menarik untuk dikaji. Aspek kependudukan selalu terintegrasi dengan program pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keberhasilan pengintegrasian program-program tersebut ditampilkan dalam bentuk Bonus Demografi dengan *action* pergerakan mortalitas dan fertilitas yang menurun. Oleh karena itu memahami data dasar kependudukan menjadi bagian yang penting. Keberhasilan bonus demografi tergambar dalam pergerakan angkatan kerja yang bergerak *vertical* (perubahan status) dan bergerak horizontal (perpindahan tempat tinggal). Pergerakan *vertical* dengan posisi menurun dan menaik menunjukkan kemiskinan dan kesejahteraan. Sedangkan pergerakan horizontal untuk meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan pendapatan. Salah satunya dengan cara migrasi komuter yang pada masa kini menjadi *trend* umum dikalangan pekerja.

Hasil bonus demografi terjadi saat ini di Indonesia, menghasilkan penduduk usia produktif yang lebih banyak, mereka menerima tanggungjawab untuk mengubah perekonomian negara menjadi lebih baik. Tugas yang amat penting ini tidak akan berjalan mulus apabila negara dilanda berbagai penyakit seperti pandemi Covid-19 yang berdampak langsung pada sumber daya manusia. Solusi dilakukan oleh berbagai lembaga termasuk lembaga filantropi Islam. Kondisi *pandemic* dan kondisi buruk lainnya membuat SDM anak menjadi bermasalah. Kelompok Balita ini terjebak dalam kondisi stunting yaitu kondisi gagal pertumbuhan tubuh dan otak anak, dan kondisi ini akan mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia. arena itu upaya pencegahan stunting merupakan prioritas nasional pemerintah Indonesia agar pembangunan dapat berkelanjutan.

Berbagai persoalan di atas dapat dieliminir bila perempuan memainkan perannya. Karena perempuan juga berperan sebagai *agent of development*, yang turut menentukan arah perkembangan perekonomian negara. Peran yang sama juga terletak dipundak ASN (Aparatur Sipil Negara). Peran ASN ini disumbang oleh *capital asset* yang dimiliki, kemampuan mengatasi berbagai kendala, yang ditopang oleh kebijakan dan strategi pemerintah. Semua analisa di atas berujung pada keinginan untuk mencapai kehidupan lebih baik masa kini dan masa depan yang didengungkan juga oleh banyak negara. Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan tidak saja bermain dalam tataran konsep akan tetapi menjadi realitas pada kehidupan berbagai bangsa.

Editor:
Nurlina T. Muhyiddin

Editor: Nurlina T. Muhyiddin

Isu
KEPENDUDUKAN
dan PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN



Isu KEPENDUDUKAN dan PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penulis:
Suandi, Junaidi, Nurlina T. Muhyiddin,
Lily Rahmawati Harahap, Sri Maryati, Yunisvita, Neneng Miskiyah,
Sari Lestari ZR, Eddy Gunawan, Fauzia Afriyani



Diro RT 58 Jl. Amarta, Pendowoharjo
Sewon, Bantul, Yogyakarta 55185
telp/fax. (0274)6466541
Email: ideapres.now@gmail.com

ISBN 978-623-484-029-2



9 786234 840292



Editor:
Nurlina T Muhyiddin

Isu
KEPENDUDUKAN
dan **PEMBANGUNAN**
BERKELANJUTAN

Penulis:
Suandi, Junaidi, Nurlina T. Muhyiddin,
Lily Rahmawati Harahap, Sri Maryati, Yunisvita, Neneng Miskiyah,
Sari Lestari ZR, Eddy Gunawan, Fauzia Afriyani

Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Suandi, Junaidi, Nurlina T. Muhyiddin, dkk

Isu Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan --Suandi, Junaidi, Nurlina T. Muhyiddin, dkk-- Cet 1- Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta 2022-- xiv+ 230--hlm--15.5 x 23.5 cm
ISBN: 978-623-484-029-2

1. Ilmu Sosial

2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

Isu Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan

Penulis: Suandi, Junaidi, Nurlina T. Muhyiddin,
Lily Rahmawati Harahap, Sri Maryati, Yunisvita,
Neneng Miskiyah, Sari Lestari ZR, Eddy Gunawan,
Fauzia Afriyani

Editor: Nurlina T Muhyiddin

Setting Layout: Agus S

Desain Cover: A. Mahfud

Cetakan Ketiga: November 2022

Penerbit: Idea Press Yogyakarta

Diterbitkan oleh Penerbit IDEA Press Yogyakarta
Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Email: ideapres.now@gmail.com/ idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY
No.140/DIY/2021

Copyright @2022 Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved.

CV. IDEA SEJAHTERA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Rasa syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya buku **Isu Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan** dapat diselesaikan. Shalawat dan salam dihaturkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam sebagai pedoman kehidupan di dunia dan kehidupan yang hakiki kelak.

Salah satu bentuk kontribusi mengisi kehidupan dunia bagi para akademisi adalah melahirkan karya ilmiah yang diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Atas dasar pemikiran ini, para akademisi khusus pemerhati fenomena kependudukan, berkolaborasi mengupas tentang keterkaitan isu kependudukan dengan pembangunan berkelanjutan, meliputi teori kependudukan; data dasar kependudukan; pola fertilitas, mortalitas dan migrasi; angkatan kerja; migrasi komuter; bonus demografi; filantropi demografi; stunting; peranan perempuan; dan peranan Aparatur Sipil Negara.

Para penulis berasal dari berbagai Universitas dan lembaga perguruan tinggi, yakni: Universitas Sriwijaya, Universitas Jambi, Universitas Andalas, Universitas IBA, Universitas Syiah Kuala, Politeknik Negeri Sriwijaya, dan Universitas Indo Global Mandiri. Harapan para penulis, buku ini bermanfaat untuk menjadi tambahan referensi bagi pengajar, mahasiswa dan yang antusias terhadap permasalahan kependudukan.

Akhir kata, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga (suami, isteri, anak, cucu) yang menjadi penyemangat dalam setiap kerja para penulis, dan juga kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini.

Palembang, 26 Oktober 2022

Nurlina T Muhyiddin
Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xiii
Bab 1 Teori Kependudukan dan Perkembangan	
Penduduk Dunia dan Indonesia.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Perkembangan Teori Kependudukan.....	3
1.2.1 Aliran Malthusian	3
1.2.2 Aliran Neo-Malthusian.....	4
1.2.3 Reformasi Teori Kependudukan.....	7
1.2.4 Penganut Kelompok Teknologi.....	8
1.3 Transisi Kependudukan	10
1.4 Perkembangan Penduduk Dunia	11
1.5 Perkembangan Penduduk Indonesia	13
1.5.1 Bonus Demografi.....	14
1.5.2 Pembangunan Berwawasan Kependudukan	16
1.6 Penutup	17
Daftar Pustaka	18
Bab 2 Dinamika Data Dasar Kependudukan Di Indonesia	19
2.1 Pendahuluan	19
2.2 Sensus Penduduk	20
2.3 Survei.....	23
2.3.1 Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)	23
2.3.2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)	25
2.3.3 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)	25



2.3.4 Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).....	26
2.4 Registrasi Penduduk	27
2.5 Parameter Kependudukan	27
2.5.1 Fertilitas	29
2.5.2 Mortalitas.....	35
2.5.3 Mobilitas	37
2.6 Pertumbuhan Penduduk	39
2.7 Penutup	41
Daftar Pustaka.....	41
Bab 3 Pola Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi 1971-2010.....	43
3.1 Pendahuluan	43
3.2 Pola Fertilitas.....	44
3.3 Perkembangan Mortalitas	51
3.4 Perkembangan Mobilitas.....	54
3.5 Penutup	63
Daftar Pustaka.....	64
Bab 4 Angkatan Kerja dan Kemiskinan	67
4.1 Pendahuluan	67
4.2 Angkatan Kerja	68
4.2.1 Pengertian dan Konsep	68
4.2.2 Angkatan Kerja Berdasarkan Kelompok Umur	71
4.2.3 Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis kelamin...	73
4.2.4 Angkatan Kerja Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal	73
4.2.5 Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	74
4.2.6 Angkatan Kerja Sebagai Faktor Produksi.....	78
4.3 Kemiskinan.....	76
4.3.1 Pengertian dan Konsep	76
4.3.2 Kemiskinan Sebagai Indikator Sosial Penting di Negara Berkembang.....	77
4.4 Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan	79



4.5 Penutup	82
Daftar Pustaka.....	83
Bab 5 Migrasi Komuter dan Perkembangan Perekonomian Daerah Di Indonesia	85
5.1 Pendahuluan	85
5.2 Trend Migrasi Komuter	86
5.3 Kefaedahan Migrasi Komuter Tempat Asal Dan Tujuan	87
5.4 Komposisi Sosio-Demografi Migrasi Komuter	89
5.5 Kefaedahan Migrasi Komuter Terhadap Perekonomian Daerah	90
5.6 Pembangunan Infrastruktur Di Daerah Pinggiran.	95
5.7 Penutup	97
Daftar Pustaka.....	97
Bab 6 Fenomena Bonus Demografi bagi Pemberdayaan Ekonomi.....	99
6.1 Pendahuluan	99
6.2 Apa itu bonus demografi ?.....	100
6.2.1 Peluang Fenomena Bonus Demografi	102
6.2.1 Tantangan Fenomena Bonus Demografi.....	103
6.3 Perkembangan Pendidikan, Pekerjaan dan Kesehatan Indonesia	104
6.3.1 Perkembangan Pendidikan Indonesia	104
6.3.2 Perkembangan Pekerjaan Indonesia.....	107
6.3.3 Perkembangan Kesehatan Indonesia	112
6.4 Bonus Demografi dan Wellbeing	114
6.5 Bonus Demografi dan Pemberdayaan Ekonomi....	117
6.6 Perkembangan Bonus Demografi Di Asia Tenggara	119
6.7 Penutup	120
Daftar Pustaka.....	121
Bab 7 Dampak dan Solusi Pandemi Terhadap Distorsi Transisi Demografi dan Filantropi	125
7.1 Pendahuluan	125



7.2 Dampak.....	126
7.2.1 Fertiltas	127
7.2.2 Mortalitas.....	129
7.3 Solusi	131
7.4 Penutup.....	137
Daftar Pustaka.....	139
Bab 8 Stunting dan Pembangunan SDM	143
8.1 Pendahuluan	143
8.2 Stunting Indonesia dan Negara Lainnya	144
8.2.1 Profil Stunting Indonesia dan Negara Asia Tenggara	144
8.2.2 Profil Stunting Tiap Provinsi di Indonesia	145
8.3 Cara atau Tindakan Menghindari Stunting.....	146
8.3.1 Pengetahuan tentang GIZI	146
8.3.2 Pemahaman tentang Infeksi Berulang	148
8.3.3 Pemahaman Kesehatan Sebelum & Sesudah Melahirkan	149
8.4 Pendidikan Ibu, Kesejahteraan Keluarga, dan Fasilitas kesehatan.....	149
8.4.1 Pendidikan Ibu	149
8.4.2 Kesejahteraan Keluarga.....	151
8.4.3 Akses terhadap Fasilitas Kesehatan	153
8.5 Stunting, Human Capital, Pembangunan Kependudukan	155
8.6 Penutup.....	157
Daftar Pustaka.....	159
Bab 9 Peran Perempuan Menjaga Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Di Sumatera Barat	161
9.1 Pendahuluan	161
9.2 Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Pembangunan	162
9.3 Ketenagakerjaan Perempuan Di Sumatera Barat....	165
9.3.1 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Perempuan	166



9.3.2 Pekerjaan Utama Menurut Kategori Lapangan Usaha.....	168
9.3.3 Peran Pendapatan Perempuan Dalam Perekonomian	171
9.3.4 Peran Perempuan Dalam Aktivitas Politik	174
9.4 Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga	177
9.4.1 Kajian Empiris Peran Perempuan Dalam Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga.....	177
9.4.2 Peran Perempuan Dalam Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga di Sumatera Barat	178
9.5 Penutup	182
Daftar Pustaka.....	184
Bab 10 Peran Aparatur Sipil Negara dalam Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan	187
10.1 Pendahuluan	188
10.2 <i>Capital Aset</i> (Aset Modal) ASN	188
10.2.1 Modal Manusia.....	191
10.2.2 Modal Sosial.....	193
10.2.3 Modal Alam	195
10.2.4 Modal Fisik.....	195
10.2.5 Modal Keuangan	197
10.3 Kerentanan	198
10.4 Sustainable Livelihood ASN	199
10.5 Kebijakan	203
10.6 Penutup	207
Daftar Pustaka.....	207
Daftar Istilah	211
Biodata Penulis	219

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi Penduduk Dunia Berdasarkan Benua, 2021.....	12
Tabel 1.2 Perkembangan Kualitas Manusia Indonesia dan ASEAN diukur dari Nilai HDI (2000-2020).....	14
Tabel 2.1 ASFR Propinsi A Tahun 2020	32
Tabel 2.2 GRR Propinsi A Tahun 2020.....	34
Tabel 2.3 NRR Propinsi A Tahun 2020	35
Tabel 2.4 ASDR Propinsi A Tahun 2020	36
Tabel 2.5 Metode Perhitungan Pertumbuhan Penduduk dan <i>Doubling Time</i>	40
Tabel 3.1 Angka Fertilitas Total (TFR) menurut Provinsi 1971-2010	50
Tabel 3.2 Angka Kematian Bayi (IMR) menurut Provinsi 1971-201	52
Tabel 3.3 Angka Harapan Hidup menurut Provinsi, 1971-2000	54
Tabel 4.1 TPAK Berdasarkan Gender Tahun 1980 – 2020.....	70
Tabel 4.2 Komposisi Angkatan Kerja Berdasarkan Umur Tahun 2021	72
Tabel 4.3 Komposisi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin	73
Tabel 4.4 Komposisi Angkatan Kerja Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal.....	74
Tabel 4.5 Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan.....	75
Tabel 4.6 Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 2021	78
Tabel 4.7 Penduduk Miskin Ekstrim Umur 15 tahun ke atas, 2020.....	79



Tabel 5.1 Karakteristik Sosiodemografi Pekerja Pelaku	
Mobilitas Komuter Tahun 2020.....	90
Tabel 5.2 Pekerja Komuter Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, dan Tingkat Pendidikan Hasil Sakernas Agustus 2019 dan 2020	94
Tabel 6.1 Angka Partisipasi Murni (%).....	107
Tabel 6.2 Bekerja pada Lapangan Kerja Utama	108
Tabel 6.3 Penduduk Bekerja dan Pengangguran	110
Tabel 6.4 Proporsi Bekerja dengan Angkatan Kerja	111
Tabel 6.5 Umur Harapan Hidup Saat Lahir	113
Tabel 7.1 Data Layanan Kesehatan Reproduksi	128
Tabel 7.2 Upaya Perlindungan pada Anak yang Kehilangan Orang Tuanya Akibat Covid-19	132
Tabel 7.3 Data Kehilangan Orang Tua Akibat Covid-19 per 30 September 2021	135
Tabel 8.1 Balita Pendek-Sangat Pendek di Indonesia.....	146
Tabel 8.2 Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek Kabupaten-Kota di Provinsi Sumatera Selatan	148
Tabel 8.3 Pendidikan Ibu dan Kejadian Stunting Wilayah Kerja Puskesmas Kandanghaur, Kabupaten Indramayu 2019	150
Tabel 8.4 Pendidikan Ibu dan Kejadian Stunting Wilayah Kerja Puskesmas Way Urang, Kabupaten Lampung Selatan 2020	150
Tabel 8.5 Pendidikan Ibu dan Kejadian Stunting di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang 2019	151
Tabel 8.6 Proporsi Pengetahuan Rumah Tangga terhadap Kemudahan Akses Fasilitas Kesehatan, Risksdas 2018	158
Tabel 9.1 Penduduk Bekerja dan TTK Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020	167
Tabel 9.2 Penduduk Bekerja dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2020.....	169



Tabel 9.3 Persentase Pekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	170
Tabel 9.4 Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2018 (Persen)	172
Tabel 9.5 Jumlah dan Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020	173
Tabel 9.6 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2018 (Persen)	175
Tabel 9.7 Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Barat Periode 2014 – 2019.....	176
Tabel 10.1 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan 2017-2018	190
Tabel 10.2 Pendidikan yang Ditamatkan ASN 2021	171

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Transisi Demografi.....	10
Gambar 3.1 Model yang Dikembangkan oleh Friedman.....	47
Gambar 3.2 Hubungan Kausalitas antara Sosial Ekonomi dengan Fertilitas	48
Gambar 3.3 Mobilitas Penduduk Berdasarkan Kebutuhan ..	57
Gambar 3.4 Faktor Determinan Mobilitas Penduduk	58
Gambar 3.5 Model Mobilitas Penduduk Menurut Norris	59
Gambar 4.1 Status Angkatan Kerja Dari Penduduk 15+ di Indonesia	69
Gambar 4.2 Pola TPAK Sepanjang Hidup, 2020.....	71
Gambar 5.1 Faktor-faktor dan Rintangan Antara di Daerah Asal dan Daerah Tujuan	88
Gambar 6.1 Angka Partisipasi Murni (%).....	107
Gambar 6.2 Bekerja pada Lapangan Kerja Utama	109
Gambar 6.3 Penduduk Bekerja dan Pengangguran.....	110
Gambar 6.4 Proporsi Bekerja dengan Angkatan Kerja (%)....	111
Gambar 6.5 Umur Harapan Hidup Saat Lahir	114
Gambar 6.6 Complementarities dan Sustainability Bonus Demografi dan Wellbeing.....	116
Gambar 6.7 Rasio Ketergantungan (%)	122
Gambar 7.1 Data Penggunaan Alat Kontrasepsi	129
Gambar 7.2 Model Pengembangan Optimalisasi Filantropi/ Lembaga Keuangan Sosial Islam	138
Gambar 8.1 Prevalensi Stunting di Negara Asia Tenggara....	144
Gambar 8.2 Prevalensi Balita Pendek Asia Tenggara 2005-2017	145



Gambar 8.3 Hubungan stunting, human capital dan Pembangunan SDM.	156
Gambar 9.1 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sumatera Barat, 1971-2020.....	166
Gambar 9.2 Pengeluaran Perkapita Menurut Jenis Kelamin	174
Gambar 10.1 Pendapatan Potensial Berdasarkan Pendidikan (dimodifikasi)	190
Gambar 10.2 Kerangka Kerja ASN untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan	206

BAB

1

TEORI KEPENDUDUKAN DAN PERKEMBANGAN PENDUDUK DUNIA DAN INDONESIA

Suandi

1.1 Pendahuluan

Masalah kependudukan tidak hanya dilihat dari sisi demografi yang terfokus pada aspek kuantitatif dan dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan (kelahiran dan migrasi), tetapi juga dilihat dari aspek hak-hak asasi manusia serta menampung keperluan penduduk itu sendiri. Beberapa masalah kependudukan yang masih menjadi fokus perhatian saat ini adalah tingginya pertumbuhan, jumlah, dan persebaran penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan variabel penting dalam pembangunan agar tercapai tujuan akhir dari peningkatan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Namun, harapan ini terkendala oleh permasalahan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Disamping itu, permasalahan ekonomi yang terbelenggu dalam tatanan lingkungan ekonomi dunia juga menjadi kendala yang cenderung merugikan. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah memfasilitasi transisi demografi melalui satu pola tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif rendah namun diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Dalam dua dasawarsa terakhir ini telah terjadi perubahan ciri-ciri demografis penduduk dunia, antara lain berupa penambahan jumlah, perubahanstruktur, dan komposisi penduduk. Pelonjakan jumlah penduduk yang terjadi pada saat ini disebabkan penurunan angka mortalitas lebih awal dan lebih cepat dibanding fertilitas. (relatif stabil). Artinya, angka fertilitas tetap mengalami peningkatan walaupun berfluktuasi. Kondisi kependudukan tersebut akan mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia terutama dalam mengintrodusir program-program pembangunan melalui pemanfaatan paradigma-paradigma baru untuk memaksimalkan usaha- usaha peningkatan mutu sumber daya manusia.

Peningkatan jumlah penduduk dari satu sisi dapat menjadi hambatan terhadap keberhasilan pembangunan, apalagi beban tanggungan lebih besar dibandingkan mereka yang bekerja. Beban ketergantungan (*dependency Ratio*) menunjukkan beban penduduk produktif menanggung beban penduduk tidak produktif untuk kebutuhan mereka baik sebagai kebutuhan pokok (kebutuhan pangan, sandang, papan) maupun kebutuhan lainnya sehingga akan berdampak terhadap kesejahteraan penduduk itu sendiri.

Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk, terutama peningkatan jumlah tenaga kerja dipandang sebagai modal atau kekuatan dalam pembangunan karena ia merupakan salah satu sumber daya dan potensi ekonomi yang konstruktif. Para ahli menyebutkan struktur umur penduduk erat kaitannya dengan produktivitas kerja yang dicurahkan. Semakin tua umur maka akan semakin bertambahnya tingkat produktivitas (batas umur 64 tahun), hal ini dimungkinkan karena faktor pengalaman kerja. Sementara kondisi angkatan kerja yang berumur relatif muda diharapkan mampu bekerja lebih energik dan produktif. Umur yang relatif muda lebih mudah menerima atau mengadopsi inovasi baru sehingga mampu menjalankan pelaksanaan program pembangunan yang diharapkan (meningkatkan kesejahteraan keluarga). Usia muda yang lebih dominan berpengaruh secara nyata terhadap perilaku demografi terutama perilaku fertilitas, mortalitas dan mobilitas.



1.2 Perkembangan Teori Kependudukan

Beberapa aliran (mashab) terkenal yang menelaah tentang masalah kependudukan dan kemiskinan, yakni: pertama, mashab Malthusian yang dipelopori Thomas Robbert Malthus. Kedua, mashab Neo Malthusian yang dipelopori oleh Garreth Hardin dan Paul Ehrlich. Mashab ini merupakan penganut aliran Marxist yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Ketiga mashab teori kependudukan mutakhir yang merupakan reformasi teori-teori kependudukan yang ada, yang dipelopori John Stuart Mill, Arsene Domont, dan Enile Durkheim (Weeks: Mantra, 2000). Keempat, mashab pembangunan kependudukan berbasis teknologi.

1.2.1 Aliran Malthusian

Mashab Malthusian dipelopori oleh Thomas Robert Malthus yang hidup pada era tahun 1766-1834. Tulisan Malthus yang paling terkenal adalah *Essay on Principle of Populations as it Affect the Future Improvement of Society*. Artinya, penduduk (seperti juga tumbuh-tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi dengan cepat. Tingginya pertumbuhan penduduk ini disebabkan karena hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dihentikan. Dalam teorinya, Malthus menggambarkan bahwa penambahan penduduk akan mengikuti deret ukur (*human species would increase as the number 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256*) dan penambahan bahan makanan mengikuti deret hitung (and substance as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Menurut mashab Malthusian, ada 2 cara untuk melakukan pembatasan penduduk, yakni: (a) *preventives checks* dan (2) *positives checks*. *Preventives checks* adalah pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran. *Preventives checks* dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (a) *moral restraint* dan (b) *vice*. *Moral reistrain* (pengekangan diri) merupakan segala usaha untuk mengekang nafsu seksual dan penundaan pengurangan kelahiran melalui pengguguran kandungan, sedangkan, *vice* merupakan usaha pengurangan kelahiran melalui pengguguran kandungan, homoseksual,

promiscuity, adultery, dan lain sebagainya. Para ahli menyebutkan bahwa cara pengurangan kelahiran seperti ini tidak manusiawi dan dikategorikan sebagai perbuatan jahat.

Positives checks merupakan pembatasan penduduk melalui proses kematian. *Positives checks* dibagi menjadi dua, yaitu: *vice dan misery*. *Vice* (kejahatan) ialah segala jenis pencabutan nyawa sesama manusia seperti pembunuhan anak-anak (*infanticide*), pembunuhan orang-orang cacat, dan orang tua. *Misery* (kemelaratan) ialah segala keadaan yang menyebabkan kematian seperti berbagai jenis penyakit dan epidemi, bencana alam, kelaparan, kekurangan pangan, dan peperangan.

Teori Malthus mendapat kritikan karena tidak memperhitungkan kemajuan teknologi seperti kemajuan teknologi transportasi yang akan memudahkan aksesibilitas, kemajuan teknologi di dibidang pertanian serta tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah. Padahal, fertilitas akan menurun apabila terjadi perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk. Hal inilah yang tidak diperhitungkan oleh Malthus.

1.2.2 Aliran Neo-Malthusians

Mashab Neo-Malthusians dipelopori oleh Garrett Hardin (ahli Biologi dari Universitas California, Santa Barbara, 1968) dan Paul Ehrlich (ahli biologi dari Universitas Standford). Mashab ini mulai berkembang pada akhir abad ke-19. Pada awal abad ke-20 teori Malthus mulai diperdebatkan. Kelompok yang menyokong aliran Malthus tetapi lebih radikal disebut dengan kelompok Neo-Malthusians. Kelompok inilebih menekankan pada cara "*preventive checks*" yaitu penggunaan alat-alat kontrasepsi untuk mengurangi jumlah kelahiran dan pengguguran kandungan (*abortions*).

Mashab Neo Malthusian melihat bahwa dunia baru sudah mulai tidak mampu untuk menampung jumlah penduduk yang selalu bertambah. Tiap minggu lebih dari satu juta bayi lahir yang artinya terjadi penambahan keperluan pangan pada satu juta



lebih manusia tersebut. Seperti pada awal abad ke-19, orang masih dapat mengatakan bahwa apa yang diramalkan oleh Malthus tidak mungkin terjadi, tetapi sekarang beberapa orang percaya bahwa hal itu terjadi dengan sebutan *“it has come true: it is happening”*. Pada tahun 1960-1970-an, melalui foto-foto udara menunjukkan bahwa bumi kita terlihat seperti sebuah kapal yang berlayar di ruang angkasa dengan persediaan bahan bakar dan makanan yang sudah terbatas. Artinya, pada suatu saat kapal ini akan kehabisan bahan bakar dan bahan makanan sehingga pada akhirnya akan terjadi malapetaka.

Paul Ehrlich menulis buku yang berjudul *“The Population Bomb”* pada tahun 1971. Isi buku tersebut menggambarkan penduduk dan lingkungan yang ada didunia dimana jumlah penduduk dunia yang sudah padat, bahan makanan terbatas, dan banyak lingkungan yang rusak dan tercemar. Ehrlich bersama istrinya pada tahun 1990 merevisi buku tersebut dengan judul yang baru yaitu *“The Population Exploitation”*. Isi buku tersebut menggambarkan bom penduduk yang dikhawatirkan pada tahun 1968 sewaktu-waktu akan dapat meletus kembali akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan yang parah, dikarenakan sudah terlalu banyaknya penduduk. Dikatakan Ehrlich (Weeks: Mantra, 2000):

... the poor are dying of hunger, while rich and poor alike are dying from the by-products of affluence-pollution and ecological disaster

Pandangan Ehrlich ini melihat bahwa dunia dimasa akan datang sangat suram. Komentar ini sangat penting bagi seluruh generasi terutama bagi penduduk di negara-negara maju. Namun, pada tahun 1972, Meadow menerbitkan sebuah buku dengan judul *“The Limit to Growth”*. Inti dari buku ini melihat bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara penduduk dengan sumber daya alam dan lingkungan. Apabila manusia dapat memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan dengan arif maka kehidupan manusia dapat bertahan dan sebaliknya (Jones: Mantra, 2000).

Seperti dikemukakan di atas mashab Neo Malthusian dipengaruhi oleh pemikiran aliran Marxist yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Marx dan Engels tidak sependapat

dengan Malthus yang menyatakan bahwa bahan pangan akan habis apabila tidak ada pembatasan jumlah penduduk. Dasar pegangan Marxist ialah manusia sepanjang peradabannya akan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sedangkan Maltus hanya bersandar pada “*Natural Resource*” yaitu sumber daya tidak bisa dikembangkan atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk.

Menurut Marx dan Engels bahwa: (a) tekanan penduduk bukan akibat dari tekanan bahan makanan, tetapi terhadap kesempatan kerja, (b) kemelaratan penduduk terjadi karena adanya sebagian penduduk bersifat kapitalis. Artinya, kaum kapitalis mengambil sebagian pendapatan penduduk untuk keuntungan kapitalis dan pemerintah menguasai alat-alat produksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, sistem pemerintahan harus bersifat sosialis dimana alat-alat produksi dikuasai oleh buruh/petani sehingga gaji mereka tidak akan terpotong. Hal ini berarti semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula produksi yang dihasilkan. Pendapat Karl Marx dan Friedrich Engels ini banyak diikuti, terutama setelah perang dunia kedua.

Kondisi dunia pada saat itu dibagi menjadi tiga kelompok, yakni kaum kapitalis, sosialis, dan non-blok. Penganut sistem kapitalis dan masih mengikuti aliran Thomas Robert Malthus adalah negara-negara Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Kanada, dan Amerika Latin. Penganut sistem sosialis, seperti: Unisoviet, negara-negara Eropa Timur, RRC, Korea Utara, dan Vietnam. Penganut sistem Non- blok adalah negara India, Mesir, dan Indonesia. Kritik terhadap aliran Marx terhadap hukum kependudukan di negara sosialis adalah masalah pembatasan kelahiran, seperti di RRC pada tahun 1953. Pemerintah RRC memberlakukan penggunaan alat-alat kontrasepsi dan bahkan memperbolehkan pengguguran kandungan (*abortion*) terutama anak perempuan.



1.2.3 Reformasi Teori Kependudukan

Teori Fisiologi dan Sosial Ekonomi adalah merupakan reformasi dari teori kependudukan yang ada sebelumnya, Ada beberapa ahli dalam mashab ini yaitu: John Stuart Mill, Arsene Dumont, Emile Durkheim, Michael Thomas Sadler dan Doubleday. **John Stuart Mill** adalah seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris. JM Mill sependapat dengan Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun demikian, dia berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Semakin meningkatnya pendidikan penduduk, maka secara rasional mereka mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karir dan usaha yang ada. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan secara linear akan meningkatkan produktivitas sehingga manusia lebih cenderung memiliki keluarga kecil. Hal tersebut menyebabkan tingkat fertilitas semakin rendah sehingga kemiskinan dapat dihindari atau diatasi dan bukan menjadi penghalang seperti yang dikatakan oleh Malthus dan Marx.

Arsene Dumont adalah ahli demografi berkebangsaan Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1890. Dumont menulis sebuah artikel berjudul "*Depopulation et Civilization*". Ia melancarkan teori penduduk baru yang disebut dengan teori kapilaritas sosial (*theory of social capilarity*). Kapilaritas sosial mengacu kepada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat, misalnya seorang ayah selalu mengharapkan dan berusaha agar anaknya memperoleh kedudukan sosial ekonomi yang tinggi melebihi apa yang telah dia capai. Untuk dapat mencapai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, keluarga yang besar merupakan beban yang berat dan perintang. Konsep ini dibuat berdasarkan analogi bahwa cairan akan naik pada sebuah pipa kapiler. Teori kapilaritas sosial dapat berkembang dengan baik pada negara demokratis, dimana tiap-tiap individu mempunyai kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat termasuk Perancis dan Indonesia.

Emile Durkheim merupakan ahli sosiologis berkebangsaan Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Jika Dumont menekankan perhatiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, Durkheim lebih mengkaji tekanan penduduk akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi, dikatakannya bahwa penduduk yang padat akan menyebabkan timbulnya persaingan untuk mempertahankan hidup. Tiap-tiap orang akan berusaha untuk meningkatkan usahanya melalui pendidikan dan keterampilan serta akan bersaing dalam meningkatkan penghasilan.

Michael Thomas Sadler dan Doubleday adalah penganut teori fisiologis. Sadler mengemukakan reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah. Jika kepadatan penduduk tinggi, maka tingkat reproduksi manusia akan menurun, begitu pula sebaliknya. Teori Doubleday menitik beratkan kepada ketersediaan bahan makanan. Tingkat reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. Jadi, kenaikan kemakmuran menyebabkan turunnya tingkat reproduksi manusia.

1.2.4 Penganut Kelompok Teknologi

Penganut kelompok teknologi beranggapan bahwa manusia dengan ilmu pengetahuannya mampu melipatgandakan produksi pertanian. Mereka mampu merubah kembali (*recycling*) barang-barang yang sudah habis dipakai. Dunia tidak kehabisan sumber daya alam dikarenakan seluruh lapisan bumi terdiri dari mineral-mineral sehingga proses *recycling* akan terus terjadi dan era ini disebut dengan era substitusi (Herman Khan: *Mantra*, 2000). Salah satu teknologi yang sangat berperan terhadap penyediaan pangan adalah teknologi bidang pertanian yang dikenal dengan istilah teknik budidaya tanaman. Teknik budidaya tanaman adalah usaha mengelola tanaman di lapangan mulai dari pengelolaan tanah, pengadaan benih atau bibit, penanaman, hingga pemanenan sehingga tanaman memberikan produksi maksimum dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Sebagai contoh, semula usaha tani padi sawah hanya satu kali



musim tanam, melalui introduksi teknologi budidaya umur tanaman dapat diperpendek menjadi dua kali musim tanam dan bahkan dapat meningkatkan produksi sebesar dua kali lipat dari sebelumnya.

Peran teknologi pertanian lainnya, seperti alat mesin pengolahan tanah, mesin pemeliharaan, mesin pemanenan, dan mesin pengolahan. Semula pengolahan tanah pertanian hanya menggunakan alat sederhana seperti cangkul dan alat sejenisnya dengan hasil terbatas dan membutuhkan biaya yang besar. Melalui industrialisasi, pengolahan tanah dapat dilakukan dengan menggunakan alat mesin seperti *hand tractor* dengan biaya yang jauh lebih efisien dan waktu yang efektif. Begitu juga peran alat mesin untuk penanaman, pemeliharaan, alat mesin pemanenan yang sangat menguntungkan. Era revolusi industri 4.0 memasuki era teknologi digital yang berfungsi mendorong percepatan adopsi inovasi teknologi pertanian baik penerapan teknologi cara bercocok tanam, pemasaran, maupun teknologi pengoperasian infrastruktur.

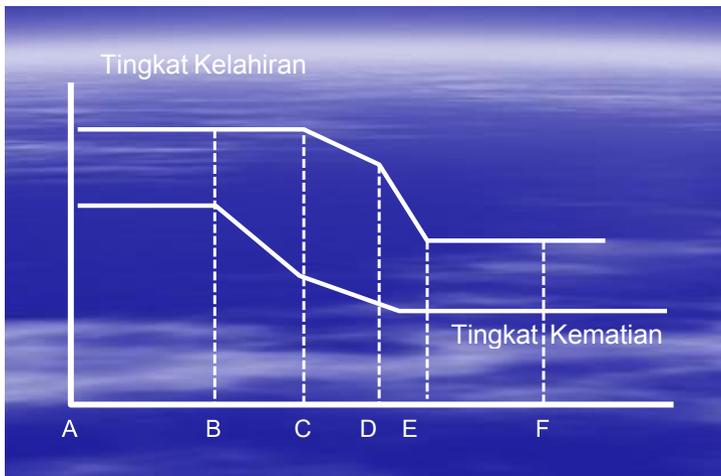
Laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2018) menunjukkan bahwa teknologi digital dapat memudahkan pemantauan terhadap pertumbuhan tanaman, perubahan kualitas tanah, ketersediaan sumber daya air, serta dapat memantau dengan cepat perubahan kondisi lingkungan. Teknologi pertanian digital bisa dioperasikan melalui sensor, otomatisasi, dan penggunaan perangkat lunak lainnya berbasis internet, baik secara parsial maupun secara bersama (*Organisation for Economic Co-operation and Development*, 2018). Rusli (2021) menambahkan aplikasi *Internet of Things* (IoT) terdiri atas fasilitas proses data, pertumbuhan tanaman, manajemen digital dari produksi, pembagian data, *user interface* dan *service intelligent network* serta *decision-making*.

Transformasi teknologi yang begitu penting menjadikan para peneliti terus mengembangkan teknologi AI dalam bentuk sistem pembelajaran mesin (*machine learning*), dan mengembangkan Teknologi IoT untuk menghubungkan manusia dan peralatan disekitarnya melalui internet sehingga integrasi teknologi AI dan

IoT menjadi sebuah produk yang dapat digunakan oleh manusia untuk budidaya tanaman secara mandiri (*Autonomous System*) untuk mendapatkan hasil pertanian yang diperoleh jauh lebih efisien dibandingkan dengan sistem pengelolaan secara konvensional.

1.3 Transisi Kependudukan

Transisi Kependudukan (Demografi) adalah perubahan-perubahan tingkat kelahiran dan tingkat kematian dimulai dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi, berangsur-angsur berubah menjadi tingkat kematian dan tingkat kelahiran yang rendah. Dengan demikian, konsep proses transisi demografi umumnya difokuskan pada perubahan jumlah, struktur, dan komposisi penduduk yang mengalami perubahan selama proses transisi berlangsung. Model transisi demografi dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Model Transisi Demografi

Ada tiga tahapan Transisi Demografi (Bogue: Mantra, 2000): pertama, Pra-transisi (*pre-transitional*), dari A hingga B dengan ciri bahwa tingkat kelahiran dan tingkat kematian sama-sama tinggi. Angka Pertumbuhan penduduk sangat rendah (hampir mendekati nol). Pra-transisi ini terjadi sebelum tahun 1650 dan menyebabkan penduduk stabil.



Kedua Transisi (*transitional*), dari B ke E dengan ciri penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian, tingkat kematian lebih rendah daripada tingkat kelahiran sehingga mengakibatkan pertumbuhan penduduk sedang/tinggi. Fase ini dibagi menjadi 3, yaitu: (a) permulaan transisi (*early transitional*), dari B ke C dengan ciri tingkat kematian menurun, tetapi tingkat kelahiran tetap tinggi bahkan ada kemungkinan meningkat karena ada perbaikan kesehatan, (b) pertengahan transisi (*middle transitional*), dari C ke D dimana tingkat kematian dan kelahiran menurun tetapi tingkat kematian menurun lebih cepat dari tingkat kelahiran, (c) akhir transisi (*late-transitional*), dari D ke E dimana tingkat kematian rendah dan tidak berubah/penurunan lebih sedikit, tingkat kelahiran berfluktuatif karena ada program KB.

Ketiga, Pasca-transisi (*post-transitional*), transisi ini terjadi dari E ke F dimana tingkat kematian dan tingkat kelahiran rendah dan mendekati keseimbangan sehingga pertumbuhan penduduk sangat rendah pada jangka waktu panjang. Pada fase ini hampir semua masyarakat mengetahui cara-cara kontrasepsi dan pentingnya keluarga bahagia dan sejahtera.

1.4 Perkembangan Penduduk Dunia

Sejak tahun 1650 laju pertumbuhan penduduk dunia meningkat pesat. Landis dan Hatt (Mantra, 2000) melaporkan bahwa jumlah penduduk di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan sebesar 113 juta, dan pada tahun 1750 meningkat menjadi 152,4 juta, lalu meningkat kembali menjadi 325 juta jiwa pada tahun 1850. Artinya, selama dua abad jumlah penduduk meningkat tiga kali lipat, sedangkan di Asia-Afrika dalam jangka waktu yang sama, jumlah penduduk hanya meningkat dua kali lipat. Data terbaru menunjukkan penduduk dunia pada tahun 2021 berjumlah 7,32 miliar yang tersebar ke berbagai benua dengan persentase tertinggi terdapat di benua Asia yang mencapai lebih dari 59 persen (UN, 2021) (Tabel 1.1). Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk dunia sebagian besar berdomisili di negara-negara berkembang dan baru maju (75,78 %),

sedangkan jumlah penduduk di negara-negara maju hanya 24,22 persen, padahal dunia dikuasai oleh negara-negara maju.

Tabel 1.1 Distribusi Penduduk Dunia Berdasarkan Benua, 2021

No.	Benua	Jumlah Penduduk	%
1.	Asia	4.384.844.097	59,86
2.	Afrika	1.166.239.306	15,92
3.	Amerika	991.216.736	13,53
4.	Eropa	743.122.816	10,15
5.	Australia	39.359.270	0,54
	Dunia	7.324.782.225	100,00

Sumber: United Nations, 2021

Berdasarkan situs resmi *United Nation*, diperkirakan pada tahun 2030 jumlah penduduk dunia akan mencapai 8,5 miliar penduduk dan pada tahun 2050 akan mencapai 9,7 miliar penduduk. Pertumbuhan dramatis ini sebagian besar didorong oleh meningkatnya jumlah orang yang bertahan hidup hingga usia reproduksi. Selain itu, pertumbuhan tersebut disertai dengan perubahan besar dalam tingkat kesuburan, peningkatan urbanisasi, dan percepatan migrasi. Tren ini akan memiliki implikasi yang luas untuk generasi mendatang. Pada tingkat kesuburan, laju pertumbuhan penduduk didominasi oleh meningkatnya penduduk perempuan berusia produktif, terutama di negara-negara berkembang dan negara baru maju. Data menunjukkan perubahan usia hidup pada awal 1970-an dimana rata-rata wanita memiliki 4-5 anak dan turun menjadi 2 anak per wanita pada tahun 2015. Sementara itu, rata-rata rentang hidup global telah meningkat, dari 64,6 tahun di awal tahun 1990-an menjadi 72,6 tahun pada 2019. Populasi dunia juga melihat tingkat urbanisasi yang tinggi dan percepatan migrasi. Tahun 2007 merupakan tahun pertama di mana banyak orang tinggal di daerah perkotaan daripada pedesaan. Pada tahun 2050, diprediksi sekitar 66 persen dari populasi dunia akan tinggal di kota.



Tren ini memberikan implikasi yang luas. Mereka mempengaruhi pembangunan ekonomi, lapangan kerja, distribusi pendapatan, kemiskinan dan perlindungan sosial, tetapi mereka juga memengaruhi upaya untuk memastikan akses universal ke perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan, makanan, air, dan energi. Untuk mengatasi kebutuhan individu secara lebih berkelanjutan, para pembuat kebijakan harus memahami berapa banyak orang hidup di bumi ini, di mana mereka berada, berapa usia mereka, dan berapa banyak generasi mendatang yang akan lahir.

Jumlah penduduk dunia yang cukup besar akan mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan kekurangan pangan. Fenomena ini menggelisahkan beberapa ahli kependudukan, dan masing-masing mereka berusaha mencari faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut.

1.5 Perkembangan Penduduk Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan **“Keluarga Berencana”** adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. **“Keluarga berkualitas”** adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang dimaksud dengan **“Pengaturan kehamilan”** adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.

Hal lain yang dimuat di Undang-undang Kependudukan adalah masalah kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara menyeluruh serta proses reproduksi. Kesehatan reproduksi dalam arti luas meliputi seluruh proses,

fungsi, dan sistem reproduksi pada seluruh tahapan kehidupan manusia. Kesehatan reproduksi bukan hanya kondisi bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan baik sebelum menikah maupun sesudah menikah. Pola pembangunan Indonesia dalam Pasal 33 UUD 1945 memberi arah pembangunan ekonomi untuk menuju kesejahteraan sosial. Kata kunci pembangunan di Indonesia adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Data menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir, kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kualitas sumber daya manusia di negara-negara ASEAN. Seperti terlihat pada Tabel 1.2 yang menunjukkan kondisi kualitas sumber daya manusia Indonesia masih dibawah Malaysia dan Thailand, apalagi dibandingkan dengan kualitas sumber daya manusia Singapura dan Brunei Darussalam (Anonim, 2000-2020).

Tabel 1.2 Perkembangan Kualitas Manusia Indonesia dan ASEAN diukur dari Nilai HDI (2000-2020)

No	Negara	Tahun			
		2000	2010	2015	2020
1	Singapore	22	27	11	11
2	Brunei Darussalam	25	37	31	47
3	Malaysia	56	57	62	62
4	Thailand	67	92	93	79
5	Filipina	77	97	115	107
6	Indonesia	109	108	110	107
7	Vietnam	108	113	116	117

Sumber: Human Development Report (HDR), (2000-2021)

1.5.1 Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan masalah penting bagi bangsa Indonesia dalam hal kependudukan untuk kemajuan bangsa. Bonus demografi adalah keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan penduduk muda yang mengurangi besarnya beban investasi untuk pemenuhan kebutuhannya sehingga kegunaannya dapat dialihkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.



Bonus demografi merupakan suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sangat besar, sedangkan proporsi usia muda (di bawah 15 tahun) sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut (65 tahun ke atas) belum begitu banyak. Dengan demikian Bonus demografi dapat diartikan secara sederhana sebagai tambahan yang menguntungkan dalam hal kependudukan.

Berdasarkan hasil survei, penduduk Indonesia didominasi usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah mencapai 191,08 juta jiwa (70,72%). Jumlah itu jauh melampaui jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) sebanyak 63,03 juta jiwa (23,33%) dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) sebanyak 16,07 juta jiwa (5,95%). Jumlah penduduk usia muda cenderung turun sebagai konsekuensi penurunan *total fertility rate* yang merupakan dampak dari berhasilnya pengendalian kuantitas penduduk melalui program keluarga berencana, sedangkan jumlah penduduk lanjut usia cenderung meningkat sebagai dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Indonesia (Hasto Wardoyo, 2020).

Penurunan proporsi penduduk usia muda atau penduduk non produktif (<15 tahun) akan mengurangi beban ketergantungan dan akan merupakan keuntungan ekonomis. Investasi untuk pemenuhan kebutuhan penduduk usia muda dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. UNFPA menyatakan bahwa suatu negara dapat menikmati bonus demografi ketika setiap orang *menikmati kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kemandirian anak muda*. Setiap negara akan melalui era Bonus Demografi yang hanya terjadi sekali dalam sejarah suatu bangsa. Apabila suatu negara tidak siap menghadapi bonus demografi, maka yang terjadi justru bencana demografi, salah satunya angka pengangguran yang tinggi yang dapat menimbulkan potensi konflik sosial.

Sebagai ilustrasi, kondisi Indonesia pada tahun 1971 setiap satu orang usia produktif akan menanggung satu orang usia tidak produktif. Pada tahun 2000, setiap dua orang usia produktif akan menanggung satu orang usia tidak produktif. Pada tahun 2035 diprediksi akan mencapai puncaknya bahwa dua orang lebih usia produktif akan menanggung satu orang usia tidak produktif dengan nilai *Dependency Ratio* ($DR < 50\%$).

1.5.2 Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Konsep pembangunan berwawasan kependudukan sebagai suatu paradigma pembangunan Indonesia Emas 2045 yaitu berdaulat, maju, adil dan makmur sesuai Cita-Cita dan Visi Indonesia 100 tahun merdeka dengan sumber daya yang berkualitas dan produktif. Pertanyaannya adalah bagaimana pembangunan berwawasan kependudukan mampu menjadi pendekatan pembangunan untuk mencapai penduduk Indonesia yang berkualitas dan produktif.

Keberhasilan menikmati bonus demografi tidak terlepas dari orientasi pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan konsep *People Centered Development* (PCD), konsep ini mulai dikenal pada awal tahun 1990an. Tiga nilai utama PCD yaitu *justice*, *sustainability*, dan *inclusiveness*; dan penduduk tidak saja berfungsi sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

Isu besar PCD atau Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) adalah: penduduk sebagai titik sentral Pembangunan yang *population responsive*, pembangunan yang *population influencing*, pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan yang mensejahterakan dan pro rakyat, dan pembangunan yang partisipatif (BKKBN, 2012). Kesemuanya ini untuk mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki pendidikan dan atau ketrampilan yang berkelanjutan.



Konsep pembangunan berwawasan kependudukan merupakan paradigma pembangunan Indonesia Emas 2045 yaitu berdaulat, maju, adil dan makmur sesuai cita-cita dan Visi Indonesia 100 tahun merdeka dengan sumber daya yang berkualitas dan produktif. Pertanyaannya adalah bagaimana pembangunan berwawasan kependudukan mampu menjadi pendekatan pembangunan untuk mencapai penduduk Indonesia yang berkualitas dan produktif?

Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang meletakkan penduduk sebagai fokus, baik sebagai subyek maupun obyek, dalam rangka memperluas pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki pendidikan dan atau ketrampilan berkelanjutan. Untuk itu pengintegrasian kebijakan kependudukan kedalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup; Partisipasi semua pihak dan gotong royong; Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat; Kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat; Perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; Keadilan dan kesetaraan gender.

1.6 Penutup

Thomas Robbert Malthus, Garreth Hardin, Paul Ehrlich, John Stuart Mill, Arsene Domont, dan Enile Durkheim, dari mashab Malthusian, Neo Malthusian, Reformasi Teori Kependudukan, dan Pembangunan Kependudukan Berbasis Teknologi, telah berhasil meletakkan dasar teori pembangunan kependudukan. Indikator keberhasilan pembangunan kependudukan adalah bonus demografi, ditandai oleh *dependency ratio* yang menurun, kini dinikmati banyak negara dan Indonesia. Oleh karena itu Pembangunan Berwawasan Kependudukan menjadi fenomena baru agar upaya mencapai Pembangunan Berkelanjutan dapat berhasil.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- _____, 2000-2020. Human Development Index (HDI) Penduduk Dunia. Human Development Report and United Nation.
- _____, 2012. Pembangunan Sumberdaya Manusia Berwawasan Kependudukan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- _____, 2018. How Digital Technologies Are Impacting The Way We Grow And Distribute Food Gfa 2018: Digital Technologies In Food And Agriculture: Reaping The Benefits. Global Forum On Agriculture. Paris: 14-15 May 2018, *Organisation For Economic Co-Operation And Development (Oecd) Conference*.
- Hasto Wardoyo, 2020. Optimalkan Bonus Demografi, Agar tak Terjebak di Pendapatan Menengah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- Heryanah, 2015. *Ageing Population* dan Bonus Demografi Kedua di Indonesia. *Populasi*, 23 (2).
- Mantra IB. 2000. Pengantar Studi Demografi. Yogyakarta: Nurcahya.
- Rusli SJ. 2021. Implementasi Konsep Smart Farming Berbasis IOT dan Manfaatnya. *Jurnal Ilmu Teknik dan Komputer* 5(1). ISSN 2548-740X E-ISSN 2621-1491 233.
- Suandi, Ernawati HD, dan Ira Wahyuni, 2021. Strategi Pengelolaan Konsumsi Pangan dan Gizi Keluarga Petani Padi Sawah selama *Pandemic Covid-19* di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (tidak dipublikasikan). Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jambi.
- Singgih Susilo, dan Ifan Deffinika, 2021. Determinan Fertilitas Arjowilangun. Penerbit CV. Eureka Media Aksara.
- United Nation, 2021. Distribusi Penduduk Dunia berdasarkan Benua. Departemen Ekonomi dan Masalah Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations – Department of Economic and Social Affairs)

BAB



DINAMIKA DATA DASAR KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Junaidi

2.1 Pendahuluan

Dinamika kependudukan didefinisikan sebagai kondisi perubahan struktur penduduk, jumlah dan persebarannya sebagai akibat terjadinya proses demografi berupa kelahiran, kematian dan perpindahan. Guna mendeteksi perubahan tersebut tentunya diperlukan informasi berupa fakta dan data kependudukan. Terdapat tiga sumber data utama untuk kependudukan yaitu Sensus Penduduk, Registrasi dan Survei. Masing-masing sumber data tersebut memiliki metode dan cakupan wilayah cacah yang berbeda.

Sebelum masa modern, sensus penduduk pertama dilakukan Bangsa Cina pada masa 4000 SM. Pada zaman modern, sensus pertama kali dilaksanakan di Quebec, Kanada tahun 1665. Walaupun belum mencakup seluruh wilayah negaranya, pada abad-abad tersebut, beberapa negara juga telah melakukan pencacahan skala besar. Italia melakukan pencacahan di Sardinia (1773 dan 1795), Parma (1770), dan Tuscany (1766). Pada tahun 1742 Jerman juga melakukan pencacahan pada beberapa daerahnya. Swedia melakukan pencacahan pertama pada tahun 1749. Sensus penduduk pertama di Amerika Serikat pada Tahun 1790, sedangkan Inggris pada Tahun 1801 dan Perancis di Tahun 1800 dan 1806.

2.2 Sensus Penduduk

Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, penyusunan, evaluasi, penerbitan atau penyebaran data-data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu (United Nation, 2008). Cakupan sensus penduduk adalah semua orang/penduduk (yang hidup) dalam wilayah cacah tertentu baik secara *de jure* (yang biasanya bertempat tinggal) atau *de facto* (hadir/ada pada saat pencacahan).

Sensus penduduk dilaksanakan pada saat tertentu, secara periodik dan serentak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan pelaksanaan sensus penduduk paling tidak sekali 10 tahun. Topik sensus penduduk bersifat tetap yaitu terkait dengan aspek demografi, sosial dan ekonomi. PBB merekomendasikan informasi-informasi kunci yang perlu dicatat dalam sensus penduduk yaitu jenis kelamin, usia, status perkawinan, status pekerjaan, tingkat pendidikan, negara kelahiran, kondisi perumahan, dan komposisi rumah tangga. Sensus penduduk di Indonesia telah dilaksanakan sejak sebelum kemerdekaan. Selama periode tahun 1880-1905 telah dilaksanakan kegiatan sensus lima tahunan. Meskipun demikian, cakupan pelaksanaannya masih terbatas di Pulau Jawa. Pelaksanaan sensus yang mencakup seluruh wilayah nusantara baru pertama kali dilaksanakan pada Tahun 1930.

Selanjutnya setelah kemerdekaan telah dilaksanakan sensus penduduk sebanyak enam kali mulai dari Tahun 1961 sampai dengan sensus penduduk Tahun 2020. Pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

1. Sensus Penduduk 1961

Sensus Penduduk Tahun 1961 merupakan sensus pertama kali setelah Indonesia merdeka, mencakup 21 provinsi.



Variabel kependudukan yang dilaporkan adalah jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kepadatan penduduk tingkat provinsi.

2. Sensus Penduduk 1971

Sensus Penduduk Tahun 1971 dilaksanakan dalam tiga tahap, mencakup 26 provinsi. Tahap pertama listing rumah tangga, tahap kedua berupa pencacahan lengkap untuk pengumpulan informasi umum tentang umur, jenis kelamin, dan kewarganegaraan. Tahap ketiga berupa pencacahan dengan sampel 3,8% dari seluruh jumlah rumah tangga, yang bertujuan mengumpulkan informasi perseorangan maupun rumah tangga.

3. Sensus Penduduk 1980

Sensus Penduduk Tahun 1980 dilaksanakan pada 27 provinsi dengan pola mengikuti pola Sensus Penduduk Tahun 1971. Pencacahan lengkap mengumpulkan informasi mendasar seperti jenis kelamin dan kewarganegaraan. Pencacahan sampel dengan sekitar 5 persen dari jumlah rumah tangga, mengumpulkan informasi lebih rinci seperti kelahiran, migrasi, perkawinan dan tempat tinggal. Variabel kependudukan yang dilaporkan sebanyak 20 (dua puluh) variabel, signifikan dibandingkan dengan sensus penduduk sebelumnya.

4. Sensus Penduduk 1990

Penyelenggaraan Sensus Penduduk Tahun 1990 mengacu pola Sensus Penduduk Tahun 1980, baik dari sisi jumlah provinsi cakupan, tahapan, ukuran sampel maupun variabel kependudukan yang dilaporkan.

5. Sensus Penduduk 2000

Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2000 meliputi seluruh kabupaten/kotamadya di seluruh Indonesia. Sensus Penduduk Tahun 2000 dilakukan hanya dalam satu tahap (seperti Sensus Penduduk Tahun 1961), yaitu pencacahan lengkap. Data yang dikumpulkan mencakup bidang demografi (migrasi, fertilitas dan mortalitas), ketenagakerjaan (angkatan kerja, lapangan usaha, dan

status pekerjaan), dan sosial budaya (agama, kewarganegaraan/suku bangsa, dan tingkat pendidikan).

6. Sensus Penduduk 2010

Sensus Penduduk Tahun 2010 dilaksanakan di seluruh wilayah administrasi Indonesia, meliputi 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, 6.651 kecamatan, dan 77.126 desa/kelurahan. Sensus juga dilakukan terhadap duta besar atau diplomat perwakilan RI di luar negeri pendataan melalui e-census (email dan website). Informasi yang dikumpulkan mencakup hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, agama, kecacatan, suku bangsa, bahasa, migrasi, pendidikan, status perkawinan, ketenagakerjaan, fertilitas, mortalitas, dan fasilitas perumahan

7. Sensus Penduduk 2020

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 dibandingkan sensus penduduk sebelumnya. Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: 1). Sensus Penduduk Online (SPO), dimana penduduk secara aktif melakukan pengisian formulir informasi kependudukan melalui aplikasi web tanpa didatangi petugas sensus (CAWI: Computer Aided Web Interviewing), 2). Sensus Penduduk Wawancara, yang ditujukan kepada penduduk yang belum dapat berpartisipasi pada SPO. Petugas sensus mewawancarai dengan dua metode yaitu a. CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), petugas menggunakan gawai.

Perbedaan lain dengan sensus sebelumnya adalah terkait dengan konsep penduduk. Pada pelaksanaan Sensus Penduduk 2020, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun (SP sebelumnya selama 6 bulan) atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Informasi yang dikumpulkan dalam Sensus Penduduk 2020 mencakup variabel individu (jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, hubungan dengan kepala keluarga, lama tinggal pada alamat saat ini, kepemilikan akta kelahiran, kewarganegaraan, suku bangsa,



agama, status perkawinan, kemampuan berbahasa Indonesia), variabel pekerjaan (aktivitas yang biasa dilakukan, pekerjaan, status Pekerjaan), variabel pendidikan (ijazah/pendidikan tertinggi), dan variabel perumahan (status kepemilikan rumah yang ditempati saat ini, listrik, sumber air minum, kepemilikan jamban, jenis lantai terluas).

2.3 Survei

Survei adalah kegiatan pendataan dengan karakteristik cakupan hanya sebagian penduduk/sampel, penduduk bersifat pasif, waktunya fleksibel, topik dapat berganti-ganti sesuai kebutuhan. Beberapa survei yang menjadi sumber data utama kependudukan adalah Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

2.3.1 Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) merupakan salah satu sumber data kependudukan yang dilaksanakan diantara dua waktu sensus penduduk. Indonesia sudah melaksanakan SUPAS sebanyak lima kali mulai dari Tahun 1976 sampai Tahun 2015.

1. Survei Penduduk Antar Sensus 1976

Pelaksanaan SUPAS76 dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan informasi dasar mengenai komposisi dan banyaknya rumah tangga. Tahap kedua adalah pengumpulan informasi rinci berdasarkan data sub sampel dari sampel keseluruhan, yang mencakup karakteristik ekonomi dari rumah tangga dan anggotanya, status perkawinan, perceraian, pengalaman kelahiran, keinginan untuk mempunyai anak tambahan, pengetahuan dan praktek KB, dan perpindahan penduduk. Tahap ketiga disebut Survei Fertilitas Indonesia, dengan pertanyaan-pertanyaan bersumber dari kelompok pertanyaan seperti yang terdapat dalam Survei Fertilitas Dunia (World Fertility Survei). Cakupan survei hanya Pulau Jawa dan Bali.

2. Survei Penduduk Antar Sensus 1985

Pelaksanaan SUPAS Tahun 1985 dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia. Data yang dikumpulkan mencakup umur, jenis kelamin, angkatan kerja, perkawinan, kelahiran, dan keluarga berencana.

3. Survei Penduduk Antar Sensus 1995

SUPAS Tahun 1995 dilaksanakan di seluruh kabupaten/kotamadya di seluruh Indonesia. Data yang dikumpulkan mencakup aspek demografi (migrasi, fertilitas dan mortalitas, riwayat kelahiran dan kematian anak dari wanita pernah kawin), ketenagakerjaan (angkatan kerja, jam kerja, lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan), dan sosial budaya (partisipasi sekolah, tingkat pendidikan, bahasa, dan kondisi tempat tinggal).

4. Survei Penduduk Antar Sensus 2005

SUPAS Tahun 2005 dilaksanakan di seluruh kabupaten/kotamadya di seluruh Indonesia. Data yang dikumpulkan mencakup aspek demografi (migrasi, fertilitas dan mortalitas, mobilitas, riwayat kelahiran dan kematian anak dari wanita pernah kawin), ketenagakerjaan (angkatan kerja, jam kerja, lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan), dan sosial budaya (partisipasi sekolah, tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, dan kegiatan penduduk lanjut usia).

5. Survei Penduduk Antar Sensus 2015

Terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara SUPAS Tahun 2015 dengan SUPAS-SUPAS sebelumnya. Pertama, SUPAS Tahun 2015 menyajikan data kematian ibu yang lebih akurat. Kedua, menggunakan dua metode untuk mengumpulkan data kematian, yaitu metode langsung, dengan cara mencatat kejadian kematian yang terjadi di rumah tangga sampel, dan metode tidak langsung, dengan cara mencatat kejadian kematian dari saudara responden perempuan. Ketiga, pencatatan penduduk dilakukan dengan cara *de jure* dan *de facto*. Keempat, selain mengumpulkan data kependudukan yang sama seperti SUPAS sebelumnya, juga



mengumpulkan informasi mengenai: migrasi keluar internasional, perubahan iklim, dan disabilitas.

2.3.2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) adalah serangkaian survei sosial ekonomi multi-tujuan berskala besar yang dimulai pada tahun 1963-1964. Data yang dikumpulkan terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan, sosial ekonomi lainnya, kegiatan sosial budaya, konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, perjalanan, dan pendapat masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangganya.

Sejak tahun 1992, melalui SUSENAS, setiap tahun dikumpulkan data-data pokok yang bertujuan untuk menggambarkan kesejahteraan rakyat. Sistem pengumpulan data SUSENAS terdiri dari Kor dan Modul. Kor adalah pengumpulan data yang bersifat umum dan dilakukan tiap tahun yang mencakup informasi mengenai anggota rumah tangga, suku bangsa kepala rumah tangga, kematian, kesehatan, pendidikan, kegiatan ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, teknologi dan informasi, rata-rata konsumsi/pengeluaran rumah tangga dan sumber penghasilan utama rumah tangga, sosial ekonomi lainnya, luas lahan pertanian. Modul mengumpulkan data yang lebih rinci dan mendalam dibandingkan data untuk topik yang sama dalam kor. Terdapat tiga modul SUSENAS yaitu Modul Konsumsi/Pengeluaran dan Pendapatan Rumah Tangga, Modul Sosial Budaya dan Pendidikan serta Modul Kesehatan dan Perumahan. Ketiga modul ini dilakukan berulang/bergantian tiap tiga tahun.

2.3.3 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) adalah survei yang dirancang khusus yang bertujuan untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. SAKERNAS di Indonesia dimulai pada Tahun 1976. Meskipun demikian, pelaksanaan SAKERNAS secara rutin baru dimulai sejak Tahun 1986. Secara umum, periode pengumpulan data ketenagakerjaan dilakukan semesteran.

Semester pertama kegiatan pengumpulan datanya terpadu dengan pelaksanaan SUSENAS pada bulan Januari-Februari, sedang semester kedua pengumpulan datanya melalui SAKERNAS yang pencacahannya dilakukan pada Bulan Juli – Agustus. Pada tahun-tahun yang berakhir 0 atau 5, kegiatan SAKERNAS dipadukan ke dalam Sensus Penduduk atau SUPAS.

Terdapat tiga tujuan utama pengumpulan data ketenagakerjaan yaitu: 1) mengetahui kesempatan kerja, dan kaitannya dengan pendidikan, jumlah jam kerja, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan; 2) pengangguran dan setengah pengangguran; 3) Penduduk bukan angkatan kerja.

2.3.4 Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) merupakan bagian dari program internasional Demographic and Health Survey (DHS). Pelaksanaan SDKI bertujuan untuk mengumpulkan data fertilitas, keluarga berencana, kematian maternal, kesehatan ibu dan anak. Di Indonesia.

SDKI sudah dilakukan sebanyak 8 kali. Survei pertama adalah Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia yang dilakukan pada tahun 1987 (SPI87). Selanjutnya adalah SDKI Tahun 1991, SDKI Tahun 1994, SDKI Tahun 1997, SDKI Tahun 2002-2003 SDKI Tahun 2007, SDKI Tahun 2012 dan SDKI Tahun 2017. SDKI memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a) Menyediakan data perilaku fertilitas, KB, kesehatan ibu dan anak, kematian ibu, dan pengetahuan tentang AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS).
- b) Mengukur perubahan angka kelahiran dan pemakaian alat kontrasepsi, serta faktor yang mempengaruhinya, seperti pola dan status perkawinan, daerah tempat tinggal, pendidikan, kebiasaan menyusui, dan pengetahuan, penggunaan, serta penyediaan alat - alat kontrasepsi.



- c) Mengukur pencapaian sasaran dari program kesehatan nasional, khususnya yang berkaitan dengan program pembangunan kesehatan ibu dan anak.
- d) Menilai partisipasi dan penggunaan pelayanan kesehatan oleh pria bagi seluruh keluarganya.
- e) Menyediakan data dasar yang dapat diperbandingkan dengan negara - negara lain.

2.4 Registrasi Penduduk

Registrasi adalah kumpulan keterangan mengenai terjadinya peristiwa lahir, mati serta segala kejadian penting yang merubah status sipil seseorang sejak dia lahir hingga mati. Kejadian tersebut mencakup perkawinan, perceraian migrasi. Registrasi mencatat peristiwa-peristiwa penting (statistik vital) Berdasarkan sejarahnya, registrasi penduduk (registrasi vital) di Indonesia sudah dilakukan sejak Tahun 1815 (Tukiran, 1990).

Terdapat dua karakteristik utama yang membedakan registrasi dengan sensus dan survei. Pertama, registrasi merupakan pencatatan terus menerus atau rutin dan yang kedua adalah penduduk bersifat aktif (penduduk melaporkan kejadian-kejadian vital).

Di Indonesia, peristiwa-peristiwa vital dilakukan oleh instansi/badan yang berbeda-beda. Untuk pencatatan kelahiran, kematian, migrasi (pindah) dilakukan di kantor kelurahan, yang nantinya akan diteruskan ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun demikian, terdapat juga registrasi yang dilakukan di badan lain misalnya KUA (Kantor Urusan Agama) untuk pencatatan pernikahan.

2.5 Parameter Kependudukan

Parameter kependudukan dapat dibedakan atas dua kelompok yaitu yaitu parameter demografi (kelahiran, kematian, migrasi) dan non demografi (pendidikan, ketenagakerjaan dan lainnya). Pengukuran parameter kependuduk bertujuan untuk

mengetahui peristiwa yang diukur, waktu kejadiannya dan kelompok yang mengalami kejadian.

Parameter kependudukan dapat diukur secara absolut maupun secara relatif. Ukuran absolut adalah ukuran yang mengacu pada nilai sebenarnya. Ukuran absolut ini bisa dinyatakan dalam ratusan (00), ribuan (000) maupun jutaan (000.000) tergantung cakupan wilayah administrasinya. Semakin sempit cakupan wilayah administrasinya, data yang disajikan cenderung menggunakan nilai absolut murni. Misalnya jumlah penduduk Kecamatan Merlung Tahun 2020 sebanyak 16.196 jiwa. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 sebanyak 270 juta jiwa.

Ukuran relatif terdiri dari rate, rasio dan proporsi. Rate (angka atau tingkat) merupakan banyaknya peristiwa vital suatu penduduk dalam jangka waktu tertentu. Ada dua jenis rate yaitu crude rate (angka kasar) dan specific rate (angka spesifik). Angka kasar (*crude rate*), adalah pengukuran parameter kependudukan dimana angka pembagi dalam parameter tersebut adalah penduduk lengkap. Misalnya Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*) yang merupakan hasil bagi antara jumlah kematian dengan jumlah penduduk. Sebaliknya angka spesifik (*specific rate*) adalah pengukuran parameter kependudukan dimana angka pembaginya adalah kelompok penduduk tertentu. Misalnya ASFR₁₉₋₂₄ (*Age Specific Fertility Rate*) yang merupakan hasil bagi antara jumlah kelahiran pada wanita usia 19-24 tahun dengan jumlah wanita usia 19 – 24 tahun.

Rasio merupakan angka yang menyatakan nilai relatif hasil perbandingan dari dua bilangan yaitu pembilang dan penyebut, namun pembilang bukan merupakan bagian dari penyebut. Contoh: Rasio jenis kelamin penduduk Indonesia tahun 2020 (perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan) adalah 102. Artinya terdapat 102 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.



Proporsi merupakan angka relatif hasil perbandingan dari dua bilangan (pembilang dan penyebut), tetapi pembilang merupakan bagian dari penyebut, biasanya dinyatakan dalam perseratus atau perseribu. Contoh : Proporsi penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) di Indonesia pada tahun 2020 adalah = 70,72 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia.

Selanjutnya, pengukuran parameter kependudukan biasanya menggunakan perkalian dengan konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan tunggal yang nilainya tetap, misalnya 100, 1000 atau 100.000 yang berfungsi sebagai pengali untuk memperjelas hasil pengukuran. Konstanta biasanya dinyatakan dengan K. Pada bagian berikutnya akan diperinci lebih lanjut pengukuran kependudukan khususnya untuk parameter demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Terdapat dua metode pengukuran parameter demografi yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Jika tersedia data registrasi vital yang lengkap, metode langsung dapat digunakan. Jika data tidak tersedia secara lengkap, digunakan metode tidak langsung dengan memanfaatkan data hasil survei maupun sensus.

2.5.1 Fertilitas

Pengukuran fertilitas dapat dibagi atas dua kelompok utama yaitu pengukuran fertilitas tahunan dan pengukuran fertilitas kumulatif. Pengukuran fertilitas tahunan mencerminkan fertilitas suatu kelompok penduduk/berbagai kelompok penduduk untuk jangka waktu satu tahun dan disebut juga dengan “current fertility”. Pengukuran fertilitas kumulatif mencerminkan banyaknya kelahiran sekelompok atau beberapa kelompok perempuan selama masa reproduksinya.

Dalam fertilitas tahunan terdapat beberapa ukuran yaitu: (1) CBR (Crude Birth Rate atau Angka Kelahiran Kasar), (2) GFR (General Fertility Rate atau Angka Fertilitas Umum) dan (3) ASFR (Age Spesific Fertility Rate atau Angka Fertilitas Menurut Umur)/sedangkan dalam fertilitas kumulatif terdapat beberapa ukuran: (4) TFR (Total Fertility Rate atau Angka Fertilitas Total), (5) GRR

(Gross Reproduction Rate atau Angka Reproduksi Bruto), dan (6) NRR (Net Reproduction Rate atau Angka Reproduksi Neto).

1. CBR (Crude Birth Rate)

Jumlah kelahiran hidup per 1000 penduduk dalam suatu periode tertentu biasanya satu tahun, dimana B – jumlah kelahiran dalam 1 tahun, P = jumlah penduduk pertengahan tahun, k = konstanta = 1000

$$CBR = \frac{B}{P} \times k$$

Pengukuran fertilitas dengan CBR ini memiliki keunggulan karena perhitungannya relatif sederhana dan hanya memerlukan keterangan atau data tentang jumlah kelahiran dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Namun demikian, hasil pengukurannya masih kasar karena tidak memisahkan penduduk yang beresiko melahirkan (exposed to risk) yaitu perempuan usia reproduksi (15–44 tahun atau 15–49 tahun) dengan yang tidak beresiko melahirkan (yaitu laki-laki, serta perempuan diluar usia reproduksi -- anak-anak atau orang tua)

Contoh: Banyaknya kelahiran di Propinsi A pada tahun 2020 adalah 120.885 orang bayi, sedangkan banyaknya penduduk pada pertengahan tahun 2020 sebesar 3.526.900 orang. Dengan demikian CBR: $\frac{120885}{3526900} \times 1000 = 34,3$ perseribu penduduk, artinya terdapat rata-rata 34,3 kelahiran di Propinsi A pada tahun 2020

2. GFR (General Fertility Rate)

Jumlah kelahiran per 1000 perempuan pada usia reproduksi dalam periode tertentu. Ukuran GFR ini lebih cermat dibandingkan CBR karena hanya memasukkan perempuan yg berumur 15-49 th atau 15-44 th sebagai penduduk yang beresiko melahirkan (exposed to risk). Namun demikian, ukuran ini masih memiliki kelemahan karena tidak membedakan resiko melahirkan dari berbagai kelompok umur sehingga perempuan yg berumur lebih



40 tahun dianggap sama risikonya dengan perempuan yg berumur 20 tahun.

$$GFR = \frac{B}{P_{f(15-49)}} \times k \quad P_{f15-49} = \text{jumlah penduduk perempuan}$$

umur 15-49 tahun

Contoh: banyaknya kelahiran di Propinsi A pada tahun 2020 adalah 120.885 orang bayi, sedangkan jumlah perempuan umur 15–49 tahun pada pertengahan tahun 2020 sebanyak 1.005.325 orang. GFR Provinsi A pada tahun 2020 adalah: ___GFR

$$\frac{120885}{1005325} \times 1000 = 120,5 \text{ perseribu penduduk perempuan usia 15-}$$

49 tahun

3. ASFR (Age Spesific Fertility Rate)

Jumlah kelahiran per 1000 perempuan menurut kelompok umur dalam usia reproduksi pada satu periode tertentu. ASFR memiliki keunggulan (no a, b, c dan d) dan kelemahan (no e dan f)

- a) Ukurannya lebih cermat dari GFR karena sudah membagi penduduk yang terpapar ke dalam berbagai kelompok umur.
- b) Dapat dianalisis perbedaan fertilitas (current fertility) menurut berbagai karakteristik perempuan
- c) Dapat dilakukan studi fertilitas menurut kohor
- d) ASFR ini merupakan dasar untuk penghitungan ukuran fertilitas dan reproduksi selanjutnya (TFR, GRR, dan NRR).
- e) Memerlukan data yang terinci yaitu banyaknya kelahiran tiap kelompok umur.
- f) Tidak menunjukkan ukuran fertilitas untuk seluruh perempuan umur 15–49 tahun.

$ASFR_i = \frac{B_i}{P_f} \times k$ dimana B_i = jumlah kelahiran dalam kelompok umur i dalam setahun dan P_f = jumlah penduduk perempuan pertengahan tahun kelompok umur i

4. TFR (Total Fertility Rate)

TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, dan perempuan tersebut mengikuti angka fertilitas pada tahun yang bersangkutan. Jadi TFR merupakan jumlah ASFR dengan catatan bahwa umur dinyatakan 1 tahun.

$$TFR = 5 \sum ASFR_i$$

ASFR = angka kelahiran menurut kelompok umur, dan I = kelompok umur 5 tahun, dimulai dari 15–49 tahun

Contoh : Berdasarkan Tabel 3.1_TFR Propinsi A adalah

$TFR = 5 (46+151+192+233+91+50+8) = 3859$ per 1000 perempuan usia 15–49 atau rata-rata 3,9 orang anak dilahirkan oleh perempuan usia 15 – 49 tahun

Tabel 2.1 ASFR Propinsi A Tahun 2020

Umur (1)	Penduduk		ASFR (4) = (3)/(2) × 1000
	Perempuan (2)	Kelahiran (3)	
15 – 19	228511	10470	46
20 – 24	179456	27128	151
25 – 29	173246	33315	192
30 – 34	140957	32839	233
35 – 39	130400	11898	91
40 – 44	95006	4759	50
45 – 49	57749	476	8
Jumlah	1005325	120885	



5. GRR (Gross Reproduction Rate)

Rata-rata jumlah anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama hayatnya, dengan mengikuti pola fertilitas yang sama seperti ibunya. GRR dapat dihitung dengan cara:

- a) Jika diasumsikan rasio jenis kelamin (seks rasio) pada saat dilahirkan dari bayi yang dilahirkan oleh tiap kelompok usia adalah sama, dimana SR_0 adalah seks rasio pada saat lahir.

$$GRR = \frac{100}{100 + SR_0} \times TFR$$

- b) Jika diketahui banyaknya bayi perempuan untuk masing-masing kelompok usia ibu, maka:

$$GRR = 5 \sum ASFR_f$$

$ASFR_{fi}$ = ASFR yang dihitung hanya untuk kelahiran bayi perempuan pada kelompok umur reproduksi

Contoh 1 Jika diasumsikan seks rasio waktu lahir di Propinsi A pada tahun 2020 (dalam contoh sebelumnya) adalah 105, maka:

$$GRR = \frac{100}{100 + 105} \times 3859 = 1882,4 \text{ perseribu perempuan usia}$$

15-49 tahun atau rata-rata 1,88 orang anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama hayatnya dengan mengikuti pola fertilitas dan mortalitas yang sama seperti ibunya.

Contoh 2

$GRR = 5 (22+74+94+114+43+24+4) = 1872$ per 1000 perempuan usia 15 – 49 tahun atau 1,9 tiap perempuan usia 15-49 tahun.

Artinya: rata-rata jumlah anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan usia 15 – 49 tahun selama hayatnya

dengan mengikuti pola fertilitas dan mortalitas yang sama seperti ibunya adalah sebanyak 1,9 orang

Tabel 2.2 GRR Propinsi A Tahun 2020

Umur (1)	Penduduk Perempuan (2)	Kelahiran bayi perempuan (3)	ASFR _{fi} (4) = (3)/(2) x 1000
15 – 19	228511	5007	22
20 – 24	179456	13233	74
25 – 29	173246	16300	94
30 – 34	140957	16019	114
35 – 39	130400	5603	43
40 – 44	95006	2321	24
45 – 49	57749	210	4
Jumlah	1005325	58693	

6. NRR (Net Reproduction Rate)

Rata-rata jumlah anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama hayatnya, dan akan tetap hidup sampai dapat menggantikan kedudukan ibunya, dengan mengikuti pola fertilitas dan mortalitas yang sama seperti ibunya.

$$NRR = 5 \sum ASFR_{fi} \times {}^5L_x/L_0$$

${}^5L_x/L_0$ = probabilita kematian bayi dalam usia reproduksi (dari tabel kematian)

Tabel 2.3 menunjukkan NRR Propinsi A pada tahun 2020 adalah: $NRR = 5 \times 359.544 = 1797,72$ perseribu perempuan atau 1,8 per-perempuan usia 15 – 49 tahun. Ini berarti bahwa rata-rata jumlah anak perempuan yang dilahirkan seorang perempuan dan akan tetap hidup sampai dapat menggantikan ibunya adalah sebanyak 1,8 orang.

**Tabel 2.3 NRR Propinsi A Tahun 2020**

Umur	ASFR _i	Rasio masih hidup hingga usia ibunya	Bayi yang diharapkan tetap hidup per 1000 perempuan
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) × (3)
15 – 19	22	0.9721	21.300
20 – 24	74	0.9701	71.535
25 – 29	94	0.9623	90.539
30 – 34	114	0.9587	108.951
35 – 39	43	0.9511	40.867
40 – 44	24	0.9402	22.969
45 – 49	4	0.9305	3.384
Jumlah			359.544

2.5.2 Mortalitas

Terdapat berbagai ukuran mortalitas, diantaranya yang umum digunakan adalah: CDR (Crude Death Rate atau Angka Kematian Kasar), ASDR (Age Spesific Death Rate atau Angka Kematian Menurut Umur, dan IMR (Infant Mortality Rate) atau Angka Kematian Bayi):

1. CDR (Crude Death Rate)

Jumlah kematian per 1000 penduduk dalam suatu periode tertentu, dimana D = jumlah kematian dalam setahun, P = jumlah penduduk pertengahan tahun, k = konstanta = 1000.

$$CDR = \frac{D}{P} \times k$$

Contoh: Banyaknya kematian di Propinsi A pada tahun 2020 adalah 57884 orang, sedangkan banyaknya penduduk pada pertengahan tahun 2020 sebesar 3.526.900 orang. Dengan demikian, CDR Provinsi A pada tahun 2020 adalah:

$$\frac{57884}{3526900} \times 1000 = 16,4 \text{ perseribu penduduk}$$

2. ASDR (Age Spesific Death Rate)

Jumlah kematian per 1000 penduduk menurut kelompok umur dalam suatu periode tertentu; D_i = jumlah kematian dalam kelompok umur i dalam setahun dan P_i = jumlah penduduk pertengahan tahun kelompok umur i

$$ASDR_i = \frac{D_i}{P_i} \times k$$

Tabel 2.4. ASDR Propinsi A Tahun 2020

Umur	Penduduk	Kematian	ASDR
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2) x 1000
0 - 4	342127	6251	18.27
5 - 9	362884	700	1.93
10 - 14	337805	513	1.52
15 - 19	304001	714	2.35
20 - 24	268114	992	3.70
25 - 29	257370	1006	3.91
30 - 34	210576	838	3.98
35 - 39	246340	1261	5.12
40 - 44	201551	1098	5.45
45 - 49	219937	1920	8.73
50 - 54	179948	1952	10.85
55 - 59	176439	4467	25.32
60 - 64	144359	5790	40.11
65+	275449	30379	110.29
Jumlah	3526900	57884	

3. IMR (Infant Mortality Rate)

Ukuran Infant Mortality Rate (IMR) menggambarkan jumlah kematian bayi berumur dibawah 1 tahun untuk setiap 1000 kelahiran hidup, selama satu periode tertentu. Dalam prakteknya, perhitungan IMR ini sulit dilakukan karena ketidaktersediaan data untuk perhitungannya. Oleh karenanya, IMR umumnya dihitung



dengan metode tidak langsung (yang tidak dibahas dalam buku ini).

$$IMR = \frac{D_0}{B} \times k$$

Dimana D_0 = jumlah bayi (penduduk usia dibawah 1 tahun) dan B = jumlah kelahiran dalam satu tahun tertentu

Misalnya IMR di Propinsi A pada tahun 2020 adalah sebesar 86. Ini berarti pada tahun 2020 terjadi kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun sebanyak 86 orang untuk setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tersebut.

2.5.3 Mobilitas/ Migrasi

Beberapa ukuran mobilitas/migrasi yang umum digunakan yaitu: angka mobilitas, angka migrasi masuk (In-migration), angka migrasi keluar (Out-Migration), angka migrasi neto (Net-Migration), dan angka migrasi bruto (Gross-migration).

1. Angka mobilitas

Rasio banyaknya penduduk yang pindah secara lokal (mover) dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah penduduk, dimana m = angka mobilitas, M = jumlah mover. P = jumlah penduduk pertengahan tahun. Dalam prakteknya, angka mobilitas ini sulit dihitung karena tidak tersedianya data mengenai jumlah penduduk yang pindah secara lokal.

$$m = \frac{M}{P} \times 1000$$

2. Angka migrasi masuk

Menunjukkan banyaknya migran yang masuk per seribu penduduk daerah tujuan dalam satu periode waktu, dimana: I = jumlah migran masuk

$$M = \frac{I}{P} \times 1000$$

Contoh: Jumlah migran yang masuk ke Propinsi A tahun 2020 sebanyak 48.389 orang. Jumlah penduduk pertengahan

tahun 2020 di Propinsi A adalah 3.526.900 orang. Dengan

demikian : $IM = \frac{48389}{3526900} \times 1000 = 13,7$ perseribu penduduk

3. Angka migrasi keluar

Menunjukkan banyaknya migran yang keluar per seribu penduduk daerah asal dalam satu periode waktu, dimana: O = jumlah migran keluar

$$OM = \frac{O}{P} \times 1000$$

Contoh: Jumlah migran yang keluar dari Propinsi A tahun 2020 sebanyak 32.447 orang. Dengan demikian:

$$OM = \frac{32447}{3526900} \times 1000 = 9,2 \text{ perseribu penduduk}$$

4. Angka migrasi neto

Menunjukkan selisih migran masuk dan keluar per seribu penduduk dalam satu periode waktu

$$M = \frac{I - O}{P} \times 1000$$

Contoh: Dari data migran masuk dan keluar di Propinsi A, dapat dihitung angka migrasi neto sebagai berikut:

$$NM = \frac{48389 - 32447}{3526900} \times 1000 = 4,5 \text{ perseribu penduduk}$$

5. Angka migrasi Bruto

Menunjukkan banyaknya perpindahan (migran masuk + migran keluar) per seribu penduduk daerah asal dan daerah tujuan dalam satu periode waktu, dimana P_1 = jumlah penduduk di tempat asal dan P_2 = jumlah penduduk di tempat tujuan

$$GM = \frac{I + O}{P_1 + P_2} \times 1000$$



Contoh: Migrasi keluar dari daerah C ke daerah D tahun 2020 sebanyak 50.000 orang. Migrasi masuk dari daerah D ke daerah C tahun 2020 sebanyak 30.000 orang. Jumlah penduduk daerah C sebanyak 3.000.000 orang dan penduduk daerah D sebanyak 2.500.000 orang. Dengan demikian angka migrasi bruto adalah:

$$GM = \frac{30000 + 50000}{3000000 + 2500000} \times 1000 = 14,5 \text{ p e r s e r i b u}$$

penduduk

2.6 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan gambaran perubahan jumlah penduduk terhadap waktu. Perubahan itu bisa positif atau negatif. Perubahan positif dikaitkan dengan peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan negatif dapat dikaitkan dengan penurunan penduduk. Perubahan penduduk dapat terjadi karena faktor kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar,

Terdapat tiga metode perhitungan pertumbuhan penduduk yaitu aritmatik, geometrik dan eksponensial. Ketiga model ini memiliki asumsi yang berbeda. Metode aritmatik memiliki asumsi bahwa jumlah penduduk bertambah dengan jumlah yang sama setiap tahun. Asumsi metode geometrik adalah jumlah penduduk bertambah secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga majemuk. Penduduk bertambah pada tingkat pertumbuhan (persentase) yang tetap. Metode eksponensial memiliki asumsi bahwa penambahan penduduk terjadi secara sedikit-sedikit sepanjang tahun. Berbeda dengan metode geometrik yang mengasumsikan penambahan penduduk hanya terjadi pada satu saat selama kurun waktu tertentu. Ketiga metode perhitungan tersebut juga digunakan dalam menghitung perkiraan waktu (dalam tahun) ketika jumlah penduduk mencapai dua kali lipat (*doubling time*). Rumus-rumus perhitungan untuk ketiga metode tersebut diberikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.5 Metode Perhitungan Pertumbuhan Penduduk dan Doubling Time

Metode	Pertumbuhan penduduk	Doubling time
Aritmatik	$r = \frac{1}{t} \left(\frac{Pt}{Po} - 1 \right)$	$DT = \frac{1}{r}$
Geometrik	$r = \left(\frac{Pt}{Po} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$	$DT = \frac{\log 2}{\log(1+r)}$
Ekspensial	$r = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{Pt}{Po} \right)$	$DT = \frac{\ln 2}{r}$

Contoh perhitungan: diketahui jumlah penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa dan Sensus Penduduk Tahun 2020 sebanyak 270.203.917 jiwa. Berdasarkan data tersebut hitunglah pertumbuhan penduduk dan doubling time menurut metode aritmatik, geometrik dan eksponensial.

a. Metode Aritmatik

$$r = \frac{1}{10} \left(\frac{270.203.917}{237.641.326} - 1 \right) = 0,0137 \text{ atau } 1,37 \text{ persen pertahun}$$

$$DT = \frac{1}{0,0137} = 72,90 \text{ tahun}$$

b. Metode Geometrik

$$r = \left(\frac{270.203.917}{237.641.326} \right)^{\frac{1}{10}} - 1 = 0,0129 \text{ atau } 1,29 \text{ persen pertahun}$$

$$DT = \frac{\log 2}{\log(1+r)} = \frac{0,30103}{\log(1+0,0129)} = 53,977 \text{ tahun}$$



c. Metode Eksponensial

$$r = \frac{1}{10} \ln \left(\frac{270.203.917}{237.641.326} \right) = 0,0128 \text{ atau } 1,28 \text{ persen pertahun}$$

$$DT = \frac{\ln 2}{r} = \frac{0,6931}{0,0128} = 53,977 \text{ tahun}$$

2.7 Penutup

Masalah kependudukan adalah masalah yang dinamis dan selalu mengalami perubahan, seperti perubahan struktur penduduk, jumlah dan persebarannya sebagai akibat terjadinya proses demografi berupa kelahiran, kematian dan perpindahan. Perubahan-perubahan tersebut didasari pada perubahan data dasar kependudukan yang digunakan. Kedinamisan data dasar kependudukan, seperti Sensus Penduduk (SP) yang mengalami perubahan konsep, perubahan cakupan daerah sensus. Selain SP ada beberapa SURVEI: SUSENAS, SAKERNAS, SDKI dan Registrasi Penduduk. Semua Data Dasar Kependudukan bermanfaat bagi pengguna untuk menyelidik kondisi penduduk Indonesia, sehingga saran kebijakan yang dibuat pengguna efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Alma, L.R. 2019. *Ilmu Kependudukan*. Malang: Wineka Media
- BPS. 2020. *Sensus Penduduk 2020*. <https://www.bps.go.id/sp2020/>
- BPS. 2021. *Potret Sensus Penduduk 2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia*. Jakarta: BPS
- BPS. *Metadata Statistik Dasar*. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/index>
- BPS, Kemenkes, BKKBN. 2018. *Laporan Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: BPS, Kemenkes, BKKBN



- Gischa, S. 2020. *Sejarah Perjalanan Sensus Penduduk di Indonesia*.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/01/150000069/sejarah-perjalanan-sensus-penduduk-di-indonesia?page=all>
- Irianto, A. & Friyatmi. 2016. *Demografi & Kependudukan*. Jakarta: Prenada Media
- Majumdar, P.K. 2010. *Fundamentals of Demography*. Rawat Publication
- Mandal, B.P. 2021. *Element in Social Demography*. K.K. Publication
- Smith, D.P. 2013. *Formal Demography*. Springer Science & Business Media.
- Suwito. 2020. *Pengantar Demografi*. Malang: Ediide Infografika
- Tukiran. 2000. Sensus Penduduk di Indonesia. *Populasi*, 11(1), 17-34
- United Nations. 2008. *Principle and Recommendation for Population and Housing Censuses*. New York: United Nations.

BAB

3

POLA FERTILITAS, MORTALITAS DAN MIGRASI TAHUN 1971-2010

Suandi

3.1 Pendahuluan

Penduduk dan pembangunan adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan. Informasi penduduk, baik tentang jumlah, persebaran, struktur, maupun komposisi menurut berbagai kelompok sangat diperlukan untuk berbagai perencanaan pembangunan. Informasi kependudukan yang harus tersedia untuk perencanaan pembangunan tidak hanya berupa data pada saat perencanaan itu dibuat, tetapi diperlukan juga informasi kependudukan pada saat yang akan datang dan pada saat-saat yang lalu (historis). Untuk itu, kajian mengenai pola Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi selama periode 1971-2010 sangat penting diperhatikan.

Pembangunan di Indonesia selama masa reformasi yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun terlihat sudah banyak memberikan hasil yang menggembarakan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan di bidang perhubungan (transportasi, komunikasi), peluang kerja, dan berusaha antar wilayah mendorong migrasi antar provinsi semakin meningkat. Pada sisi lain, gerakan keluarga berencana nasional telah berhasil mengikutsertakan sebagian pasangan usia subur untuk memakai alat kontrasepsi walaupun

keberhasilannya belum mampu menyaingi keunggulan pada masa Orde Baru sebagai masa Emas Program Keluarga Berencana (KB). Angka prevelansi kontrasepsi dari waktu ke waktu semakin meningkat dan berpengaruh terhadap penurunan angka fertilitas. Selain hal itu, keberhasilan dibidang kesehatan berpengaruh terhadap penurunan angka kematian dan peningkatan derajat kesehatan penduduk sehingga angka harapan hidup cenderung meningkat. Perubahan-perubahan fertilitas, mortalitas, dan migrasi tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah dan struktur penduduk pada masa mendatang.

Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 1990, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 180 juta jiwa dan diperkirakan akan terus bertambah. Biro Pusat Statistik telah melakukan proyeksi penduduk hingga tahun 2025, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 akan menjadi 270 juta jiwa (Anonim, 2008). Dengan jumlah penduduk yang semakin besar, Indonesia dihadapkan pada masalah-masalah yang pelik dan rumit, termasuk masalah sosial ekonomi saling pengaruh mempengaruhi dengan masalah kependudukan.

Persebaran penduduk yang belum atau tidak merata, dan kualitas penduduk yang belum mencapai taraf harapan, merupakan masalah yang besar dan tidak sederhana dalam penanganannya. Hal ini sangat terkait dengan pola fertilitas, mortalitas, migrasi, serta pergerakannya yang mengandung pengaruh pola perilaku social ekonomi individu. Oleh karena itu, kajian pola fertilitas, mortalitas dan mobilitas menjadi penting untuk dianalisis.

3.2 Pola Fertilitas

Fertilitas atau tingkat kelahiran merupakan produk dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa teori menerangkan pengaruh faktor-faktor terhadap fertilitas cukup banyak, seperti teori ekonomi mikro: pengambilan keputusan rumahtangga tentang pemilihan akan pemilikan anak oleh Becker (1995), teori *supply* dan *demand* anak (integrasi teori ekonomi dan sosiologi) serta biaya regulasi fertilitas oleh Richard Easterlin *dalam*



United Nation (2001), dan sebagainya, sedangkan yang berperan dalam peningkatan fertilitas adalah faktor sosial budaya, ekonomi, maupun nilai tentang anak.

Beberapa ahli menyebutkan bahwa studi fertilitas lebih cenderung memakai teori sosiologi dari Freedman (1979) yang menggunakan konsep analisis dengan memperhatikan variabel secara kausal dan urutan timbulnya variabel. Model yang digunakan umumnya model dari Freedman dengan pendekatan 11 variabel *intermediate* yang disarankan oleh Davis dan Blake (1956) (David et al., 1990:56-57). Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas dibagi dua, yaitu: (1) faktor latar belakang yang secara tidak langsung mempengaruhi fertilitas; dan (2) variabel *intermediate* sebagai faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi fertilitas.

Davis dan Blake membagi sebelas variabel tersebut menjadi tiga kategori: variabel-variabel hubungan seks; variabel-variabel konsepsi; dan variabel-variabel gestasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga kategori tersebut (Mantra, 2000:219-220) adalah:

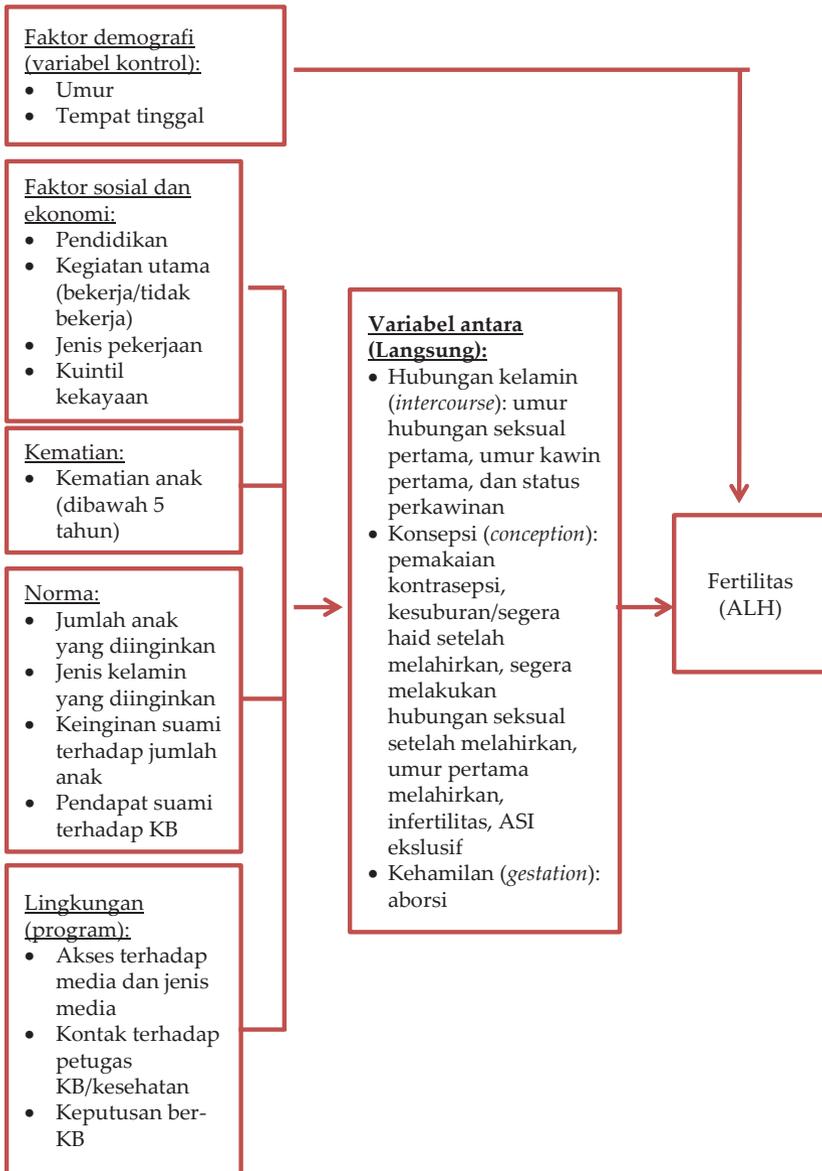
- 1) Hubungan seks dipengaruhi oleh variabel: (a) umur memulai hubungan seks; (b) selibat permanen; (c) lamanya masa reproduksi yang hilang, seperti: perpisahan/perceraian dan suami meninggal dunia; (d) abstinensi sukarela dan paksa; dan (e) frekuensi hubungan seks;
- 2) Konsepsi dipengaruhi oleh variabel: (a) kesuburan dan kemandulan sengaja dan tidak sengaja; dan (b) penggunaan alat kontrasepsi;
- 3) Kehamilan dan kelahiran dipengaruhi oleh variabel: (a) kematian janin baik sengaja atau tidak sengaja

Model Freedman (Gambar 3.1) dikembangkan oleh Bollen, Glanville, dan Stecklov, 2002) dengan "*A Latent Variable Approach*" (Gambar 3.2). Fertilitas tidak saja dipengaruhi oleh faktor demografi tetapi juga ditentukan oleh faktor non demografi seperti

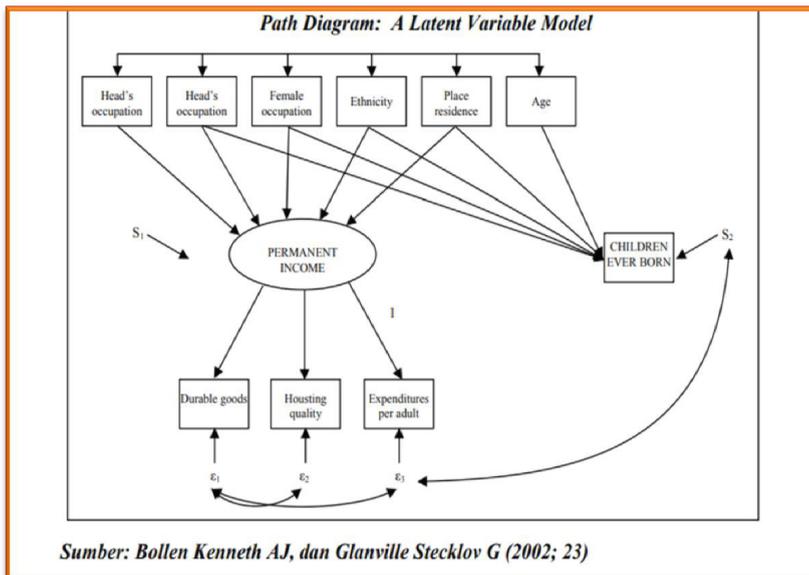
pekerjaan perempuan, tanggung jawab dalam rumahtangga serta faktor tempat tinggal (desa-kota). Artinya, analisis fertilitas suatu wilayah erat kaitannya dengan faktor langsung dan faktor tidak langsung secara kausalitas diantara faktor demografi dan faktor non demografi.

Fertilitas merupakan bagian dari sistem yang sangat kompleks dalam bidang sosial, biologi, dan interaksinya dengan faktor lingkungan. Penentuan tinggi rendahnya tingkat fertilitas seseorang dilihat dari keputusan yang diambil oleh istri atau suami-istri atau secara luas oleh keluarga. Keputusan terhadap tingkat fertilitas seseorang juga dipengaruhi oleh latar belakang dan lingkungan, misalnya pendidikan, pendapatan, pekerjaan, norma keluarga besar, umur perkawinan, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan fertilitas antar masyarakat maupun antar waktu dari suatu masyarakat baru dapat diketahui atau dipahami apabila telah memahami beragam faktor yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan fertilitas (Said Rusli: Mantra, 2000:221). Secara ekonomi, fertilitas dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, yaitu selera yang ditunjukkan dari tingkat utilitas, kualitas anak, income, dan (4) biaya, baik biaya langsung maupun *opportunity cost* (Becker, 1995; 242).

Konsepsi tentang fertilitas suatu negara bahkan seorang individu cukup bervariasi. Oleh karena itu, fungsi fertilitas atau disebut sebagai kehadiran seorang anak, sangat krusial karena menyangkut *opportunity cost* (Becker: Suandi, 2010). Terdapat asumsi bahwa kemajuan industri dan pola kehidupan modern menggoyahkan keluarga luas (*extended family*) dan nilai-nilai yang mendukung keluarga besar. Kemajuan pendidikan apalagi pendidikan wajib belajar yang dibarengi dengan pola konsumsi baru membuat biaya memelihara anak semakin tinggi.



Gambar 3.1 Model yang Dikembangkan oleh Friedman



Gambar 3.2 Hubungan Kausalitas antara Sosial Ekonomi dengan Fertilitas

Perubahan status wanita mengakibatkan bertambah banyaknya mereka bekerja di luar rumah, baik untuk menambah pendapatan maupun untuk karir mereka sendiri. Mereka ingin mengembangkan dirinya, ingin mempunyai jumlah anak yang kecil, tidak terus menerus dikungkung oleh urusan dapur dan anak-anak. Kehidupan kota menimbulkan berbagai persoalan baru, di antaranya masalah perumahan dan kebutuhan hidup yang senantiasa meningkat. Keadaan kehidupan seperti ini keluarga kecil lebih menguntungkan (*kualitas anak tinggi*). Pendidikan dan perbaikan komunikasi terus meningkat sehingga kecerdasan anggota masyarakat dan gaya hidup mengarah kepada *sekularisme*. Kepercayaan dan tradisi lama yang mendukung keluarga besar menjadi luntur, namun jalan ke arah penurunan fertilitas tidaklah begitu sederhana karena seperti disebutkan dalam buku ini bahwa fertilitas amat begitu kompleks. Demikian pula, faktor-faktor yang disebutkan di atas tidak dapat begitu saja mempengaruhi fertilitas. Industrialisasi, kemajuan pendidikan, dan sekularisasi pandangan hidup tidak mempengaruhi fertilitas secara langsung.



Sejak Sensus Penduduk tahun 1971 sampai 2010, Biro Pusat Statistik secara terus menerus memperkirakan Angka Fertilitas Total (TFR) secara nasional maupun regional dengan menggunakan metode anak kandung (*own children*). Dengan segala keterbatasan maupun keunggulan dari metode tersebut, maka TFR dapat diketahui untuk setiap provinsi. Rata-rata TFR secara nasional sebesar 5,61 pada tahun 1971, dan turun menjadi 4,68 pada tahun 1980, menjadi 2,4 pada tahun 2010, sedangkan distribusi TFR berdasarkan provinsi provinsi juga mengalami penurunan (Tabel 3.1), Pada periode 1990-2000 ada beberapa provinsi yang memiliki nilai TFR dibawah dan atau sama dengan 2,2 yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Tengah.

Namun, pada periode 2000-2010 terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk sebagian provinsi. Hal ini disebabkan terbatasnya program pembangunan yang berwawasan kependudukan terutama selama masa reformasi, baik ditingkat nasional maupun provinsi. Sementara provinsi-provinsi yang mampu bertahan (tidak mengalami peningkatan yang signifikan adalah DKI Jakarta (1.82), DI Yogyakarta (1.94), Jawa Timur (2.00), Bali (2.13), dan Jawa Tengah (2.20).

Seperti dikemukakan di atas bahwa perubahan fertilitas faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya dan di dalam struktur social ekonomi terkandung program keluarga berencana yang berkaitan dengan ukuran keluarga dan angka kematian (lihat Gambar 3.1) dan penggunaan alat kontrasepsi. Determinan yang berbeda antara provinsi satu dengan provinsi lainnya inilah yang menyebabkan bervariasinya angka kelahiran total (TFR). Perbedaan pertumbuhan TFR akan menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah dan struktur penduduk antar wilayah sehingga menyebabkan perbedaan suatu perencanaan pembangunan dan kebijakan antara provinsi satu dengan lainnya.

Tabel 3.1 Angka Fertilitas Total (TFR) menurut Provinsi Periode 1971-2010

No	Provinsi	1971	1980	1990	2000	2010
1	Nanggroe Aceh Darussalam	6.27	5.24	4.37	2.44	2.79
2	Sumatera Utara	7.20	5.94	4.29	2.84	3.01
3	Sumatera Barat	6.18	5.76	3.89	2.95	2.91
4	Riau	5.94	5.44	4.09	2.45	2.82
5	Jambi	6.39	5.57	3.76	2.37	2.51
6	Sumatera Selatan	6.33	5.59	4.22	2.33	2.56
7	Bengkulu	6.72	6.20	3.97	2.49	2.51
8	Lampung	6.36	5.75	4.05	2.42	2.45
9	Bangka Belitung	-	-	-	2.53	2.54
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	2.38
11	DKI Jakarta	5.18	3.99	2.33	1.66	1.82
12	Jawa Barat	6.34	5.07	3.47	2.28	2.43
13	Jawa Tengah	5.33	4.37	3.05	2.14	2.20
14	D I Yogyakarta	4.76	3.42	2.08	1.79	1.94
15	Jawa Timur	4.72	3.56	2.46	1.87	2.00
16	Banten	-	-	-	2.37	2.35
17	Bali	5.96	3.97	2.28	2.03	2.13
18	Nusa Tenggara Barat	6.66	6.49	4.98	2.69	2.59
19	Nusa Tenggara Timur	5.96	5.54	4.61	3.46	3.82
20	Kalimantan Barat	6.27	5.52	4.44	2.62	2.64
21	Kalimantan Tengah	6.83	5.87	4.03	2.21	2.56
22	Kalimantan Selatan	5.43	4.60	3.24	2.30	2.35
23	Kalimantan Timur	5.41	4.99	3.28	2.32	2.61
24	Sulawesi Utara	6.79	4.91	2.69	2.10	2.43
25	Sulawesi Tengah	6.53	5.90	3.85	2.81	2.94
26	Sulawesi Selatan	5.71	4.88	3.54	2.55	2.55
27	Sulawesi Tenggara	6.45	5.82	4.91	3.14	3.20
28	Gorontalo	-	-	-	2.63	2.76
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	3.33
30	Maluku	6.89	6.16	4.59	3.29	3.56
31	Maluku Utara	-	-	-	3.04	3.35
32	Papua Barat	-	-	-	-	3.18
33	Papua	7.20	5.35	4.70	2.38	2.87
	INDONESIA	5.61	4.68	3.33	2.27	2.41

Sumber: BPS, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010.



3.3 Perkembangan Mortalitas

Mortalitas merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi jumlah penduduk. Angka kematian merupakan indikator tingkat kesehatan masyarakat. Semakin kecil angka kematian sekelompok penduduk dapat menggambarkan tingkat kesehatannya. Ukuran dari mortalitas meliputi: angka kematian kasar, angka kematian menurut umur, angka kematian bayi, angka kematian baru lahir, angka kematian anak, angka kematian anak dibawah lima tahun.

Perkembangan mortalitas dilihat dari aspek kematian bayi. Angka kematian bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan status sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal orang tua (BPS, 2020). Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di bidang kesehatan.

Tingkat kematian tidak hanya dipengaruhi oleh pembangunan di sektor kesehatan. Bayi adalah makhluk sosial sehingga ia sangat rentan terhadap lingkungan, pengasuhan, dan genitas. Kematian bayi sangat erat kaitannya dengan pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Modernisasi telah memberi dampak terhadap penurunan tingkat kematian karena kemajuan telah mengubah beberapa perilaku pencegahan berbagai penyakit yang akan mempengaruhi kematian bayi. Disamping itu, dibidang medis, ditemukan beberapa cara pengobatan, penyediaan sarana kesehatan, serta perbaikan kondisi lingkungan yang lebih baik. Salah satu hasil interaksi dari ketiga unsur tersebut adalah angka kematian bayi yang akan berbeda antara provinsi satu dan yang lain karena perbedaan di sektor lain serta modernisasi antar wilayah.

Tabel 3.2 memperlihatkan kecenderungan kematian bayi selama 1971- 2010. Pada tahun 1971, seluruh provinsi memperlihatkan angka yang masih sangat tinggi yaitu mencapai di atas 110 per seribu kelahiran hidup bahkan untuk Nusa Tenggara Barat mencapai 221 per seribu kelahiran. AKB yang di bawah 110 adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 102, Kalimantan Timur 104, dan Papua 86. Pergerakan penurunan AKB terjadi setelah tahun 1971, hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilaksanakan memberikan dukungan yang lebih besar terhadap penurunan AKB.

Tabel 3.2 Angka Kematian Bayi (IMR) menurut Provinsi Periode 1971-2010

No	Provinsi	1971	1980	1990	2000	2010
1	Nanggroe Aceh Darussalam	143.00	93.00	58.00	39.71	28.00
2	Sumatera Utara	121.00	89.00	61.00	43.69	25.67
3	Sumatera Barat	152.00	121.00	74.00	52.66	29.67
4	Riau	146.00	110.00	65.00	47.68	23.00
5	Jambi	154.00	121.00	74.00	52.66	29.00
6	Sumatera Selatan	155.00	102.00	71.00	52.66	25.33
7	Bengkulu	167.00	111.00	69.00	52.66	27.67
8	Lampung	146.00	99.00	69.00	47.69	23.00
9	Bangka Belitung	-	-	-	52.66	26.67
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	20.33
11	DKI Jakarta	129.00	82.00	40.00	24.79	14.00
12	Jawa Barat	167.00	134.00	90.00	56.65	26.00
13	Jawa Tengah	144.00	99.00	65.00	43.69	21.00
14	D I Yogyakarta	102.00	62.00	42.00	24.79	15.67
15	Jawa Timur	120.00	97.00	64.00	47.69	25.00
16	Banten	-	-	-	65.62	24.33
17	Bali	130.00	92.00	51.00	35.72	20.00
18	Nusa Tenggara Barat	221.00	189.00	145.00	88.55	48.33
19	Nusa Tenggara Timur	154.00	128.00	77.00	56.65	38.67
20	Kalimantan Barat	144.00	119.00	81.00	56.65	28.33
21	Kalimantan Tengah	129.00	100.00	58.00	47.68	23.33



22	Kalimantan Selatan	165.00	123.00	91.00	69.60	34.33
23	Kalimantan Timur	104.00	100.00	58.00	39.71	21.00
24	Sulawesi Utara	114.00	93.00	63.00	27.77	25.00
25	Sulawesi Tengah	150.00	130.00	92.00	65.62	45.00
26	Sulawesi Selatan	161.00	111.00	70.00	56.65	31.00
27	Sulawesi Tenggara	167.00	116.00	77.00	52.66	39.67
28	Gorontalo	-	-	-	56.65	56.33
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	48.00
30	Maluku	-	123.00	76.00	60.63	45.00
31	Maluku Utara	-	-	-	74.59	39.67
32	Papua Barat	-	-	-	-	28.00
33	Papua	-	105.00	80.00	56.65	19.00
	INDONESIA	-	109.00	71.00	-	26.00

Sumber: BPS, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010.

Pola yang esktrim antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nusa Tenggara Barat ini tetap muncul pada hasil Sensus Penduduk 1980 dan 1990, dan namun pada tahun 2010, AKB tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo dan angka ini sesuai dengan perkiraan BPS. Penurunan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta pada 1990-2010 jauh lebih besar daripada tahun 1971-1980. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilaksanakan memberikan dukungan yang lebih besar.

Sejalan dengan angka kematian bayi yang semakin rendah, penduduk akan hidup semakin lama yang ditunjukkan Angka Harapan Hidup (AHH) (Tabel 3.3). AHH merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu (BPS, 2020).

Angka Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk. Peningkatan angka harapan hidup menunjukkan keberhasilan program pembangunan sumberdaya manusia

sehingga angka harapan hidup menjadi salah satu indikator dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perbedaan yang terjadi antar daerah pada hakikatnya merupakan cerminan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan terdapat perbedaan kecepatan, baik dalam mengadopsi, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan itu sendiri. Perbedaan tersebut juga berkaitan erat dengan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam. Kondisi inilah yang harus diperhatikan atau diperhitungkan dalam memperkirakan mortalitas pada masa mendatang.

3.4 Perkembangan Mobilitas

Mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk baik dilihat dari pergerakan secara vertikal maupun horizontal. Mobilitas penduduk vertikal adalah perubahan status, sedangkan mobilitas penduduk horizontal adalah mobilitas penduduk geografis. Mobilitas penduduk geografis merupakan gerak (*movement*) penduduk yang melintasi batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu (Mantra, 2000). Batas wilayah umumnya menggunakan batas wilayah administratif, misalnya: provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan dan pedukuhan (dusun).

Tabel 3.3 Angka Harapan Hidup menurut Provinsi, 1971-2000

No	Provinsi	1971	1980	1990	2000
1	Nanggroe Aceh Darussalam	46	55	63	66
2	Sumatera Utara	50	56	65	65
3	Sumatera Barat	45	50	60	65
4	Riau	47	52	81	66
5	Jambi	44	51	60	65
6	Sumatera Selatan	45	50	60	63
7	Bengkulu	43	53	61	65
8	Lampung	46	54	60	64
9	Bangka Belitung		-		-
10	DKI Jakarta	49	58	68	70



11	Jawa Barat	43	48	56	62
12	Jawa Tengah	47	55	61	65
13	D I Jogyakarta	55	63	67	68
14	Jawa Timur	50	55	62	65
15	Banten	-	-	-	-
16	Bali	49	56	65	68
17	Nusa Tenggara Barat	35	39	46	55
18	Nusa Tenggara Timur	45	49	59	65
19	Kalimantan Barat	46	51	58	63
20	Kalimantan Tengah	49	54	58	67
21	Kalimantan Selatan	43	50	56	60
22	Kalimantan Timur	53	54	63	67
23	Sulawesi Utara	51	55	62	65
24	Sulawesi Tengah	46	49	56	61
25	Sulawesi Selatan	44	52	60	65
26	Sulawesi Tenggara	42	52	59	63
27	Gorontalo	-	--	-	-
28	Maluku	46	50	59	64
29	Maluku Utara	-	-	-	-
30	Papua	51	53	58	61
	INDONESIA	46	53	60	64

Sumber: BPS, 1971, 1980, 1990, dan 2000.

Mantra (1978) menggunakan batas wilayah dukuh dan batas waktu enam jam atau lebih untuk mobilitas penduduk nonpermanen di Bantul, sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas wilayah provinsi dan lama waktu lebih dari 6 bulan. Naim (1979) dalam penelitian mengenai mobilitas penduduk menggunakan batas budaya Minang sebagai batas wilayah. Sampai sekarang belum ada kesepakatan tentang batas wilayah dan waktu terhadap pergerakan penduduk untuk melakukan mobilitas. Semakin sempit batasan ruang dan waktu

yang digunakan, semakin banyak gerak penduduk antara wilayah tersebut.

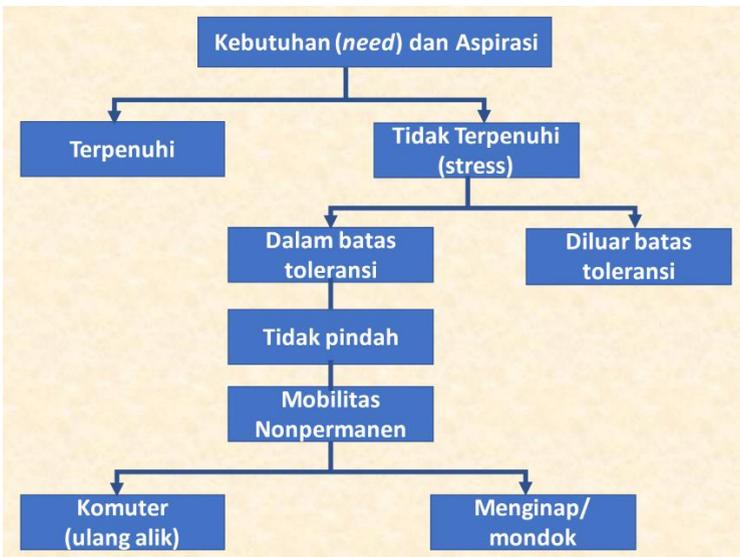
Mobilitas penduduk dapat dibagi dua, yakni: mobilitas penduduk permanen dan mobilitas penduduk nonpermanen. Mobilitas penduduk permanen atau migrasi adalah gerak penduduk yang melintas batas wilayah asal menuju ke wilayah lain dengan ada niatan menetap di daerah tujuan. Mobilitas penduduk nonpermanen adalah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan walaupun bertempat tinggal di daerah tujuan dalam jangka waktu lama.

Gerak penduduk nonpermanen dibagi menjadi dua: (a) gerak penduduk yang dilakukan secara ulang alik/*nglaju* (jawa), *communiting* (inggris) atau tidak menginap atau mondok dan kembali ke daerah asal pada hari itu juga; (b) gerak penduduk dari daerah asal menuju ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu, kemudian menginap atau mondok lebih dari satu hari dan kurang dari enam bulan.

Berdasarkan determinan mobilitas penduduk, seseorang melakukan mobilitas penduduk berdasarkan pada keputusan yang dihadapi oleh seorang penduduk. Seseorang mengambil keputusan melakukan mobilitas penduduk karena kebutuhan dan tekanan (*need and stress*) (Gambar 3.3). Kebutuhan tersebut seperti ekonomi, sosial, psikologi, dan lain sebagainya. Apabila kebutuhan tidak terpenuhi akan terjadi tekanan (*stress*). *Stress* ada batas toleransi dan tidak dapat dielakkan sehingga penduduk mengambil keputusan untuk melakukan mobilitas. Seseorang dapat mengalami tekanan (*stress*), baik ekonomi, sosial, maupun psikologi di tempat ia berada. Tiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Artinya, semakin heterogen struktur penduduk maka makin heterogen pula kebutuhannya. Terjadi perbedaan nilai kefaedahan wilayah antara tempat tinggal yang satu dengan tempat lainnya. Sebaliknya, jika tidak ada perbedaan nilai kefaedahan wilayah, tidak akan terjadi mobilitas penduduk.



Berkaitan dengan gerak penduduk, terdapat pola seseorang melakukan mobilitas. yaitu: (a) para migran cenderung memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan; (b) faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk pindah karena keterbatasan pekerjaan; (c) aliran remitan mempengaruhi migrasi berantai; (d) dampak pembangunan mempengaruhi pergerakan penduduk; (e) tingkat kesejahteraan penduduk; (f) tempat tinggal di daerah tujuan diutamakan tempat saudara atau keluarga; (g) pola migrasi individu atau kelompok tidak dapat diperkirakan karena ketidakajegan; (h) status umur dan perkawinan merupakan faktor penting mobilitas penduduk, dan (i) tingkat pendidikan berpengaruh terhadap frekuensi pergerakan.

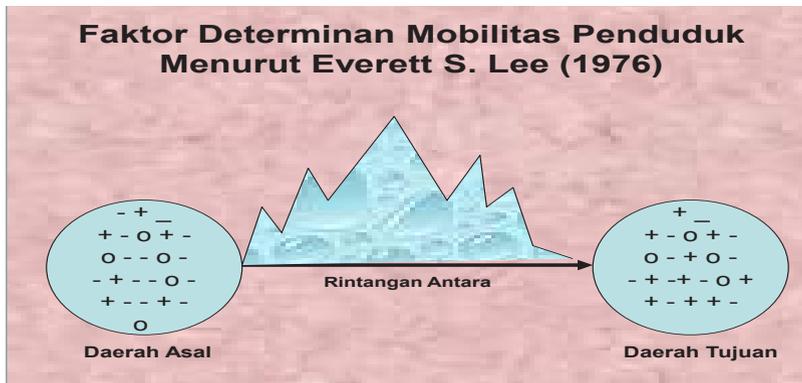


Gambar 3.3 Mobilitas Penduduk Berdasarkan Kebutuhan

Everett S. Lee (1976) dalam buku berjudul *A Theory of Migration* mengungkapkan bahwa volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keanekaragaman daerah-daerah di wilayah tersebut yang dapat dilihat pada Gambar 3.4. Di daerah asal dan tujuan ada faktor positif (+), negatif (-), dan faktor netral (0). Faktor positif terdiri dari fasilitas sekolah, bekerja, atau iklim

yang baik. Faktor negatif terdiri dari merugikan bagi penduduk (kriminal, terbatas lapangan kerja, sekolah, dan lain sebagainya). Perbedaan nilai kumulatif antara kedua tempat tersebut cenderung menimbulkan arus migrasi penduduk. Menurut Lee, ada empat faktor terjadinya proses migrasi diantaranya adalah faktor individu, faktor daerah asal, faktor daerah tujuan, dan rintangan antara.

Berdasarkan determinan yang dibuat oleh Lee, maka Robert Norris (1972) menambahkan tiga komponen, yaitu migrasi kembali, kesempatan antara, dan migrasi paksaan (*force migration*) yang dapat dilihat pada Gambar 3.5. Robert Norris menekankan bahwa daerah asal merupakan faktor penting. Artinya, bagaimanapun keberhasilan migran di daerah tujuan ia tetap memperhatikan daerah asalnya baik secara langsung maupun tidak, misalnya memberikan kiriman (*remittance*) dalam bentuk fisik (uang dan barang) maupun non fisik (informasi atau komunikasi).



Gambar 3.4 Faktor Determinan Mobilitas Penduduk



Gambar 3.5. Model Mobilitas Penduduk Menurut Norris

Sehubungan dengan itu, hubungan migran dengan daerah asal terlihat dari materi informasi yang mengalir (Mabogunje, 1970). Jenis informasi bersifat positif dan negatif. Informasi positif biasanya datang dari migran yang berhasil, sehingga memberikan stimulus kepada penduduk lain untuk pindah lebih kuat. Menurut Mitchel (Mantra, 2000), seorang ahli sosiologi dari Inggris mengatakan bahwa seseorang melakukan mobilitas karena ada faktor kekuatan (*force*) dan faktor pendorong. Faktor kekuatan orang menetap di daerah asal karena ada faktor kekuatan sentripetal (*centripetal forces*) sedangkan faktor pendorong disebut kekuatan sentrifugal (*centrifugal forces*).

Lebih lanjut, ada beberapa faktor penting yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan mobilitas, yaitu: umur dan tingkat pendidikan. Hasil penelitian Suandi (2012) mendapatkan bahwa rata-rata umur migrasi risen tergolong pada kelompok umur relatif muda. Sedangkan tingkat pendidikan merupakan salah satu tolok ukur yang sering digunakan sebagai tolok ukur seseorang untuk melakukan mobilitas, terutama yang melakukan mobilitas permanen dengan jarak yang cukup jauh. Menurut Walker (Suandi, 2010), pendidikan merupakan proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap

seseorang yang dilaksanakan secara terencana sehingga diperoleh perubahan-perubahan dalam meningkatkan taraf hidup.

Menurut Lee, Todaro, dan Titus, motif seseorang untuk melakukan pergerakan atau migrasi adalah motif ekonomi dan merupakan unsur paling dominan baik itu migrasi domestik maupun migrasi internasional. Umumnya perilaku mobilitas tersebut terjadi antara penduduk desa ke kota atau perpindahan penduduk dari kota ke desa. Kecenderungan perilaku mobilitas tersebut diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara pembangunan desa dan kota. Karena itu, perkembangan pusat-pusat aktivitas baik sektor formal dan informal di suatu daerah menarik mobilitas penduduk ke wilayah tersebut. Artinya, semakin intensif pelaksanaan pembangunan suatu daerah, laju pertumbuhan penduduk di wilayah itu semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan.

Tak kalah menarik berbicara tentang migrasi risen, migrasi ini menggambarkan mereka yang pernah pindah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Migrasi risen ini menunjukkan pergerakan penduduk yang lebih cepat. Migrasi risen masuk (Tabel 3.4) dan migrasi risen keluar (Tabel 3.5), dimana jumlah migrasi risen masuk dan keluar dari setiap provinsi berbeda. Mengutip data BPS, pada tahun 2010, migrasi risen masuk ke Jambi: 110.114 orang dan migrasi keluar Jambi 52.689 orang, dengan demikian migrasi neto Jambi adalah + 57.425 orang. Pada tahun yang sama migrasi risen masuk ke Sumatera Selatan 117.396 orang dan migrasi keluar Sumatera Selatan 129.814 orang, yang berarti migrasi neto -129.814 orang.

Tabel 3.4 Migrasi Risen (Migrasi Masuk) di Indonesia Menurut Provinsi 1980-2010

No	Provinsi	1980	1990	2000	2010
1	Nanggroe Aceh Darussalam	51 208	56 326	15 369	63 987
2	Sumatera Utara	95 586	107 882	139 887	123 962
3	Sumatera Barat	93 117	129 049	109 016	130 180
4	Riau	98 652	245 465	358 815	294 957



5	Jambi	107 273	136 397	109 534	110 114
6	Sumatera Selatan	221 165	212 196	163 250	117 396
7	Bengkulu	66 902	82 831	68 832	47 827
8	Lampung	507 803	212 298	149 013	92 439
9	Bangka Belitung	2)	2)	36 536	60 808
10	Kepulauan Riau	3)	3)	206 664	210 056
11	DKI Jakarta	766 363	833 029	702 202	643 959
12	Jawa Barat	551 960	1 350 596	1 097 021	1 048 964
13	Jawa Tengah	183 761	384 753	354 204	301 417
14	D I Yogyakarta	98 856	161 740	196 586	227 364
15	Jawa Timur	203 175	328 607	185 966	243 061
16	Banten	4)	4)	620 299	465 080
17	Bali	37 254	65 967	87 225	102 425
18	Nusa Tenggara Barat	26 221	37 401	59 964	47 648
19	Nusa Tenggara Timur	25 976	27 107	69 910	49 339
20	Kalimantan Barat	39 380	43 809	49 202	42 650
21	Kalimantan Tengah	766 363	78 791	124 387	122 969
22	Kalimantan Selatan	61 704	98 330	89 320	103 455
23	Kalimantan Timur	112 620	194 531	155 498	213 558
24	Sulawesi Utara	45 498	34 736	54 504	48 042
25	Sulawesi Tengah	83 595	70 034	75 328	61 961
26	Sulawesi Selatan	65 208	119 455	80 648	120 638
27	Sulawesi Tenggara	51 014	71 143	110 289	64 097
28	Gorontalo	5)	5)	9 257	26 695
29	Sulawesi Barat	6)	6)	33 739	37 206
30	Maluku	46 904	68 701	18 657	29 236
31	Maluku Utara	7)	7)	14 764	24 462
32	Papua	33 420	73 776	49 736	66 562
33	Papua Barat	8)	8)	25 890	53 905

Sumber: BPS, 1980, 1990, 2000 2010

Tabel 3.5. Migrasi Risen (migrasi keluar) di Indonesia Menurut Provinsi 1980-2010

No	Provinsi	1980	1990	2000	2010
1	Nanggroe Aceh Darussalam	28 248	49 389	161 581	38 802
2	Sumatera Utara	177 289	277 647	358 521	372 644
3	Sumatera Barat	153 239	173 220	233 945	150 709
4	Riau	53 757	92 903	88 708	125 814
5	Jambi	36 178	64 033	83 346	52 689
6	Sumatera Selatan	132 011	198 841	151 956	129 814
7	Bengkulu	15 899	28 595	35 831	26 910
8	Lampung	45 594	135 907	149 258	154 420
9	Bangka Belitung	²⁾	²⁾	33 773	17 054
10	Kepulauan Riau	³⁾	³⁾	41 340	54 847
11	DKI Jakarta	382 326	993 377	850 343	883 423
12	Jawa Barat	468 441	495 727	631 753	595 877
13	Jawa Tengah	908 302	1 159 694	1 017 494	979 860
14	D I Yogyakarta	72 933	120 777	129 530	103 492
15	Jawa Timur	570 555	647 348	529 037	528 370
16	Banten	⁴⁾	⁴⁾	207 358	192 983
17	Bali	52 404	56 127	47 353	41 216
18	Nusa Tenggara Barat	38 987	36 853	50 714	40 982
19	Nusa Tenggara Timur	34 713	45 620	54 989	67 484
20	Kalimantan Barat	28 431	44 686	45 682	42 144
21	Kalimantan Tengah	15 989	37 015	24 903	34 506
22	Kalimantan Selatan	46 061	76 447	62 612	55 292
23	Kalimantan Timur	20 334	68 192	42 817	73 039
24	Sulawesi Utara	38 259	51 272	38 830	45 473
25	Sulawesi Tengah	17 282	28 038	30 555	39 174
26	Sulawesi Selatan	147 855	161 050	185 215	208 570
27	Sulawesi Tenggara	29 575	36 681	22 251	42 613
28	Gorontalo	⁵⁾	⁵⁾	33 448	16 820
29	Sulawesi Barat	⁶⁾	⁶⁾	19 078	20 053
30	Maluku	26 995	38 899	92 781	30 179
31	Maluku Utara	⁷⁾	⁷⁾	28 480	14 887
32	Papua	16 191	31 631	24 329	38 803
33	Papua Barat	⁸⁾	⁸⁾	17 623	16 835

Sumber: BPS, 1980, 1990, 2000 2010



Tingginya angka migrasi masuk dari kedua provinsi ini karena Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan merupakan wilayah sasaran program transmigrasi oleh pemerintah Indonesia namun rasio migrasi keluarga Sumatera Selatan lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Jambi, hal ini disebabkan oleh banyak factor diantaranya, faktor kesempatan kerja dan faktor pendidikan diluar Provinsi Sumatera Selatan. Secara umum dapat dikatakan bahwa migrasi neto yang negative banyak terjadi pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, Jika tahun 1980 hanya Sumatera Barat dan Sumatera Utara, maka tahun 1995 bertambah lagi dengan tiga provinsi sehingga menjadi lima propinsi, yaitu Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Teori lain yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor pendorong seseorang untuk melakukan migrasi yaitu teori modal manusia (*human capital*). Dalam meningkatkan modal manusia diperlukan investasi sumber daya manusia (investasi di bidang pendidikan) dan diharapkan tingkat pengembalian (aliran penghasilan) yang diterima akan lebih besar dari investasi yang dilakukan. Jika *present value* dari peningkatan pendapatan yang diharapkan melebihi biaya yang diinvestasikan, maka seseorang akan memilih untuk migrasi. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, maka orang tersebut akan menyimpulkan bahwa tidak ada manfaatnya untuk melakukan migrasi, meskipun pendapatan potensial pada daerah tujuan lebih tinggi daripada pendapatan di daerah mereka tinggal saat ini.

3.5 Penutup

Jumlah penduduk Indonesia menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun namun pada fase awal tahun 2000 peningkatannya mengalami penurunan akibat keberhasilan Program Keluarga Berencana, dan peningkatan kualitas hidup manusia. Angka TFR Indonesia mengalami penurunan dari 5,61 pada tahun 1971, menjadi 4,68 pada tahun 1980, dan mencapai 2.4 pada tahun 2010, suatu penurunan yang signifikan.

Angka kematian bayi (IMR) yang tergolong tinggi pada tahun 1971 dengan rata-rata 110 – 221 per seribu kelahiran, turun drastic menjadi 26 per seribu kelahiran pada tahun 1990. Sejalan dengan angka kematian bayi yang semakin rendah, penduduk akan hidup semakin lama yang ditunjukkan Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 64 tahun pada tahun 2000 dan 71 tahun pada tahun 2020.

Dimensi lain terhadap perkembangan penduduk adalah faktor migrasi. Hasil evaluasi diperoleh bahwa jumlah migrasi risen masuk dan keluar dari setiap provinsi berbeda. Seperti pada tahun 2010, migrasi risen masuk ke Jambi sebesar 110.114 orang dan migrasi keluar Jambi 52.689 orang. Pada tahun yang sama migrasi risen masuk ke Sumatera Selatan 117.396 orang dan migrasi keluar Sumatera Selatan 129.814 orang.

Daftar Pustaka

- Anonim, 1971-2000. Angka Harapan Hidup menurut Provinsi Periode 1971-2000. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Anonim, 1971-2010. Angka Fertilitas Total (TFR) menurut Provinsi Periode 1971-2010. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- _____, 1971-2010. Angka Kematian Bayi (IMR) menurut Provinsi Periode 1971-2010. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- _____, 1971-2010. Angka Fertilitas Total (TFR) menurut Provinsi Periode 1971-2010. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Anonim, 2080-2010. Migrasi Risen (Migrasi Masukdan Migrasi keluar) di Indonesia Menurut Provinsi Periode 1980-2010. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Anonim, 2008. Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2005-2025. Kerjasama BPS, Bappenas dan UNFPA Indonesia.
- _____, 2020a. Angka Kematian Bayi (IMR) menurut Provinsi tahun 2020. Badan Pusat Statistik Indonesia.



- _____, 2020b. Angka Harapan Hidup (AHH) menurut Provinsi tahun 2020. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Becker, 1995. *An Economic Analysis of Fertility*. Dalam *The Essence of B.E.C.K.E.R.* Ramon Febrero dan Pedro S. Schwartz. Hoover Institution Press. Stanford University, Stanford, California.
- Bollen Kenneth A; Jennifer L. Glanville; dan Guy Stecklov, 2002. *Socioeconomic Status, Permanent Income, and Fertility: A Latent Variable Approach*. Carolina Population Center, University of North Carolina. At Chapel Hill.
- Davis, Kingsley dan Judith Blake. 1956. *Sosial Structure and Fertility: an Analytical Framework*. *Economic Development and Cultural Change*. Vol.4. No. 3.
- David Lucas, Peter McDonald, Elspeth Young, Christabel Young, 1990. *Pengantar Kependudukan*. Gadjah Mada University Press. Pusat penelitian dan Studi Kependudukan UGM. Yogyakarta.
- Freedman, Ronald. 1979. *Theories of Fertility Decline: "a reappraisal"*. *Social Force*.
- Lee, Everett. 1976. *A Theory of Migration*. in Demko, George J., Harold M. Rose and George A. Snheel. *Population Geography: A Reader*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Mabogunje, AL, 1970. *System Approach to A Theory of Rural-Urban Migration*. *Geographical Analysis*, Ohion State University Press.
- Mantra, Ida Bagoes, 1978. *Mobilitas Penduduk pada Masyarakat Padi Sawah : Kasus Dukuh Kadirejo dan Piring*, Prima ke VIII No. 9. Jakarta: LP3ES.
- Mantra, Ida Bagus. 2000. *Dasar-dasar Demografi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Naim, Mochtar, 1979. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Robert Norris, E. 1972. *Migration as Spatial Interaction*. *Journal of Geography*, 71(5).
- Suandi, 2010. *Status Sosial Ekonomi dan Fertilitas: A Latent Variable Approach*.



- PIRAMIDA: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Bali: Pusat Penelitian Kependudukan dan PSDM Universitas Udayana, Bali. Vol. VI, No.1, page: 1-8.
- Suandi. 2012. Hubungan Sosio Demografi dengan Mobilitas Penduduk di Provinsi Jambi (*Analisis Data SP-2010*) (Laporan Penelitian). Jambi: Kerjasama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Jambi
- Todaro, P. Michael, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- United Nation, 2001. *World Population Prospects: The 2000 Revision*. Two Volumes. New York: United Nation.

BAB

4

ANGKATAN KERJA DAN KEMISKINAN

Yunisvita

4.1 Pendahuluan

Jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita suatu negara yang mencerminkan tingkat kemajuan perekonomian negara tersebut. Di satu sisi hal ini bermakna bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan faktor menguntungkan atau sebaliknya jumlah penduduk yang sedikit mempercepat proses pembangunan ekonomi. Ada pula pandangan yang menyatakan bahwa jumlah penduduk harus seimbang dengan sumber-sumber ekonomi jika ingin meningkatkan pendapatan negara. Penggunaan sumber daya manusia secara tepat untuk pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan pengendalian atas jumlah penduduk dan harus ada perubahan pandangan terhadap tenaga kerja mengenai arti penting dan martabatnya (Todaro, 2012).

Konsekuensi awal dari jumlah penduduk baik dalam jumlah besar maupun kecil adalah mempengaruhi jumlah Angkatan Kerja yang merupakan sumber penawaran tenaga kerja. Sebagai bagian dari jumlah penduduk, maka Angkatan Kerja yang berperan dalam proses pembangunan ekonomi untuk menghasilkan pendapatan negara, tidak terlepas kaitannya dengan kondisi

ketika pendapatan negara yang diperoleh terkategori rendah. Indikator yang paling penting adalah meluasnya kemiskinan. Hal ini dicerminkan dari standar kehidupan yang rendah berupa ketidakmampuan mendapatkan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian dapat diduga terdapat pengaruh antara Angkatan Kerja terhadap kemiskinan yang terjadi.

4.2 Angkatan Kerja

4.2.1 Pengertian dan Konsep

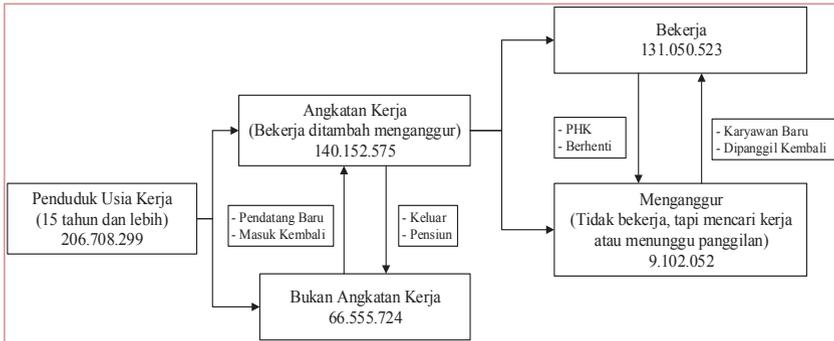
Berdasarkan toksonomi kependudukan, maka penduduk di bagi dalam dua kategori, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Batasan usia kerja adalah penduduk berusia 15 tahun dan lebih (BPS, 2021). Dari kategori penduduk usia kerja dirinci lagi menjadi Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produksi. Besar kecilnya Angkatan Kerja ditentukan oleh jumlah orang yang bekerja dan jumlah orang yang menganggur. Dengan kata lain Angkatan Kerja terdiri dari: (a) bekerja dan (b) menganggur.

Seseorang disebut bekerja jika ia melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh bayaran setidaknya 1 jam (tidak terputus) atau pekerjaan tidak dibayar yang membantu dalam suatu kegiatan ekonomi. Untuk disebut menganggur adalah jika seseorang diberhentikan sementara dari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan tetapi secara aktif mencari pekerjaan. Menganggur dibedakan: (a) mencari pekerjaan, tetapi sudah pernah bekerja sebelumnya dan (b) mencari pekerjaan untuk pertama kalinya.

Gambar 4.1 menunjukkan aliran penduduk usia kerja di Indonesia pada tahun 2021. Jumlah penduduk Indonesia yang termasuk kategori Angkatan Kerja sebanyak 140 juta orang atau 67,80 persen dari seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka ini merupakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).



TPAK adalah persentase dari penduduk 15 tahun ke atas baik yang memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan dibagi penduduk 15 tahun ke atas.



Gambar 4.1. Status Angkatan Kerja Dari Penduduk 15+ di Indonesia

Sumber: BPS, 2021

Jumlah dan identitas seseorang dalam toksonomi penduduk selalu berubah: (a) Pekerja yang bekerja dapat menjadi menganggur baik secara sukarela dengan cara berhenti atau Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK; (b) Mereka yang menganggur memperoleh pekerjaan dengan menjadi karyawan baru atau dipanggil kembali ke pekerjaan dimana mereka dahulunya diberhentikan sementara; (c) Mereka yang berada dalam Angkatan Kerja dapat meninggalkan Angkatan Kerja dengan cara pensiun atau memutuskan untuk tidak mengambil atau mencari pekerjaan, (d) Mereka yang tidak pernah bekerja akan mencari pekerjaan, termasuk yang putus sekolah. Kini status mereka adalah Angkatan Kerja.

Tabel 4.1 memperlihatkan TPAK berdasarkan gender tahun 1980 – 2020. Dalam tiga dekade awal. TPAK laki-laki meningkat (1980-200) dan pada dua dekade berikutnya telah menurun walau tidak nyata. Sedangkan TPAK perempuan meningkat secara dramatis hampir dua kali lipat dari tahun 1980 hingga 2020. Mungkin, perubahan paling revolusioner yang terjadi di pasar tenaga kerja saat ini adalah peningkatan luar biasa dalam proporsi

perempuan, khususnya perempuan yang sudah menikah, yang bekerja di luar rumah.

Tabel 4.1. TPAK Berdasarkan Gender Tahun 1980 – 2020

Tahun	Laki-Laki	Perempuan
1980	68,42	32,65
1990	70,92	44,04
2000	84,17	51,69
2010	83,33	52,50
2020	82,27	53,34

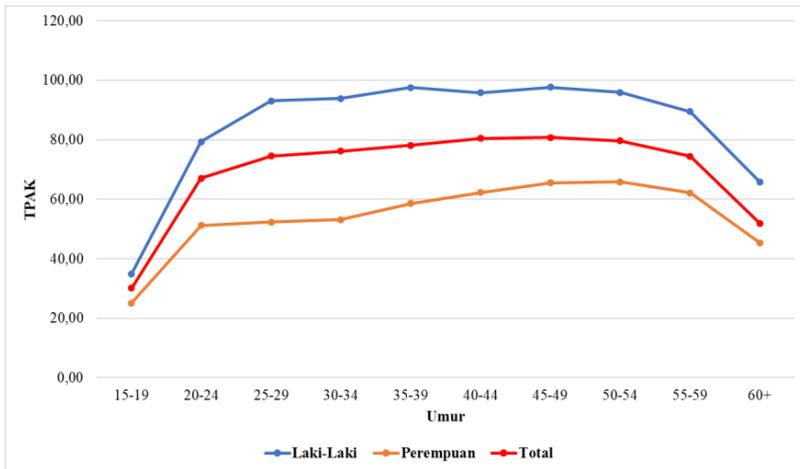
Sumber: BPS, berbagai tahun

Dengan meningkatnya kecenderungan perempuan untuk mencari pekerjaan di luar rumah akan berdampak pada perubahan pendapatan keluarga. Determinan penting yang mempengaruhi perempuan akan memasuki pasar kerja adalah tingkat upah yang berlaku di pasar dan adanya perubahan (kemajuan) teknologi yang mengakibatkan terjadi penghematan waktu dalam kegiatan produksi rumah tangga. Kenaikan upah akan mendorong seseorang untuk mengganti waktu menjauhi kegiatan produksi rumah tangga menuju pekerjaan pasar. Kemajuan teknologi ini akan mengurangi kesenjangan dalam produktivitas rumah tangga diantara pasangan, mengurangi kebutuhan akan spesialisasi dan selanjutnya berkontribusi pada peningkatan TPAK perempuan. Pola TPAK menurut umur antara laki-laki dan perempuan memiliki bentuk yang sama, seperti huruf U terbalik, ditunjukkan pada Gambar 4.2.

Pada kelompok umur paling muda TPAK laki-laki dan perempuan berada di angka yang tidak berbeda jauh. TPAK laki-laki mencapai puncaknya ketika laki-laki berumur antara 25 dan 49 tahun dan selanjutnya mulai menurun setelah umur 49 tahun. Sebaliknya TPAK perempuan tidak mencapai puncak hingga perempuan berumur sekitar 50 tahun. Kemungkinan hal ini karena dampak aktivitas membesarkan anak terhadap keputusan partisipasi.



Umumnya di negara berkembang seperti Indonesia, pola siklus ketenagakerjaan perempuan menyerupai kurva M. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak perempuan meninggalkan pasar kerja ketika mereka menikah dan mengurus anak. Mereka akan cenderung kembali ke pasar kerja atau dalam kegiatan ekonomi ketika anak-anak mereka sudah besar. Pada Gambar 4.2 pola tersebut tidak tampak secara nyata.



Gambar 4.2 Pola TPAK Sepanjang Hidup, 2020

Sumber : BPS, 2020

Secara teoritis bahwa TPAK akan paling tinggi ketika upah tinggi yaitu ketika pekerja berumur tiga puluhan dan empat puluhan. Setelah umur 55 tahun penurunan upah biasanya sejalan dengan pekerja mendekati usia pensiun. Penurunan TPAK yang cepat pada umur yang lebih tua mungkin terkait dengan kesehatan dan juga mungkin disebabkan oleh efek disinsentif kerja dari berbagai program asuransi pensiun dan disabilitas (Borjas, 2016).

4.2.2 Angkatan Kerja Berdasarkan Kelompok Umur

Umur sangat mempengaruhi penduduk yang akan masuk ke pasar kerja atau tidak. Pada umumnya kelompok usia muda (15-19 tahun) cenderung memilih sekolah daripada bekerja atau mencari kerja. Begitu pula pada kelompok usia tua (60 tahun ke

atas) penduduk kebanyakan meninggalkan pasar kerja karena telah memasuki masa pensiun atau telah berhenti bekerja.

Tabel 4.2 menunjukkan fenomena bahwa tigaperempat dari jumlah Angkatan Kerja umur 15-19 tahun telah masuk ke pasar kerja. Suatu fakta yang bertolak belakang dengan asumsi. Hal ini kemungkinan karena di Indonesia masih sangat banyak ditemui adanya pekerja anak. Sziraczki dan Reerink (2004) menyatakan bahwa banyak penduduk pada usia terlalu muda memasuki pasar kerja dan mereka tidak dipersiapkan untuk menghadapi masa transisi dari sekolah ke bekerja.

Di sisi lain kelompok umur muda yang menganggur sebanyak hampir seperempat dari Angkatan Kerja menyiratkan terdapatnya angka putus sekolah yang cukup tinggi setidaknya di level pendidikan menengah atas. Mayoritas penduduk usia muda di Indonesia tidak dimanfaatkan dengan baik karena mereka tidak mempunyai akses terhadap pekerjaan yang produktif. Produktivitas penduduk usia muda yang belum maksimal memunculkan masalah pengangguran ini yang diawali dengan permasalahan kurangnya pengalaman yang menyebabkan tidak cocoknya tingkat pekerjaan yang diinginkan dengan pekerjaan yang sesuai berdasarkan pengalaman yang dimiliki.

Tabel 4.2. Komposisi Angkatan Kerja Berdasarkan Umur Tahun 2021

Umur	Angkatan Kerja (orang)	Bekerja (orang)	Bekerja terhadap Angkatan Kerja (%)	Menganggur terhadap Angkatan Kerja (%)
15-19	6.146.156	4.676.610	3,34	1,05
20-24	14.653.326	12.055.291	8,60	1,85
25-29	16.380.786	14.863.925	10,61	1,08
30-34	16.462.541	15.568.625	11,11	0,64
35-39	16.624.124	15.955.834	11,38	0,48
40-44	16.182.083	15.628.656	11,15	0,39
45-49	15.127.166	14.627.970	10,44	0,36
50-54	13.060.578	12.775.857	9,12	0,20
55-59	10.151.384	9.950.387	7,10	0,14
60-64	15.364.431	14.944.982	10,66	0,30

Sumber: BPS, 2021



Sementara itu cukup tingginya persentase penduduk umur 60 tahun ke atas (lansia) yang masih berada di dalam pasar kerja menunjukkan kemungkinan disebabkan jenis pekerjaan yang ditekuni bersifat informal yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dihari tua dan dilihat dari status perkawinannya lansia ini memiliki status kawin, sehingga salah satu alasan mereka bekerja adalah untuk menghidupi keluarganya (Andini dkk, 2013).

4.2.3 Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis kelamin

Tabel 4.3 menunjukkan komposisi Angkatan Kerja yang dibedakan menurut jenis kelamin pada tahun 2020 dan 2021. Statistik ini menyuguhkan dua hasil penting. Tidak terdapat perbedaan substansial Angkatan Kerja yang bekerja laki-laki dengan perempuan.

Tidak adanya perbedaan ini menginformasikan bahwa baik Angkatan Kerja laki-laki dan perempuan untuk bekerja tidak terpengaruh perbedaan variabel ekonomi dan faktor kultural sebagaimana kerangka keputusan penawaran tenaga kerja dibuat. Walaupun tidak ada perbedaan substansial pada persentase Angkatan Kerja yang bekerja maupun menganggur, data tersebut juga mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami trend umum yaitu meningkatnya perempuan bekerja yang termasuk Angkatan Kerja.

Tabel 4.3. Komposisi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Status Angkatan Kerja	2020	2021
Laki-laki	Bekerja (%)	92,54	93,89
	Menganggur (%)	7,46	6,74
Perempuan	Bekerja (%)	93,54	93,89
	Menganggur (%)	6,46	6,11

Sumber: BPS, 2021

4.2.4 Angkatan Kerja Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal

Pola pada komposisi Angkatan Kerja menurut jenis kelamin laki-laki ditemui juga pada komposisi Angkatan Kerja menurut

daerah tempat tinggal. Persentase Angkatan Kerja yang berstatus bekerja di perkotaan dan perdesaan menunjukkan peningkatan dalam dua tahun tersebut, walaupun tidak signifikan. Di perdesaan terjadi hal yang sebaliknya dimana Angkatan Kerja berstatus menganggur meningkat, namun angkanya tidak signifikan (Tabel 4.4). Ketahanan perdesaan selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 salah satunya ditunjang dengan adanya dana desa yang menjadi penopang utama APBDes. Tingginya APBDes berdampak pada beberapa sektor esensial. Adanya proyek-proyek di level desa membuat pengangguran menjadi terkendali.

Hasil kajian Briones (2019) mengungkapkan bahwa di negara Asia dan Pasifik, partisipasi Angkatan Kerja lebih tinggi di perdesaan. Data Sakernas Agusutus 2021 menunjukkan bahwa penduduk perdesaan bekerja sebagai tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan; penduduk perkotaan sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar, walaupun secara agregat, serapan tenaga kerja pada sektor pertanian menunjukkan perkembangan yang menurun.

Tabel 4.4. Komposisi Angkatan Kerja Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal

Daerah Tempat Tinggal	Status Angkatan Kerja	2020	2021
Perkotaan	Bekerja (%)	50,27	51.31
	Menganggur (%)	4,95	4,65
Perdesaan	Bekerja (%)	42,89	42,19
	Menganggur (%)	1,87	1,83

Sumber: BPS, 2021

4.2.5 Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.5 memberikan gambaran Angkatan Kerja masih didominasi oleh orang yang bekerja dengan pendidikan rendah dan yang terbanyak berpendidikan SD. Hal ini tidak terlepas dari sector usaha informal yang dipenuhi oleh pekerja dengan pendidikan dasar. Suatu fakta ironi dari wajah pasar kerja di Indonesia, karena bagian Angkatan Kerja berpendidikan menengah ke atas (terbanyak yang berpendidikan SMA) dengan status menganggur



meliputi hampir dua kali lipat lebih banyak dari pengangguran yang berpendidikan dasar.

Tabel 4.5. Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Angkatan Kerja (orang)	Bekerja (orang)	Bekerja/ AK (%)	Menganggur/ AK (%)
Belum Pernah Sekolah	1.468.622	1.444.683	1,05	0,02
Belum Tamat SD	15.490.762	15.060.119	11,05	0,31
SD	34.277.535	32.882.439	24,46	1,00
SMP	24.880.607	23.275.808	17,75	1,15
SMA	27.196.395	24.724.243	19,40	1,76
SMK	18.970.093	16.858.722	13,54	1,51
Diploma	3.679.403	3.463.422	2,63	0,15
Universitas	14.189.158	13.340.646	10,12	0,61

Sumber: BPS, 2021

4.2.6 Angkatan Kerja Sebagai Faktor Produksi

Proses produksi mensyaratkan adanya faktor produksi sebagai input dalam proses produksi tersebut, salah satunya adalah Angkatan Kerja yang bekerja, selanjutnya disebut tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai input dalam proses produksi mengambil peran penting sebagai determinan output. Pertumbuhan tenaga kerja akan berdampak terhadap pertumbuhan output, pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, tenaga kerja merupakan bagian dari jumlah penduduk. Argumentasi konvensional memandang pertumbuhan penduduk sebagai unsur penting untuk mendorong pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang lebih banyak akan menyediakan permintaan konsumen yang dibutuhkan untuk menghasilkan skala ekonomi produksi yang menguntungkan, menurunkan biaya produksi dan menyediakan jumlah tenaga kerja yang cukup sehingga menghasilkan tingkat output yang lebih tinggi

Argumentasi lain berpandangan bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat akan menimbulkan konsekuensi

negative terhadap perekonomian sehingga harus benar-benar diperhatikan. Jika tidak, maka akan terjadi hal yang saling menguatkan antara pertumbuhan penduduk dan kemiskinan.

4.3 Kemiskinan

4.3.1 Pengertian dan Konsep

Kemiskinan pada dasarnya adalah ketidakmampuan untuk memenuhi suatu standar hidup tertentu. Secara konseptual, kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Indikator yang digunakan dalam menentukan standar penilaian kemiskinan relatif sifatnya lebih subjektif daripada standar penilaian kemiskinan absolut.

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merujuk pada situasi ketidakmampuan atau kemampuan yang sangat minim dalam memenuhi kebutuhan pokok subsisten berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan pelayanan kesehatan dasar. Parameternya adalah pengeluaran (belanja) per kapita per bulan untuk makanan dan non makanan. Parameter ini disebut garis kemiskinan.

Penduduk dikatakan miskin, jika pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. BPS telah membangun garis kemiskinan berdasarkan apa yang dianggap sebagai kebutuhan dasar minimum individu. Garis kemiskinan makanan adalah pengeluaran diperlukan untuk mendapatkan 2.100 kilo kalori per kapita perhari, tersebar di 52 jenis makanan. Garis kemiskinan non makanan terutama meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Ukuran kemiskinan absolut ini konsisten antar negara dan antar waktu sehingga telah menjadi ukuran kemiskinan ekstrim. Bank Dunia mengkonversi garis kemiskinan dengan menggunakan *Purchasing Power Parity* (PPP) atau paritas daya beli yakni 1.9 dollar PPP. Miskin ekstrim didefinisikan sebagai suatu kondisi kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan yaitu setara dengan USD 1,9 PPP. PPP menunjukkan banyaknya rupiah



yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dengan jumlah yang sama dengan harga satu dollar.

2. Kemiskinan Relatif

Berbeda dengan garis kemiskinan absolut yang bergantung pada nominal yang diperlukan untuk memenuhi biaya hidup, garis kemiskinan relatif bergantung pada kesepakatan masyarakat mengenai kelompok masyarakat termiskin. Jika kesepakatan tercapai, garis kemiskinan bisa ditetapkan. Misalnya, 20 persen kelompok masyarakat terbawah yang diurutkan berdasarkan pendapatan atau pengeluaran. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar daerah dan antar waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama. Namun untuk menentukan sasaran program yang ditujukan untuk penduduk miskin, ukuran kemiskinan relatif bisa digunakan. Indikator untuk menentukan kemiskinan relatif biasanya mencantumkan dua informasi, yakni informasi kuantitatif yang mencerminkan distribusi dan informasi distribusi itu sendiri. Contohnya, 60 persen dari nilai tengah pendapatan masyarakat dan 20 persen atau 40 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terbawah.

4.3.2 Kemiskinan Sebagai Indikator Sosial Penting di Negara Berkembang

Model pertumbuhan neoklasik menyatakan bahwa tingkat persediaan modal bergantung pada tingkat pertumbuhan tenaga kerja. Pada kenyataannya hubungan tersebut mungkin terbalik, karena dampak berkurangnya tabungan tersirat dari tingginya beban ketergantungan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) yang cepat. Dampak ekonomi yang negatif dari pertumbuhan penduduk dapat menjadi lebih besar daripada yang diperkirakan.

Jika pendapatan keluarga miskin rendah maka keluarga miskin tersebut ingin memiliki anak lebih banyak sebagai sumber tenaga kerja murah dan jaminan masa tua. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan penduduk tinggi dan akhirnya

memunculkan kemiskinan yang semakin parah. Keluarga besar meringankan beban kemiskinan, tetapi keluarga berukuran besar menyebabkan beban ketergantungan lebih besar. Akibatnya, tabungan semakin menyusut, investasi berkurang, pertumbuhan ekonomi bergerak lamban dan akhirnya kemiskinan semakin parah (Todaro, 2012). Jumlah penduduk miskin ekstrem dihitung menggunakan garis kemiskinan setara \$1,9 PPP (World Bank). Sementara jumlah penduduk miskin dihitung menggunakan garis kemiskinan setara \$2,5 PPP (BPS, 2021).

Di Indonesia, kemiskinan banyak terjadi di Indonesia berada di perdesaan, baik miskin maupun miskin ekstrim, yaitu masing-masing sebesar 55,79 persen dan 57,96 persen, dan kemiskinan ekstrim di perdesaan lebih parah daripada di perkotaan (Tabel 4.6), Todaro (2012) menyatakan generalisasi paling valid tentang orang miskin adalah bahwa sebagian besar orang miskin hidup di daerah perdesaan dengan aktivitas utama mereka berada pada sektor pertanian dan aktivitas lain yang terkait.

Tabel 4.6. Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 2021

Tingkat Kemiskinan Ekstrem (persen)	4,00
• Tinggal di Perkotaan (jiwa)	4.567,904
• Tinggal di Perdesaan (jiwa)	6.297,375
• Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (jiwa)	10.865,279
Tingkat Kemiskinan (persen)	10,14
• Tinggal di Perkotaan (jiwa)	12,176,580
• Tinggal di Perdesaan (jiwa)	15,366,190
• Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	27.542.770

Sumber: Susenas BPS, 2021

Anomali dengan dominasi Angkatan Kerja yang menganggur adalah orang berpendidikan tertinggi SMA ke atas, namun penduduk miskin ekstrim didominasi orang berpendidikan SMP ke bawah. Situasi ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin tersebut, walaupun bekerja namun pendapatannya rendah sehingga berada di bawah garis kemiskinan.



Meskipun tingkat kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan, namun tingkat penganggurannya lebih rendah dari perkotaan. Oleh karena itulah, rencana aksi penanganan kemiskinan ekstrem di desa, salah satu yang akan dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah meningkatkan pendapatan warga desa melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), pengembangan dan pelibatan warga desa dalam unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dengan sejumlah program-program pemberdayaan yang dapat meningkatkan pendapatan warga desa.

Tabel 4.7 Penduduk Miskin Ekstrem Umur 15 tahun+ 2020

Sektor	Persentase
• Pertanian	29,8
• Industri	5,7
• Lainnya	21,5
• Tidak Bekerja	43,0
Pendidikan	
• Tidak/Belum tamat SD	27,48
• SD	39,22
• SMP	14,87
• SMA ke atas	18,43
• Rata-rata lama Sekolah	5,67
• Angka Buta Huruf	14,03

Sumber: Susenas BPS, 2021

4.4 Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan

1. Kasus Indonesia

Dengan menggunakan data runtun waktu selama 31 tahun (1990-2020) dan model Regresi linier berganda, hasil estimasi hubungan Angkatan Kerja dan Kemiskinan di Indonesia, adalah:

$$Pov = 82,816^* - 1,057 TPAK^{**} + 0,786 UnEmp$$

dimana Pov adalah tingkat kemiskinan, TPAK adalah tingkat partisipasi Angkatan Kerja dan UnEmp adalah tingkat pengangguran. Dengan tingkat kesalahan 5%, hasil esestimasi menyatakan bahwa: (a) TPAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, bahwa kenaikan 1 persen TPAK akan menyebabkan pengurangan tingkat kemiskinan 1,057 persen; (b) tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya kenaikan 1 persen pengangguran akan menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,786 persen.

Tidak signifikan TPAK mempengaruhi tingkat kemiskinan, selaras dengan temuan Saifulloh et al (2019), dan Sasana (2009). Diduga hal ini karena rendahnya pendapatan yang diperoleh orang yang bekerja dan ukuran rumah tangga yang terkategori besar sehingga mengurangi pendapatan rumah tangga perkapita rumah tangga. Sementara itu, tingkat pengangguran signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan karena orang menganggur tidak mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hasil yang sama ditemukan pada penelitian yang dilakukan Saifulloh (2019), Kiaušienė, I. (2015), Ayala, L., Cantó, O., & Rodríguez, J. G. (2016), FitzRoy, F., & Jin, J. (2017), dan Adelowokan, O. A., et al (2019).

2. Kasus Nigeria

Nigeria salah satu Negara di Afrika, masih berjuang dengan masalah kemiskinan dan pengangguran. Meskipun Negara ini memiliki banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia, namun berdasarkan Survei Standar Hidup Nasional yang Diharmonisasikan (HNLSS) tahun 2009/2010, sekitar 60,9% dari penduduk negara itu hidup dalam “kemiskinan mutlak”, disertai dengan tingkat pengangguran cukup tinggi, 14,2%.

Tantangan yang dihadapi Nigeria, juga dihadapi sebagian besar Negara berkembang dan beberapa Negara maju belakangan ini adalah masalah kemiskinan dan pengangguran tidak membaik



selama bertahun-tahun, meskipun pengeluaran pemerintah meningkat (Ogbeide & Agu, 2015, Nwosa, 2014). Hal ini disebabkan lebih dari separuh total penduduk hidup di bawah garis kemiskinan \$1,90 per hari.

Dari hasil penelitian diperoleh, perubahan satu unit dalam probabilitas rumah tangga yang menganggur kemungkinan akan mengakibatkan log peluang meningkat sebesar 1,06, serta menyebabkan peningkatan kejadian kemiskinan sebesar 23% melalui efek marjinal pengangguran. Efek buruk ketika orang menganggur adalah penurunan standar kehidupan standar yang disebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Oleh karena itu, ketika orang mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan dan memperoleh upah yang wajar, mereka cenderung mengimbangi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan mereka mulai keluar dari perangkap kemiskinan.

3. Kasus Mesir

Nassar dan Biltagy (2017) dalam di Mesir menyatakan bahwa kemiskinan pada umumnya selalu terkait dengan buruknya kesempatan kerja di kegiatan marjinal dimana di kegiatan ini upah rendah dan produktivitas yang rendah. Kebijakan pengurangan kemiskinan dengan cara mereformasi sistem pendidikan yang disertai dengan pemberian program pelatihan yang akan meningkatkan tingkat produktivitas dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar.

Faktanya, dengan kebijakan ini tingkat pencapaian pendidikan di Mesir telah terbukti mengalami peningkatan. Namun, antara daerah pedesaan dan perkotaan kesenjangan tetap tinggi. Hal ini merupakan hambatan aliran tenaga kerja dari perdesaan (terutama tenaga kerja di pertanian) masuk ke kegiatan dengan produktivitas dan ketrampilan yang lebih tinggi.

4.5 Penutup

Kondisi dinamis selalu terjadi pada Angkatan Kerja melalui perubahan jumlah orang yang bekerja maupun jumlah orang yang menganggur. Faktor penyebab orang bekerja mungkin saja karena menjadi pegawai baru atau dipanggil kembali untuk bekerja atau sudah memulai usaha. Sebaliknya orang dapat menjadi menganggur karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau sengaja berhenti bekerja. Di pasar kerja, Angkatan Kerja merupakan pasokan (penawaran) tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Sebagai input dari kegiatan produksi, peran Angkatan Kerja menjadi sangat penting baik dalam konteks mikro (individu) maupun makro (perekonomian).

Ketika Angkatan Kerja secara individu berstatus bekerja namun tidak memperoleh jumlah pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dasar minimum maka konsekuensinya akan terperangkap kemiskinan. Bahkan jika pendapatannya di bawah garis kemiskinan tertentu menyebabkan berada dalam kondisi kemiskinan ekstrim. Demikian pula jika Angkatan Kerja berstatus menganggur yang memang sudah jelas tidak memperoleh pendapatan.

Secara agregat hal ini menimbulkan masalah pengangguran dan kemiskinan bagi perekonomian. Indonesia saat ini pun belum terlepas dari keduanya, baik karena masih cukup tingginya tingkat pengangguran juga masalah kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya melalui berbagai program pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Kondisi seperti Indonesia terjadi juga di beberapa Negara lain.

Ketika Angkatan Kerja yang berstatus bekerja dioptimalkan pemanfaatannya akan mendatangkan produktivitas tinggi yang menghasilkan output tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi juga tinggi. Hal ini berarti peluang untuk memperluas kegiatan ekonomi akan terbuka sehingga penyerapan tenaga kerja juga semakin besar. Pengangguran dapat lebih mudah diatasi. Dengan



demikian tren positif pengangguran dan kemiskinan diharapkan dapat berubah arah.

Daftar Pustaka

- Adelowokan, O. A., Maku, O. E., Babasanya, A. O., & Adesoye, A. B. (2019). Unemployment, Poverty and Economic Growth in Nigeria. *Journal of Economics & Management*, 35, 5-17. Available at: <https://doi.org/10.22367/jem.2019.35.01>
- Andini dkk. (2013). Faktor-faktor yang Memengaruhi Penduduk Lanjut Usia Masih Bekerja. *Piramida Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. IX (1). 44-49.
- Ayala, L., Cantó, O., & Rodríguez, J. G. (2016). Poverty and The Business Cycle: A Regional Panel Data Analysis for Spain Using Alternative Measures of Unemployment. *The Journal of Economic Inequality*. 15(1), 47-73.
- Badan Pusat Statistik. Survei Sosial Ekonomi Nasional. 2020.
- _____. Survei Angkatan Kerja Nasional. 2021.
- Borjas, George J. (2016). *Labor Economics*. Seventh Edition. Mc Graw Hill Education. New York.
- Briones R. (2019). Investing in Rural Youth in The Asia and The Pacific Region. *IFAD Research Series* 58 [Internet]. Rome (IT): International Fund for Agricultural Development; Available from: https://www.ifad.org/documents/38714170/41187395/18_Briones_2019+R_DR_BACKGROUND+PAPER.pdf/48ab25bb-6a55-e883-bfe3-053348a4b865.
- Ehrenberg, Ronald G and Smith, Robert S. (2018). *Modern Labor Economics. Theory and Public Policy*. Thirteenth Edition. Routledge. New York.
- FitzRoy, F., & Jin, J. (2017). Basic Income and A Public Job Offer: Complementary Policies to Reduce Poverty and Unemployment. IZA Policy Paper No. 133, September. (1-28. Retrieved from: <http://ftp.iza.org/pp133.pdf>).

- Hill, Hal. (2021). What's Happened to Poverty and Inequality in Indonesia over Half a Century? *Asian Development Review*. 38 (1). 68-97. https://doi.org/10.1162/adev_a_00158.
- Ilmma, Amri and Matthew Wai-Poi. (2014). Patterns of Regional Poverty in The New Indonesia. In *Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia*. Edited by Hal Hill. 98-132. Sinagapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Kiaušienė, I. (2015). Comparative Assessment of Women Unemployment and Poverty in European Union. *Intellectual Economy*, 9(2), 91-101.
- Muhammad, U. F., & David, J. (2019). Relationship Between Poverty and Unemployment in Niger State. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 8(1): 71 – 78. doi: <http://dx.doi.org/10.15408/sjie.v8i1.6725>.
- Nassar, Heba and Marwa Biltagy. (2017). Poverty, Employment, Investment and Education Relationships: The case of Egypt. Sage. DOI: 10.1177/2158244017697156.
- Nwosa, P.I. (2014). Government Expenditure, Unemployment and Poverty Rates in Nigeria. *Journal of Research in National Development*. 12 (1). 77-84
- Ogbeide, E.N.O & Agu, D.O. (2015). Poverty and Income Inequality in Nigeria: Any Causality. *Asian Economic and Financial Review*. 5 (3). 439-452.
- Saifulloh, N.I, et al. (2019). The Effect of Employment Aspect on Poverty in Central Java Indonesia. *Eko-Regional Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*. 14 (1). 1-9.
- Sasana, H. (2009). The Role of Fiscal Decentralization on Economic Performance in The Regencies / Cities of Central Java Province. *Journal of Development Economics*. 10 (1), 103-124.
- Sziraczki dan Reerink. (2004). *Report of Survey on The School-to-Work Transition in Indonesia*. ILO. International Labour Office. Jakarta.
- Todaro, Michael P and Smith, Stephen C. (2012). *Economic Development*. Eleventh edition. Pearson Education Inc. Boston.

MIGRASI KOMUTER DAN PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH DI INDONESIA

Neneng Miskiyah dan Nurlina T. Muhyiddin

5.1 Pendahuluan

Migrasi komuter adalah bentuk mobilitas yang bersifat non permanen yang pada masa kini paling banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendukung fenomena ini adalah perkembangan sektor transportasi dan teknologi informasi yang pesat. Ujung dari kondisi ini adalah semakin berkembangnya perekonomian daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan dari mereka yang melakukan mobilitas.

Sektor transportasi merupakan urat nadi yang menghubungkan simpul-simpul kegiatan perekonomian, penggerak, dan pendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan merupakan salah satu pilar dalam mendukung percepatan pembangunan Indonesia. Sarana dan prasarana transportasi berperan sangat penting dalam mendistribusikan barang dan jasa serta pergerakan manusia terlebih ditunjang oleh teknologi informasi yang semakin berkembang. Teknologi informasi mampu memfasilitasi masyarakat untuk melakukan mobilitas, dengan menggunakan media sosial, masyarakat dalam menjalin hubungan dengan orang-orang di wilayah tujuan, dan teknologi informasi dapat menentukan pemilihan lokasi migrasi.

Kemudahan layanan transportasi dan perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu alasan kuat melakukan mobilitas antar kota atau antar daerah. Daya tarik daerah tujuan yang memberikan janji kehidupan yang lebih baik merupakan faktor pendorong bagi pekerja untuk melakukan mobilitas ulang alik atau migrasi komuter.

5.2 Trend Migrasi Komuter

Perkembangan pembangunan yang pesat menjadi salah satu faktor terjadinya migrasi komuter. Hal lain juga karena ierbatasnya lahan untuk perumahan, lapangan pekerjaan, serta perubahan lingkungan ekonomi menjadi pendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas ulang alik. Migrasi komuter dapat terjadi bagi penduduk: (a) yang berdiam di kota kecil ke kota besar (seperti kota Bekasi dan DKI Jakarta), (b) antara yang berdiam di kota besar ke kota kecil (kota Palembang dan kota Inderalaya) dan (c) antara mereka yang berdiam di pinggiran kota ke pusat kota (desa Pemulutan dan kota Palembang atau ke kota Inderalaya).

Pelaku komuter lebih memilih tinggal di daerah pinggiran dengan biaya hidup yang relatif lebih murah (BPS, 2020) dan juga harga lahan perumahan pun lebih murah dibanding dengan lahan perumahan di perkotaan. Kondisi ini juga didukung dengan meningkatnya fasilitas transportasi yang mempermudah orang untuk bepergian dan memilih menjadi komuter (Wang dan Hu, 2017). Fenomena pindah dan tinggal di daerah pinggiran disebut sebagai *urban transition*. Perkembangan daerah pinggiran karena peristiwa *urban transition* tentu tidak sama, ada daerah yang tetap tertinggal dan ada yang berkembang pesat.

DKI Jakarta merupakan daerah dengan trend migrasi komuter pekerja terbanyak, yaitu 1,02 juta pekerja atau 20,98 persen (BPS, 2017). Untuk Indonesia, jumlah pekerja komuter di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 7,08 juta jiwa atau 5,98 persen dari penduduk yang bekerja adalah pekerja komuter (BPS, 2017). Tahun 2019, pekerja komuter di Indonesia meningkat menjadi 6,9 persen (BPS, 2020). Namun pada tahun 2020 terdapat penurunan pekerja komuter di



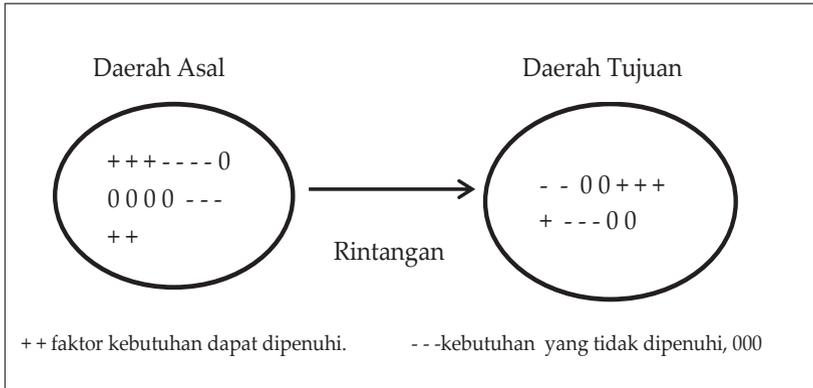
Indonesia menjadi 5,5 persen. Kondisi ini disebabkan pandemi Covid-19 yang telah merubah pola mobilitas penduduk.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai pada tahun 2020 mempengaruhi kegiatan masyarakat, himbauan untuk bekerja dan sekolah dari rumah mengakibatkan penurunan jumlah penduduk yang keluar/masuk dari daerah tempat tinggalnya. Tahun 2022 pemerintah telah melakukan kebijakan pelonggaran aktivitas di tengah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kebijakan ini mendorong meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan migrasi ulang alik yang cukup signifikan.

5.3 Kefaedahan Migrasi Komuter Tempat Asal Dan Tujuan

Secara individual pekerja yang melakukan migrasi komuter bertujuan untuk meningkatkan penghasilan mereka. Secara makro, migrasi komuter akan menciptakan kefaedahan bagi daerah tujuan dan daerah tempat tinggal. Nilai kefaedahan ini diungkapkan oleh Everett S. Lee dalam teori migrasinya yakni '*Push-Full Theory*' yang dipresentasikan dalam Gambar 5.1 di bawah ini.

Dikatakan oleh Lee bahwa volume migrasi di wilayah berkembang sesuai dengan keragaman di daerah tersebut. Di daerah asal dan tujuan ada faktor positif, negatif dan faktor netral. Faktor positif adalah faktor yang menguntungkan sehingga akan tetap tinggal di daerah tersebut, faktor negatif yakni faktor kekurangan di daerah tersebut yang menyebabkan orang akan pindah. Perbedaan nilai kumulatif antara kedua daerah tersebut cenderung menimbulkan arus migrasi. Selain itu, Lee juga menyatakan besar kecilnya arus migrasi dipengaruhi faktor rintangan, seperti: biaya pindah yang tinggi, terbatasnya sarana transportasi, atau pajak yang tinggi di daerah tujuan.



Gambar 5.1 Faktor-faktor dan Rintangan Antara di Daerah Asal dan Daerah Tujuan

Sumber: Lee, 1966

Komuter memberikan dampak terhadap individu dan masyarakat dari daerah asal dan daerah tujuan. Dampak ekonomi yang diterima oleh rumah tangga dan daerah asal yaitu terjadi peningkatan pendapatan, sedangkan dampak sosial berupa peningkatan prestige sosial dan kedekatan hubungan dengan keluarga. Daerah asal memiliki nilai ekonomi bernilai positif bagi daerah asal apabila seseorang tercukupi secara ekonomi, misalnya memperoleh pekerjaan dengan gaji/upah yang cukup dan jika seseorang tidak dapat bekerja dan tidak memperoleh penghasilan yang cukup maka memberikan nilai negatif pada daerah asal. Setiap orang yang akan melakukan mobilitas mempunyai anggapan bahwa daerah tujuan memiliki nilai positif dan memberikan pemenuhan kebutuhannya.

Dampak yang diterima oleh daerah asal adalah terjadinya peningkatan pembangunan infrastruktur desa dan degradasi budaya desa. Keberadaan pelaku mobilitas komuter dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif yaitu

- 1) Dampak Positif: (a) mengurangi kepadatan penduduk kota besar, (b) berkembangnya daerah pinggiran sebagai tempat tinggal pelaku komuter, (c) kemajuan di bidang transportasi, (d) penyediaan fasilitas sosial dan umum, seperti fasilitas



pendidikan, kesehatan, dan perumahan, (d) remiten (bagi daerah asal). (e) tenaga kerja (bagi daerah tujuan), dan (f) memicu pertumbuhan perekonomian.

- 2) Dampak Negatif: (a) kemacetan lalu lintas, (b) polusi udara dan suara, dan (c) terjadi proses perubahan perilaku yang kurang sesuai dengan etika kehidupan.

Keberadaan komuter memberikan dampak pada pembangunan di daerah asal maupun daerah tujuan komuter. Sebagian besar yang melakukan migrasi komuter adalah mereka yang berusia produktif dengan alasan migrasinya adalah pekerjaan dan mencari pekerjaan. Bagi daerah tujuan, ini menjadi modal yaitu bertambahnya tenaga kerja yang berarti dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi, sementara bagi daerah asal, berdampak pada berkurangnya tenaga kerja produktif yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah asal.

5.4 Komposisi Sosio-Demografi Migrasi Komuter

Proporsi pelaku migrasi komuter masih didominasi oleh laki-laki dibandingkan perempuan (Tabel 5.1). Perempuan lebih cenderung menjadi *stayers* (95,7%) atau bekerja di lokasi yang sama dengan tempat tinggalnya. Hal ini terkait dengan peran dan tugas perempuan dalam rumah tangga, sehingga proporsi pekerja laki-laki yang lebih banyak melakukan migrasi komuter. Proporsi pekerja belum kawin yang melakukan mobilitas ulang alik cenderung lebih besar dibandingkan yang berstatus kawin atau cerai (BPS, 2020).

Selain dari keinginan sendiri untuk melakukan mobilitas ulang alik, ketersediaan sarana dan prasarana juga mendukung kegiatan tersebut. Kemudahan dalam memperoleh informasi lowongan pekerjaan menjadi salah satu faktor yang memungkinkan untuk bekerja di luar wilayah tempat tinggal. Tahun 2020 mayoritas 89% pekerja komuter menggunakan moda transportasi pribadi/dinas, sedangkan untuk moda transportasi umum hanya 9%. Meningkatnya teknologi informasi mendorong pekerja komuter

menggunakan moda transportasi online, namun persentasenya masih kecil kurang dari 1.

Tabel 5.1 Karakteristik Sosiodemografi Pekerja Mobilitas Komuter Tahun 2020

Karakteristik	Pekerja Komuter		Stayers	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Jenis Kelamin				
Laki-laki	4.983.856	6,4	70.549.414	90,7
Perempuan	2.030.726	4,0	48.533.215	95,7
Status Perkawinan				
Belum kawin	1.893.117	7,7	22.493.777	91,4
Kawin	4.837.455	5,2	86.641.638	92,6
Cerai hidup	158.885	4,6	3.271.915	94,3
Cerai mati	125.125	1,8	6.675.299	97,5
Daerah Tempat Tinggal				
Perkotaan	5.573.137	8,0	62.591.107	90,1
Perdesaan	1.441.445	2,4	56.491.522	95,8
Pendidikan Tertinggi Ditamatkan				
Di bawah SMA	1.830.830	2,5	70.254.974	95,7
SMA ke atas	5.183.752	9,4	48.827.655	88,7
Jumlah	7.014.582	5,5	119.082.629	92,7

Sumber: BPS (2020), diolah.

5.5 Kefaedahan Migrasi Komuter Terhadap Perekonomian Daerah

Perkembangan perekonomian di pusat kota berupa lapangan kerja yang lebih luas, prospek kerja yang lebih baik, semakin meningkatnya kebutuhan individu dalam satu rumah tangga, peningkatan harga beli berbagai produk serta pengaruh kehidupan social, merupakan pendorong terjadinya aktivitas komuter. Aktivitas komuter terungkap dalam bentuk pergerakan manusia, barang, dan informasi.

Menurut Khisty dan Lall (2005) ada 3 (tiga) kondisi yang menyebabkan pergerakan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya yaitu:

- 1) Komplementaris, daya tarik relatif antara dua atau lebih tempat tujuan. Daerah tujuan menjadi salah satu factor



dalam pergerakan manusia dan barang. Tempat tujuan yang potensial seperti mudah dijangkau, aman, fasilitas yang cukup maka daerah tujuan menjadi daya tarik dalam melakukan aktivitas komuter.

- 2) Transferabilitas, diukur dari waktu dan uang serta teknologi yang tersedia. Kendala dalam aktivitas pergerakan manusia dan barang, seperti jarak tempuh. Orang yang melakukan perjalanan harus memiliki keinginan untuk mengatasi kendala tersebut dengan teknologi yang tersedia, uang dan waktu.
- 3) Persaingan antar beberapa lokasi untuk memenuhi permintaan dan penawaran. Lokasi dimana aktivitas dilakukan akan mempengaruhi manusia, dan aktivitas manusia akan mempengaruhi lokasi tempat aktivitas berlangsung. Fasilitas lengkap, moda transportasi yang cukup, lokasi yang aman dan nyaman dan mampu memenuhi permintaan dan penawaran bagi aktivitas komuter menjadi pilihan bagi masyarakat. Oleh karena itu bagi beberapa lokasi yang memiliki kondisi yang sama tentu akan bersaing untuk menarik lebih banyak lagi pergerakan manusia dan barang.

Dampak migrasi komuter yang paling nyata bagi pelaku migrasi adanya peningkatan pendapatan. Daya tarik daerah tujuan yang lebih menjanjikan karena memberikan fasilitas yang dibutuhkan dan kemudahan dalam aktivitas komuter menjadi pilihan bagi masyarakat. Bagi daerah asal yang belum produktif akan ditinggalkan oleh sebagian masyarakatnya untuk beralih ke daerah tujuan yang lebih menjanjikan bagi perbaikan kehidupan mereka.

Martini dan Sudibia (2013) mengemukakan bahwa di Denpasar ada beberapa upaya diperlukan untuk menekan laju mobilitas masyarakat ke daerah perkotaan dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa sehingga kesenjangan pembangunan daerah pedesaan dan perkotaan dapat teratasi.

Tujuan utama dilakukannya migrasi komuter adalah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik, kondisi ini juga terjadi di kota Medan yang dilakukan oleh Pakpahan dan Manalu (2020) ditemukan bahwa semakin tinggi pendapatan komuter maka semakin besar konsumsi yang dilakukan. Secara langsung komuter memberi kontribusi bagi output perekonomian kota Medan.

Namun, tingginya jumlah masyarakat yang melakukan mobilitas ulang alik dapat menimbulkan masalah transportasi. Kemacetan merupakan masalah yang sering terjadi terutama pada jam-jam sibuk. Perilaku pemilihan moda transportasi pekerja komuter memiliki peran dalam keputusan perencanaan transportasi, dimana pekerja tersebut akan memilih moda transportasi yang memaksimalkan utilitas perjalanan. Irjayanti, dkk (2021) mengemukakan bahwa jumlah moda yang digunakan oleh pelaku komuter Jabodetabek memiliki dampak tertinggi pada probabilitas penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda motor dibandingkan angkutan umum.

Selanjutnya Tabel 5.2 menunjukkan bahwa pola mobilitas ulang alik menurut gender. Perempuan cenderung melakukan perjalanan komuter pada jarak pendek, selain itu perempuan lebih banyak memiliki pekerjaan paruh waktu, dan pekerjaan musiman. Peran ganda perempuan sebagai ibu rumah tangga membatasi jarak komuter. Rata-rata 35% pelaku komuter adalah mereka yang berpendidikan tinggi, hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Pelaku komuter berpendidikan tinggi menjadi bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, karena memberikan kontribusi langsung terhadap akselerasi ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat dan ekonomi lokal. Bagi daerah asal, berkurang atau bahkan hilangnya sumber daya manusia yang berkualitas dapat mengancam pembangunan di daerah tersebut termasuk arus investasi, pembangunan infrastruktur, serta pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi.



Modal manusia yang dimiliki pelaku komuter berpendidikan tinggi menjadi bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Keberadaan pelaku komuter berpendidikan tinggi memberikan kontribusi langsung terhadap akselerasi ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat dan ekonomi lokal. Bagi daerah asal, berkurang atau bahkan hilangnya sumber daya manusia yang berkualitas dapat mengancam pembangunan di daerah tersebut termasuk arus investasi, pembangunan infrastruktur, serta pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi.

Memasuki era revolusi industri 4.0 dengan berkembangnya teknologi informasi sebenarnya pelaku komuter dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dan inovasi di bidang komunikasi tersebut sebagai media untuk memotivasi penduduk daerah asal dalam meningkatkan ekonomi daerah asalnya. Penyediaan fasilitas sosial dan umum, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan diperlukan untuk mendukung keberadaan komuter pada daerah asal. Sementara untuk daerah tujuan, perlu penyediaan fasilitas sosial dan umum terutama yang berkaitan dengan transportasi perkotaan dengan mempertimbangkan jumlah komuter yang datang dan jumlah penduduk pada kota tersebut.

Komuter adalah perilaku yang muncul akibat dari perspektif tersebut, penelitian yang dilakukan Rahmadana dalam Suryadi (2014) menunjukkan bahwa faktor pendorong dan faktor penarik berpengaruh signifikan terhadap pengembangan wilayah. Pendapatan, aksesibilitas daerah tujuan dan kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap alokasi pendapatan ke daerah asal komuter dan kualitas hidup. Terjadinya perkembangan di kawasan perkotaan yang memiliki variasi lapangan pekerjaan lebih banyak, menyebabkan adanya interaksi antara kota dan kawasan pinggiran di sekitarnya.

Tabel 5.2 Pekerja Komuter Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, dan Tingkat Pendidikan Hasil Sakernas Agustus 2019 dan 2020

Provinsi	Jenis Kelamin		Status Perkawinan				Pendidikan				
	Lk	Pr	Blm Kwn	Kawin	Cerai hidup	Cerai Mati	Tidak Tamat SD	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	PT
Tahun 2019											
DKI Jakarta	733607	354990	33,33	62,96	2,59	1,12	0,96	4,21	8,46	49,69	36,68
Banten	590576	248830	29,59	66,89	2,40	1,12	2,14	5,68	9,46	45,10	37,62
DI Yogyakarta	208127	105174	30,55	65,07	2,31	2,07	3,63	6,32	10,50	48,91	30,64
Jawa Barat	1778440	660998	29,56	67,16	2,03	1,25	2,04	8,01	10,44	45,65	33,86
Bali	176603	87539	30,25	67,14	1,22	1,39	2,59	5,29	9,10	49,99	33,03
Tahun 2020											
DKI Jakarta	571958	231898	31,02	65,11	2,89	0,98	0,68	4,32	9,01	49,21	36,78
DI Yogyakarta	164397	89802	25,49	68,65	3,40	2,46	2,44	6,55	7,67	48,49	34,85
Banten	423886	178691	31,59	64,67	1,58	2,16	2,10	7,43	9,80	44,49	36,18
Jawa Barat	1329665	501398	29,06	67,98	1,95	1,01	1,90	8,94	9,65	46,36	33,15
Bali	116776	56006	27,65	69,59	1,26	1,50	2,64	7,76	8,53	43,51	37,56

Sumber: Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2021, diolah



5.6 Pembangunan Infrastruktur Di Daerah Pinggiran

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Program pembangunan infrastruktur adalah bagian dari pendukung program di sektor lain, yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi serta terciptanya lapangan pekerjaan. Peran aktif pemerintah, swasta, serta masyarakat sangat dibutuhkan guna terlaksananya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur adalah pengalokasian anggaran untuk pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, termasuk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pada tahun 2020 APBN Kementerian PUPR sebesar 120.217,54 miliar rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menjalankan program pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan dan jembatan, pengembangan perumahan dan permukiman serta program pembangunan infrastruktur lainnya (Pusat Data dan Teknologi Informasi, 2021).

Dalam Laporan Akhir Membangun Infrastruktur dari Pinggiran yang dikemukakan oleh Bapak Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR tahun 2016 mengemukakan bahwa proyek strategis yang ada dalam daftar *action plan* Kementerian PUPR masih sekitar jalan raya (termasuk jalan tol), waduk, jembatan, dan perumahan rakyat. Pola pembangunan pinggiran Indonesia masih terus menjadi prioritas. Pembangunan infrastruktur memberikan sederet manfaat, seperti waduk bermanfaat dalam pengendalian banjir, mengatasi kekeringan, budi daya perikanan, penyediaan air bersih, air irigasi untuk persawahan rakyat dan pembangkit listrik tenaga air, sumber energi terbarukan, dan pariwisata. Sementara pembangunan infrastruktur strategis lainnya seperti jalan raya, jalan tol dan jembatan mampu meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah. Lalu lintas manusia, barang, dan jasa akan lebih mudah dan lebih murah, pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang akan menambah daya saing (*competitiveness*) Indonesia.

Pembangunan berbasis perdesaan menjadi salah satu upaya memperkuat pondasi ekonomi negara, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur merupakan upaya pemerintah yang paling berimplikasi besar terhadap masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Tujuan dari pembangunan infrastruktur antara lain menciptakan kemudahan konektivitas, meningkatkan daya saing, mengurangi disparitas antar wilayah dengan memacu ekonomi daerah pinggiran. Membangun dari desa menjadi komitmen lain pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Strategi pembangunan nasional berfokus pada dimensi pemerataan dan kewilayahan dengan prioritas pembangunan di wilayah desa, wilayah pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur selayaknya tidak hanya berfokus di pusat kota, melainkan menyebar ke seluruh wilayah bahkan sampai ke pelosok daerah. Keseimbangan pembangunan infrastruktur antara kota dan daerah pinggiran mampu mendorong percepatan perkembangan pembangunan yang merata. Adanya pembangunan infrastruktur yang merata dapat mengakselerasi pemerataan pembangunan dan Bergeraknya ekonomi produktif yang berbasis kerakyatan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan dengan meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan. Membangun infrastruktur sejatinya membangun masa depan sebuah peradaban karena dapat berperan sebagai stimulus Bergeraknya kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh provinsi dapat tercipta hubungan yang kuat antar wilayah baik dalam provinsi maupun diluar provinsi, menurunkan biaya logistik, meningkatkan pendapatan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkecil kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia, yang pada akhirnya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah khususnya dan Indonesia umumnya.



5.7 Penutup

Mobilitas ulang alik menjadi pola perjalanan baru masyarakat Indonesia. Kegiatan mobilitas didasari oleh motivasi ekonomi untuk mendapatkan tingkat penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti moda transportasi memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas ulang alik. Perkembangan perekonomian daerah tujuan menjadi alasan pelaku komuter, namun terbatasnya lahan untuk perumahan, lapangan pekerjaan yang semakin menyempit di daerah asal, serta perubahan lingkungan ekonomi menjadi pendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas ulang alik.

Mobilitas ulang alik memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif akibat dari adanya mobilitas ulang alik ini antara lain meningkatnya pendapatan pelaku komuter, bertambahnya pengetahuan masyarakat di daerah asal melalui proses komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan daerah tujuan, meningkatnya status sosial dan mutu rumah tangga. Namun mobilitas ulang alik ini juga memberikan dampak negatif yaitu bagi daerah asal, berdampak pada berkurangnya tenaga kerja produktif yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah asal. Sementara dampak positif bagi daerah tujuan, dengan banyaknya pelaku komuter menjadi tenaga kerja sektor informal ternyata mampu menggerakkan roda perekonomian, sedangkan dampak negatifnya antara lain terjadinya kemacetan lalu lintas, dan terjadi proses perubahan perilaku yang kurang sesuai dengan etika kehidupan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2021. *Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2021. *Analisis Mobilitas Tenaga Kerja: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2017. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2017*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Irfayanti, Amelia Dertta, Dyah Wulan Sari, dan Ismatulloh Rosida. 2021. Perilaku Pemilihan Moda Transportasi Pekerja Komuter: Studi Kasus Jabodetabek. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 21, No. 2, hal. 125-147.
- Khisty, C. Jotin dan B. Kent Lall. 2005. *Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi (Edisi ketiga, Jilid 1)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lee, Everett S. 1966. A Theory of Migration. *Demography Journal (JSTOR)*, Vol. 3, No. 1, hal. 47-57.
- Martini, Ni Putu Rahayu dan I Ketut Sudibia. 2013. Keputusan Melakukan Mobilitas Penduduk dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Migran di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 2, No. 2, hal. 76-86.
- Pakpahan, Evalina dan Simon Patar Rizki Manalu. 2020. Analisis Kontribusi Penglaju/Commuter Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Simantek*, Vol. 4, No. 3, hal. 103-112.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian PUPR. 2021. *Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2020*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Suryadi. 2014. Profil dan Positioning Komuter di Jabodetabek Menggunakan Analisis Korespondensi. *Warta Penelitian Perhubungan*, Vol. 26, No. 6, hal. 299-310.
- Wang, Q., & Hu, H. (2017). Rise of Interjurisdictional Commuters and Their Mode Choice: Evidence from the Chicago Metropolitan Area. *Journal of Urban Planning and Development*, 143(3), 05017004. doi: [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)UP.1943-5444.0000381](https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000381).

BAB

6

FENOMENA BONUS DEMOGRAFI BAGI PEMBERDAYAAN EKONOMI

Lily Rahmawati Harahap

6.1 Pendahuluan

Bagi suatu negara, salah satu indikator yang menunjukkan kesejahteraan penduduk selain dari baiknya perekonomian adalah bagaimana negara tersebut memberdayakan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh penduduknya. Penduduk merupakan aset bagi suatu negara, yang dapat dilihat dari sisi kuantitas, kualitas maupun keduanya. Negara dengan jumlah penduduk yang sedikit tetapi memiliki kualitas yang baik, lebih unggul dibandingkan dengan negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar tetapi tidak memiliki kualitas yang baik. Keadaan yang ideal adalah jika suatu negara memiliki jumlah penduduk yang besar sekaligus memiliki kualitas yang baik. Hal ini berkaitan dengan isu *Bonus Demografi* yang sedang terjadi di sebagian negara di dunia. Adalah penting untuk mengkombinasikan jumlah penduduk yang bertambah tersebut dengan kualitas meningkat, sehingga negara tersebut akan memperoleh apa yang disebut dengan bonus demografi. Bukan sebaliknya, dimana pertambahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya bencana demografi. Untuk itu perlu diketahui lebih jelas hal-hal yang berkaitan dengan bonus demografi serta kualitas penduduk suatu negara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami terjadinya bonus demografi. Data tahun 2020 menunjukkan Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 270,2 juta jiwa dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 191,1 juta jiwa, sedangkan penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan usia sudah tidak produktif (65+ tahun), yang kemudian disebut dengan usia non-produktif, masing-masing berjumlah 63,1 juta jiwa dan 16 juta jiwa (Dwi & Muhammad, 2021). Ini berarti, penduduk dengan usia produktif mendominasi sebesar 70,72 % dan jumlah penduduk dengan usia non-produktif sebesar 29,28 %. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 41,39 %, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif memiliki tanggungan 41 penduduk usia non-produktif.

Pada tahun 2045 diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia mencapai 319 juta jiwa. Penduduk dengan usia produktif sebesar 208 juta jiwa, belum produktif sebesar 66 juta jiwa dan tidak produktif sebesar 45 juta jiwa. Ini berarti, penduduk dengan usia produktif mendominasi sebesar 65%, dan sisanya (usia non-produktif) sebesar 35%. Rasio ketergantungan mencapai 53,36%, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif memiliki tanggungan 53 penduduk usia non-produktif (BPS, 2022).

6.2 Apa Itu Bonus Demografi ?

Seperti yang telah dijelaskan di atas, penggunaan parameter untuk menilai apakah keadaan penduduk suatu negara merupakan keuntungan atau malah menjadi beban dapat dilihat dari rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang diperoleh. Semakin kecil nilai rasio yang diperoleh akan semakin baik. Dengan kata lain, penduduk dengan usia produktif menanggung lebih sedikit penduduk dengan usia non-produktif. Nilai rasio ideal untuk menjelaskan hal tersebut jika berada di bawah angka 50 dan disebut sebagai jendela peluang (*window of opportunity*). Jendela peluang tersebut memberikan dua pilihan hasil yang diterima yaitu apakah akan menjadikannya sebagai keuntungan yang disebut dengan



bonus demografi (*demography dividend*) atau malah menjadi beban demografi (*demography burden*).

Bonus demografi menggambarkan tentang tambahan nilai yang diperoleh dari susunan, jumlah dan perkembangan penduduk. Tambahan nilai yang dimaksud adalah penduduk usia kerja yang memiliki kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak, dan proporsi tanggungan muda yang lebih rendah, sebagaimana dinyatakan United Nations Fund for Population Activities (UNFPA, 2016):

“Countries with the greatest demographic opportunity for development are those entering a period in which the working-age population has good health, quality education, decent employment and a lower proportion of young dependents”.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum bonus demografi adalah suatu situasi yang menggambarkan jumlah penduduk yang berusia produktif (berkisar antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan usia yang tidak produktif. Dengan adanya bonus demografi diharapkan suatu keadaan penduduk yang menguntungkan, karena jumlah penduduk didominasi oleh masyarakat yang berusia produktif (Kominfo, 2014). Penyebutan kata *bonus* menggambarkan optimisme untuk memilih jendela peluang yang baik.

Pada saat ini, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan didominasi oleh usia produktif tersebut (mencapai 70 persen dari jumlah penduduk) (Sekjend, 2021). Data per Maret 2022 (Worldometer, 2022) menayangkan jumlah penduduk dunia sebanyak 7.931.542.485 jiwa. Dari jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi keempat setelah China, India dan Amerika, dengan jumlah penduduk 278.466.538 jiwa (3,51%). Dengan menempati posisi keempat terbanyak dalam jumlah penduduk, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan menangkap peluang fenomena bonus demografi yang puncaknya di Indonesia terjadi pada tahun 2030 (Sekjend, 2021).

Peluang ini harus dicermati dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, antara lain dengan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi, karena bonus demografi hanya terjadi satu kali di setiap negara.

6.2.1 Peluang Fenomena Bonus Demografi

Bonus demografi sebagai pintu pembuka peluang (*window of opportunity*) untuk memperoleh berbagai manfaat antara lain:

- 1) Berpotensi untuk menaikkan produk domestik bruto (PDB). Dengan lebih banyaknya penduduk berusia produktif, akan semakin banyak penduduk yang bekerja. Pergerakan dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aliran dana masuk yang besar bagi negara.
- 2) Terbukanya peluang untuk para tenaga kerja dan berkembangnya perekonomian serta sektor lainnya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja akan meningkatkan kegiatan konsumsi dan produksi, yang menggambarkan bergerak dan meningkatnya perekonomian negara.
- 3) Potensi dalam meningkatkan tabungan masyarakat dan sosial. Penduduk usia produktif mempunyai kesempatan yang besar untuk meningkatkan kualitas hidup dengan salah satu cara menempatkan tabungan untuk masa depan.
- 4) Beban hidup masyarakat menjadi lebih ringan. Ini terjadi dikarenakan lebih sedikitnya jumlah penduduk dengan usia non-produktif yang harus ditanggung oleh penduduk dengan usia produktif.
- 5) Perubahan tingkat perekonomian negara berkembang menjadi negara maju. Dengan semakin mampunya penduduk untuk menabung dan lebih sedikitnya beban yang harus ditanggung, akan menggerakkan ekonomi negara menjadi lebih baik dan memberi kemungkinan untuk menjadi negara yang maju.
- 6) Terbentuknya generasi emas (*gold generation*), yaitu penduduk yang memiliki usia produktif (usia 34 tahun



sampai dengan 54 tahun), dan menjadi pemegang pemerintahan dan roda kehidupan di Indonesia pada saat negara Indonesia berusia 100 tahun (tahun 2045).

6.2.2 Tantangan Fenomena Bonus Demografi

Perumpaan dua mata uang yang bersisian, selain memberikan peluang, fenomena bonus demografi juga merupakan tantangan yang dapat menimbulkan dampak negatif jika fasilitas-fasilitas pendukung tidak disiapkan sebelumnya. Rendahnya jumlah ketersediaan fasilitas pendidikan serta rendahnya kualitas hasil pendidikan akan berdampak ke berbagai aspek kehidupan. Jumlah besar masyarakat dengan usia produktif tidak mampu bersaing, baik di dalam negeri sendiri maupun di luar negeri. Akibatnya adalah tingginya tingkat pekerjaan kasar, yang berarti rendahnya perolehan penghasilan. Rendahnya perolehan penghasilan, mengakibatkan masyarakat dengan usia produktif tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan papan dan berakibat pada terganggunya kesehatan.

Gambaran efek domino yang lain adalah dengan tingkat pendidikan yang rendah akan terjadi ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan, sehingga terjadi peningkatan kemiskinan dan pada akhirnya memberikan pengaruh buruk pada pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Dari itu, perlu dipelajari dan dikenali tantangan-tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Penduduk dengan usia produktif pada masa bonus demografi harus dibekali dengan kemampuan dan tingkat pendidikan yang memadai. Jika tidak, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara kuantitas dengan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Tersedianya lapangan kerja yang luas untuk mengakomodir penduduk usia produktif yang banyak membutuhkan pekerjaan. Dengan demikian, akan dapat dihindari terjadinya ledakan tingkat pengangguran.



- 3) Mencegah terjadinya *sandwich generation*, yaitu penduduk usia produktif yang memiliki peran ganda menanggung beban generasi sebelumnya (orang tua, mertua) dan sesudahnya (anak, istri).
- 4) Menghindari fenomena *ageing population* (penduduk lanjut usia), yang menggambarkan suatu kondisi dimana pada suatu negara terjadi peningkatan progresif pada penduduk lanjut usia.

6.3 Perkembangan Pendidikan, Pekerjaan Dan Kesehatan Indonesia

Untuk mencapai penduduk yang sejahtera secara lahir dan bathin (*wellbeing*) pada saat terjadinya fenomena bonus demografi, 3 (tiga) pilar penunjang yang memerlukan perhatian terkonsentrasi adalah pendidikan, pekerjaan serta kesehatan. Jika ketiga pilar tersebut secara masing-masing maupun bersamaan dikelola dengan baik, maka pada saat diperolehnya bonus demografi, secara otomatis akan tercapai tujuan negara. Yaitu negara yang maju dengan penduduk yang sejahtera lahir dan batin (*wellbeing*). Adalah penting bagi pemerintah untuk menyiapkan fondasi yang kokoh bagi ketiga pilar tersebut dalam menyambut serta mengimplementasikan sumber daya manusia pada masa bonus demografi itu tiba.

6.3.1 Perkembangan Pendidikan Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Indonesia, 2022). menyebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.



KKBI 2022 (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan pendidikan merupakan kata kerja yang berarti proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Untuk memperoleh pendidikan tersebut ditempuh dengan mengikuti jalur pendidikan, yaitu wahana yang harus dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Bersamaan dengan itu, juga harus melewati jenjang pendidikan yang merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan (Indonesia, 2022).

Adapun dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional tercantum pada Pasal 2 dan 3 UUD Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

Dari penjelasan di atas dapat dipahami demikian pentingnya arti pendidikan yang baik bagi suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Pendidikan yang diperoleh, dimiliki dan diimplementasi akan menjadi indikator keberadaan penduduk Indonesia dalam kancah lokal, regional maupun internasional. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya penguatan pilar pendidikan dalam menyambut dan melaksanakan semua kegiatan dengan datangnya fenomena bonus demografi. Bentuk pendidikan tersebut dapat berupa pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.

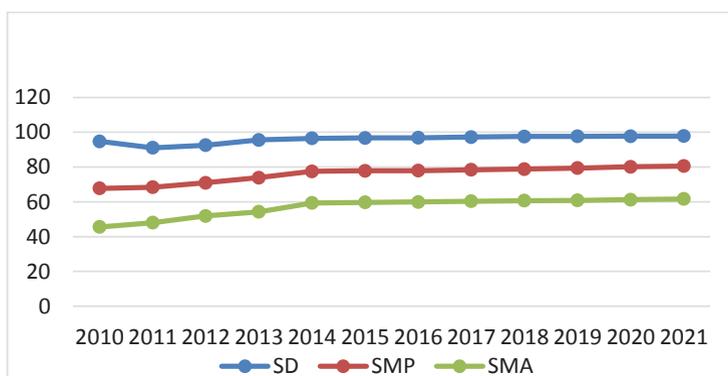
Perkembangan pendidikan di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APS), yaitu proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya (Tabel 6.1). Data APS tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 pada Gambar 6.1 menunjukkan perkembangan pendidikan anak yang mengenyam pendidikan dasar (SD) dengan rentang usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,27 % setiap tahunnya, dimana rata-rata perolehan kesempatan tersebut sebesar 95,99 %. Untuk pendidikan menengah (SMP) dengan rentang usia 13 tahun sampai dengan 15 tahun, jumlah peserta mengalami penurunan dimana rata-rata perolehan kesempatan sebesar 75,96 %. Sedangkan rata-rata kenaikan peserta didik sebesar 1,17 % setiap tahunnya, Dan untuk pendidikan menengah ke atas (SMA) dengan rentang usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun, jumlah peserta kembali mengalami penurunan, dimana rata-rata perolehan kesempatan sebesar 56,97 % dengan rata-rata kenaikan peserta didik sebesar 1,46 %.

Dari Tabel 6.1 dan Gambar 6.1 dapat diproyeksikan bahwa pada tahun 2045 jumlah penduduk yang mengenyam APS pada tahun 2021 merupakan bagian dari penduduk berusia produktif. Jika tingkat kesempatan memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi cenderung menurun, maka dikhawatirkan penduduk dengan usia produktif tidak memiliki keseimbangan antara kualitas pendidikan dengan kuantitas yang tersedia dalam kesiapan menghadapi peluang dan tantangan masa bonus demografi.

**Tabel 6.1 Angka Parisipasi Murni (%)**

Tahun	SD	SMP	SMA
2010	94,76	67,73	45,59
2011	91,07	68,36	48,07
2012	92,54	70,93	51,88
2013	95,59	73,88	54,25
2014	96,45	77,53	59,35
2015	96,7	77,82	59,71
2016	96,82	77,95	59,95
2017	97,19	78,4	60,37
2018	97,58	78,84	60,67
2019	97,64	79,4	60,84
2020	97,69	80,12	61,25
2021	97,8	80,59	61,65

Sumber: (BPS, 2022)

**Gambar 6.1 Angka Parisipasi Murni (%)**

Sumber: (BPS, 2022)

6.3.2 Perkembangan Pekerjaan Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Kemenperin, 2022). Menurut (KBBI, Tenaga Kerja, 2022) tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu; dan atau orang yang mampu melakukan

pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran merupakan penduduk yang termasuk angkatan kerja. Dan bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. (BPS, Tenaga Kerja, 2022).

Tabel 6. 2 dan Gambar 6.2 menjelaskan tentang jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Terdapat 17 lapangan pekerjaan utama (sebelumnya hanya 12 lapangan kerja utama) yang memberikan pilihan bagi usia produktif untuk bekerja. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 10 tahun terjadi kenaikan jumlah pekerja rata-rata sebanyak 2.363.421 jiwa, yang dalam persentase rata-rata sebesar 2,023 %. Lonjakan tertinggi terjadi dari tahun 2011 ke tahun 2012, yang bertambah sebanyak 5.088.559 jiwa atau 4,74 % dari tahun sebelumnya serta dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebanyak 5.259.763 jiwa atau 4,35 % dari tahun sebelumnya. Lapangan pekerjaan yang mendominasi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan.

Tabel 6.2 Bekerja pada Lapangan Kerja Utama

Tahun	Bekerja pada Lapangan Kerja (orang)
2010	107.416.309
2011	112.504.868
2012	112.761.072
2013	114.628.026
2014	114.819.199
2015	118.411.973
2016	121.022.423
2017	126.282.186
2018	128.755.271
2019	128.454.184
2020	131.050.523
2021	107.416.309

Sumber: (BPS, Tenaga Kerja, 2022)



Gambar 6.2 Bekerja pada Lapangan Kerja Utama

Sumber: (BPS, Tenaga Kerja, 2022)

Dengan rata-rata kenaikan penduduk yang bekerja pada lapangan pekerjaan utama sebesar 2,023 % selama 10 tahun, maka dapat diproyeksikan pada tahun 2045 akan terjadi peningkatan penduduk yang bekerja sebanyak 16.133.425 jiwa. Berarti penduduk yang bekerja pada tahun tersebut mencapai kurang lebih 147.183.984 jiwa atau sebesar 46,14 % dari jumlah penduduk. Tabel 6.3 dan Gambar 6.3 menunjukkan tingkat usia produktif yang bekerja dan menganggur. Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja di Indonesia selama 10 tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2.076.614 jiwa setiap tahunnya atau sebesar 1,78 %. Perubahan positif yang paling signifikan terjadi dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 5.088.559 jiwa atau sebesar 4,74 %. Sedangkan perubahan negatif terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 301.087 jiwa atau minus 0,23 %. Jumlah pengangguran memberikan data yang kurang baik dimana selama 10 tahun terakhir tersebut terjadi kenaikan pengangguran rata-rata sejumlah 71.115 jiwa atau sebesar 1,52% setiap tahunnya.

Kenaikan jumlah pengangguran yang paling signifikan terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 2.663.330 jiwa atau 37,49 %. Turunnya jumlah penduduk berusia aktif yang bekerja dan naiknya tingkat pengangguran secara signifikan merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Sedangkan penurunan tingkat pengangguran paling

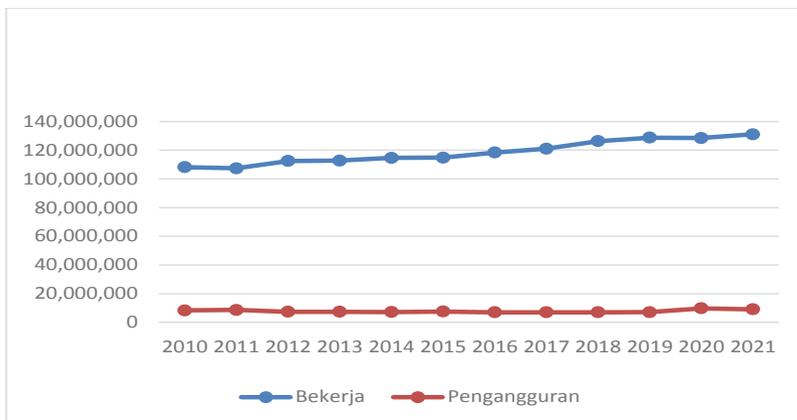
signifikan terjadi dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 1.336.526 jiwa atau minus 15,40 %.

Tabel 6.4 dan Gambar 6.4 menunjukkan persentase perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif yang bekerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Interpretasi dari angka tersebut adalah semakin besar persentase yang dihasilkan berarti semakin banyak penduduk yang bekerja dari tersedianya angkatan kerja.

Tabel 6.3 Penduduk Bekerja dan Pengangguran

Tahun	Bekerja (jiwa)	Pengangguran (jiwa)
2010	108.207.767	8.319.779
2011	107.416.309	8.681.392
2012	112.504.868	7.344.866
2013	112.761.072	7.410.931
2014	114.628.026	7.244.905
2015	114.819.199	7.560.822
2016	118.411.973	7.031.775
2017	121.022.423	7.040.323
2018	126.282.186	7.073.385
2019	128.755.271	7.104.424
2020	128.454.184	9.767.754
2021	131.050.523	9.102.052

Sumber: (BPS, Tenaga Kerja, 2022)



Gambar 6.3 Penduduk Bekerja dan Pengangguran

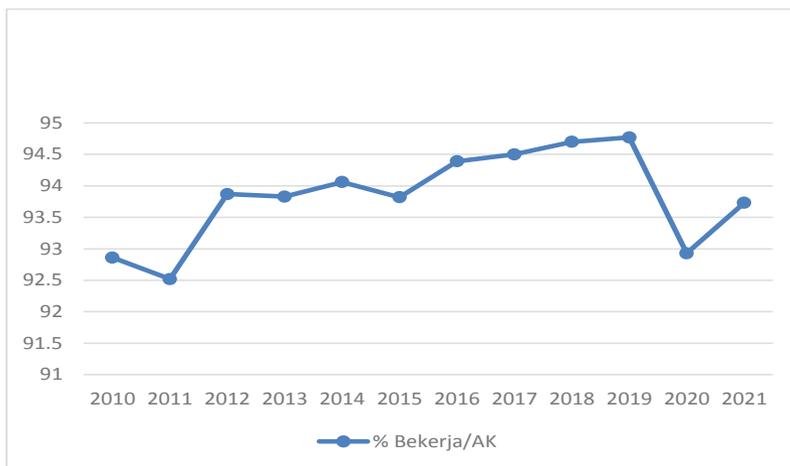
Sumber: (BPS, Tenaga Kerja, 2022)



Tabel 6.4 Proporsi Bekerja dengan Angkatan Kerja

Tahun	% Bekerja/AK
2010	92,86
2011	92,52
2012	93,87
2013	93,83
2014	94,06
2015	93,82
2016	94,39
2017	94,5
2018	94,7
2019	94,77
2020	92,93
2021	93,73

Sumber: (BPS, Tenaga Kerja, 2022)



Gambar 6.4 Proporsi Bekerja dengan Angkatan Kerja (%)

Sumber: (BPS, Tenaga Kerja, 2022)

6.3.3 Perkembangan Kesehatan Indonesia

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Kemkes, 2022). Definisi yang diberikan oleh (KBBI, Kesehatan, 2022) untuk kesehatan adalah keadaan sehat untuk badan dan sebagainya. Sedangkan kesehatan masyarakat adalah kesehatan jasmani bagi rakyat. Menurut Winslow (Maryam, 2020) definisi kesehatan masyarakat (*public health*) adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat.

Tingkat kesehatan penduduk suatu negara dicerminkan pada indeks kesehatan yang dihasilkan. Indeks kesehatan (*wellness index*) menggambarkan tingkat kesehatan di suatu wilayah, yang diukur dengan menggunakan indikator. Indeks kesehatan disusun berdasarkan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, dimana UHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

Tabel 6.5 dan Gambar 6.5 menunjukkan perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) bayi yang lahir pada tahun 2010 hingga tahun 2021, dimana grafik menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Interpretasi dari angka yang dihasilkan adalah semakin tinggi jumlah tahun berarti semakin panjang kesempatan hidup penduduk Indonesia sejak lahir. Selama 10 tahun terakhir tersebut, rata-rata umur penduduk Indonesia bertambah sebesar 0,22 % setiap tahunnya. Bayi yang lahir pada tahun 2010 memiliki kesempatan hidup sampai dengan umur 69,81 tahun. Dengan kenaikan sebesar 0,22 % tersebut, maka bayi yang lahir pada tahun 2021 akan memiliki kesempatan hidup sampai dengan umur 71,57 tahun.

Dari informasi tersebut maka pada tahun 2045 dapat diproyeksikan bayi yang lahir pada tahun tersebut akan memiliki kesempatan hidup hingga umur 75,51 tahun. Untuk itu perlu

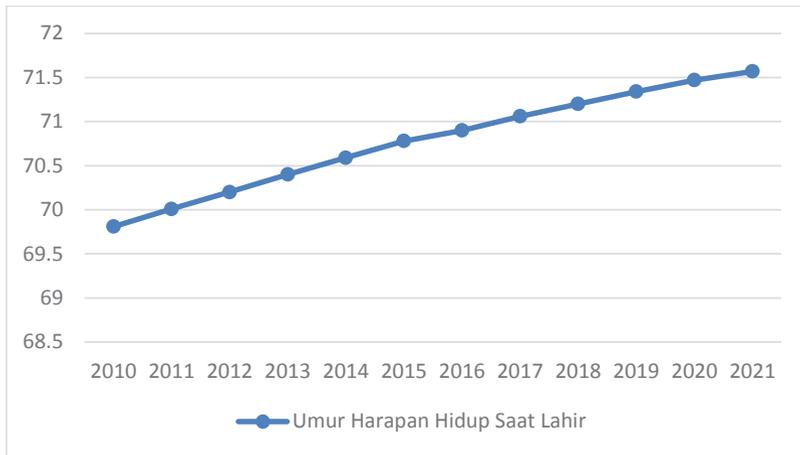


dipahami beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan penduduk dalam rangka meraih peluang kesempatan hidup tersebut, antara lain: 1) Pelayanan kesehatan, 2) Keturunan, 3) Perilaku, serta 4) Lingkungan. Sedangkan program kesehatan penduduk dapat dilakukan dengan: 1) Pembinaan gizi masyarakat, 2) Pembinaan kesehatan keluarga, 3) Pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga, 4) Dukungan manajemen, 5) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (DirjenKesmas, 2017)

Tabel 6.5 Umur Harapan Hidup Saat Lahir

Tahun	Umur Harapan Hidup Saat Lahir
2010	69,81
2011	70,01
2012	70,2
2013	70,4
2014	70,59
2015	70,78
2016	70,9
2017	71,06
2018	71,2
2019	71,34
2020	71,47
2021	71,57

Sumber: (BPS, Umur Harapan Hidup Saat Lahir, 2022)



Gambar 6.5 Umur Harapan Hidup Saat Lahir
Sumber: (BPS, Umur Harapan Hidup Saat Lahir, 2022)

6.4 Bonus Demografi Dan *Wellbeing*

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, diskusi tentang fenomena bonus demografi selalu dikaitkan dengan tiga pilar utama dalam rangka membangun penduduk yang sejahtera lahir dan batin (*wellbeing*), yaitu pendidikan, pekerjaan dan kesehatan. Gambar 6.6 menjelaskan bagaimana ketiga pilar tersebut saling melengkapi (*complementarities*) antara satu dengan lainnya dan berkelanjutan (*sustainability*) dalam menyambut, melaksanakan serta melakukan evolusi dan evaluasi datangnya fenomena bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu fenomena yang diperoleh suatu negara yang belum tentu diperoleh negara lain. Sebelum, pada masa dan setelah diperolehnya fenomena bonus demografi tersebut, diperlukan tahap persiapan, pelaksanaan serta evaluasi terhadap pendidikan, pekerjaan dan kesehatan.

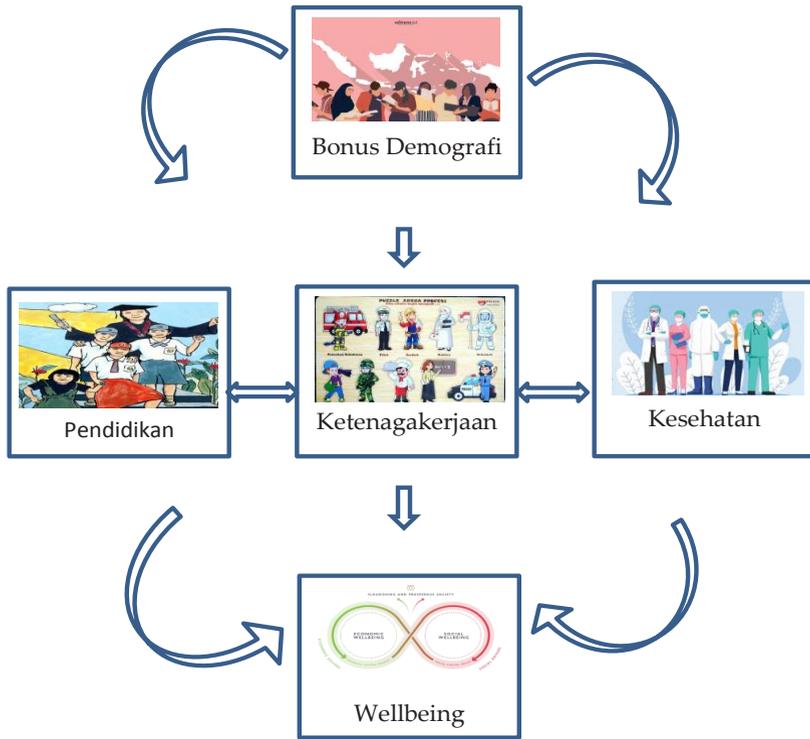
Wellbeing is not just the absence of disease or illness. It's a complex combination of a person's physical, mental, emotional and social health factors. Wellbeing is strongly linked to happiness and life satisfaction. In short, wellbeing could be described as how you feel about yourself and your life (Health, 2020). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)



menggambarkan *wellbeing* sebagai keadaan yang memungkinkan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi mereka dengan bekerja secara produktif dan kreatif, membentuk hubungan positif dengan orang lain serta memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat (Science, 2008).

Hubungan antara fenomena bonus demografi dengan *wellbeing* dapat dijelaskan dalam narasi sebagai berikut. Penduduk dengan tingkat pendidikan yang baik, yaitu mereka yang berkesempatan mengenyam tingkat pendidikan setinggi mungkin, merupakan keniscayaan dalam meningkatkan perekonomian. Sehingga kesempatan untuk mengisi setiap celah yang dibutuhkan untuk mendorong meningkatnya perekonomian terbuka luas sesuai kemampuan dan keahliannya. Jika pendidikan yang dimiliki baik, maka kesempatan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan akan terbuka luas dan penduduk tersebut memiliki kemampuan penawaran yang baik.

Peluang yang diperoleh dalam bentuk pekerjaan akan memberikan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang digunakan untuk kegiatan konsumsi, produksi dan menabung. Semakin baik tingkat pendapatan yang diperoleh, akan meningkatkan kegiatan ekonomi (penawaran dan permintaan). Salah satu produk dari bentuk kegiatan tersebut adalah produk kesehatan. Kesehatan penduduk merupakan salah satu bagian penting dalam menggerakkan ekonomi. Jika penduduk suatu negara terjamin kesehatannya, maka penduduk tersebut dapat melakukan aktifitas. Dengan aktifitas yang dilakukan akan menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan konsumsi, produksi dan menabung. Demikianlah ketiga hal tersebut secara sederhana saling melengkapi (*complementarities*), dan mengalami pengulangan (*evolution*), serta berlangsung secara terus menerus (*sustainability*) selama dunia berputar.



Gambar 6.6 Complementarities dan Sustainability Bonus Demografi dan Wellbeing
Sumber: Diolah (2022)

Tetapi ada kalanya proses tersebut mengalami kendala dan hambatan yang perlu penanganan. Kendala dan hambatan tersebut antara lain: sedikitnya jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan hingga selesai, kurangnya *hard skill* maupun *soft skill* yang dimiliki penduduk, jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak memadai, lapangan kerja yang tersedia tidak mampu mengakomodir *skill* yang dimiliki usia produktif, indeks pembangunan kesehatan penduduk yang masih relatif rendah, ketersediaan fasilitas kesehatan masih belum bisa memenuhi kebutuhan minimal penduduk, dan lain sebagainya.



Untuk mengantisipasi kendala dan hambatan tersebut, diperlukan suatu monitoring dan evaluasi terhadap ketiga pilar ini agar proses *circular* berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga mampu menggerakkan perekonomian untuk mencapai negara dengan penduduk yang sejahtera lahir dan batin (*wellbeing*).

6.5 Bonus Demografi Dan Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi (*economic empowerment*) suatu negara akan berjalan baik jika keselarasan kerja antara pemerintah dan penduduk dilakukan bersama. Pemberdayaan ekonomi secara umum dapat dijelaskan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memampukan semua sektor ekonomi yang dimiliki suatu negara (baik yang berasal dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia) agar bergerak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk secara lahir dan batin. Fenomena bonus demografi merupakan salah satu pilihan alat untuk memberdayakan ekonomi dengan 3 pilar sebagai penopang.

1. Pendidikan

- a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan
- b) Penguatan peraturan wajib belajar 12 tahun bagi seluruh penduduk Indonesia.
- c) Peran penuh Pemerintah dalam mendukung semua kegiatan serta sarana dan prasarana yang mendorong kepada peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan.
- d) Motivasi bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing, dan menekankan bahwa pendidikan itu merupakan suatu kewajiban, seumpama yang tercantum pada kata-kata bijak: tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat, dan atau tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina.

2. Pekerjaan

- a) Meningkatkan lapangan kerja .
- b) Memberikan bekal kepada pekerja dalam bentuk:
 - Pelatihan kerja dalam rangka membekali tenaga kerja/pekerja untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan,

Dengan pelatihan kerja tersebut tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh pengakuan kompetensi kerja dari Lembaga pelatihan, baik pemerintah ataupun swasta. Dimana pengakuan kompetensi kerja tersebut dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja dari badan nasional sertifikasi profesi yang independent (Kemenperin, 2022).

- a) Membangun SDM yang unggul dengan didukung oleh ekosistem politik dan ekonomi yang kondusif.
- b) Motivasi untuk selalu melakukan kegiatan sesuai dengan kata-kata bijak: Hadits tentang lebih baik bekerja dengan tangan kasar daripada meminta-minta.

3. Kesehatan

Adalah tanggung jawab Pemerintah untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Demi terwujudnya tingkat kesehatan yang tinggi maka perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan masyarakat. Diperlukan sumber daya kesehatan yang mendukung, yaitu segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dana tau masyarakat (Kemkes, 2022). Selain itu, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:



- a) Mengutamakan kampanye agar menjaga tetap sehat dibandingkan mengobati penyakit, sehingga tidak diperlukan mendirikan rumah sakit yang banyak.
- b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang memadai
- c) Menjaga kesehatan adalah menjaga apa yang telah dititipkan Allah. *Mensana in corpore sano* (dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat)

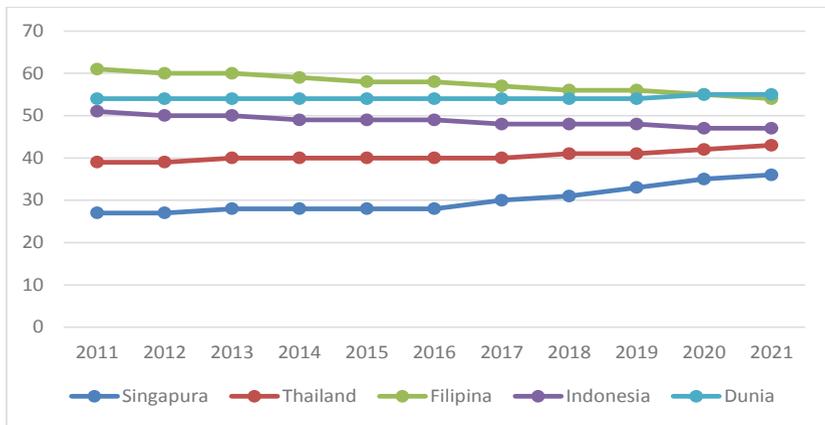
6.6 Perkembangan Bonus Demografi Di Asia Tenggara

Dari data yang dilansir oleh (WorldBank, 2022), dan dituangkan pada Gambar 6.7, terdapat 4 negara di kawasan Asia Tenggara (*Southeast Asia*) yang memiliki tingkat ketergantungan bervariasi selama sepuluh tahun terakhir. Negara Singapura memiliki rasio ketergantungan dengan tren meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2011 angka rasio ketergantungan sebesar 27 dan meningkat menjadi 36 pada tahun 2021 (WorldBank, Singapore Age Dependency Ratio, 2019). Dengan kata lain, setiap 100 penduduk Singapura dengan usia produktif pada tahun 2021 akan menanggung penduduk dengan usia non-produktif sebanyak 36 penduduk.

Demikian pula halnya dengan negara Thailand, serupa dengan negara Singapura yang memiliki angka rasio ketergantungan dengan tren meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2011 disinyalir angka rasio ketergantungan negara Thailand sebesar 39, sedangkan sepuluh tahun kemudian yaitu tahun 2021 menjadi 47 (WorldBank, Thailand Age Dependency Ratio, 2019). Ini berarti, pada tahun 2021 setiap 100 penduduk Thailand yang berusia produktif memiliki kewajiban menanggung 47 penduduk dengan usia non-produktif.

Kabar baik diberikan oleh negara Filipina dan Indonesia yang memiliki tren menurun untuk angka rasio ketergantungan selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2011, rasio ketergantungan negara Filipina berhenti di angka 61 dan menurun menjadi 54

pada tahun 2021 (WorldBank, Philippines Age Dependency Ratio, 2019). Demikian pula dengan negara Indonesia yang menunjukkan angka rasio ketergantungan 51 pada tahun 2011 dan berhenti pada angka 47 di tahun 2021 (WorldBank, Indonesia Age Dependency Ratio, 2019) Untuk angka rasio ketergantungan penduduk di dunia secara menyeluruh selama 10 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan, dimana pada tahun 2011 menunjukkan angka 54 dan menjadi 55 pada tahun 2021 (WorldBank, World Age Dependency Ratio, 2019).



Gambar 6.7 Rasio Ketergantungan (%)

Sumber: (WorldBank, 2022)

6.7 Penutup

Persiapan untuk menyambut serta mengisi fenomena bonus demografi di Indonesia harus sudah dapat dilakukan sejak awal mulainya fenomena tersebut di tahun 2015 hingga saat ini dan sampai akhirnya di tahun 2045. Hal ini perlu dilakukan agar peluang-peluang yang ada dapat diisi dan dimanfaatkan selama masa itu ada. Tiga pilar utama untuk meraihnya adalah kesempatan bagi penduduk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang mencukupi serta kesehatan yang memadai. Khususnya bagi penduduk umur produktif yang menjadi pengguna manfaat demografis, kemampuan yang perlu



dikembangkan antara lain: 1) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, 2) Mampu membentuk jaringan (*networking*) yang luas serta fasih menggunakan teknologi yang selalu kekinian, 3) Berpikir kritis untuk mendapatkan solusi yang baik, 4) Memiliki pemikiran untuk selalu maju (*growth mindset*), serta 5) Mampu berinovasi dan memiliki kreatifitas yang tinggi. Dengan demikian, bergeraknya ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik dapat dicapai.

Daftar Pustaka

- Setiawan, E. (2022, March 6). *Bonus Demografi*. Retrieved from KBBI Web site: <https://kbbi.web.id/>
- Kominfo. (2014). *Siapa Mau Bonus ? Peluang Demografi Indonesia*. Jakarta: Kominfo.
- Sekjend. (2021, October 25). *Menaker Yakin Indonesia Bakal Raih Bonus Demografi dan Jadi Negara Maju*. Retrieved from Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia: <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-yakin-indonesia-bakal-raih-bonus-demografi-dan-jadi-negara-maju>
- Worldometer. (2022, March 6). *World Population*. Retrieved from Worldometer Web Site: [https://www.worldometers.info/world-population/#:~:text=The%20current%20world%20population%20is,currently%20living\)%20of%20the%20world.](https://www.worldometers.info/world-population/#:~:text=The%20current%20world%20population%20is,currently%20living)%20of%20the%20world.)
- BPS. (2022, February 12). *Indeks Pembangunan Manusia*. Retrieved from BPS Web site: <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- BPS. (2022, February 12). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Web site: <https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>
- Wijatnika. (2020, December 20). *Wellbeing vs Welfare*. Retrieved from Monev Studio: <https://www.monevstudio.org/wellbeing-sejahtera-dan-bahagia#:~:text=Wellbeing%20mencakup%20>

kesejahteraan%20lahir%20dan,pandang%20ekonomi%20dan%20pelayanan%20publik.

- Indonesia, P. (2022, March 5). *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional* . Retrieved from pmpk.kemdikbud: https://pmpk.kemdikbud.go.id/assets/docs/UU_2003_No_20_-_Sistem_Pendidikan_Nasional.pdf
- KBBI. (2022, March 5). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved from Pendidikan: <https://kbbi.web.id/didik>
- UNFPA. (2016, May 5). *Demographic Dividend*. Retrieved from United Nations Population Fund Web Site: <https://www.unfpa.org/demographic-dividend#readmore-expand>
- BPS. (2022, March 17). Retrieved from Kependudukan: <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>
- Kemenperin. (2022, March 10). *Ketenagakerjaan*. Retrieved from kemenperin.go.id: https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf
- KBBI. (2022, March 12). *Tenaga Kerja*. Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tenaga%20kerja>
- BPS. (2022, February 24). *Tenaga Kerja*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Web site: <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1>
- BPS. (2022, March 12). *Tenaga Kerja*. Retrieved from BPS Web site: <https://www.bps.go.id/statistictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2021.html>
- BPS. (2022, March 12). *Tenaga Kerja*. Retrieved from BPS Web site: <https://www.bps.go.id/statistictable/2016/04/04/1904/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008--2021.html>
- Kemkes. (2022, February 12). *Kesehatan*. Retrieved from Kemkes Web site: https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf
- KBBI. (2022, February 12). *Kesehatan*. Retrieved from KBBI Web site: <https://kbbi.web.id/sehat>



- DirjenKesmas. (2017, October 4). Pendekatan Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2018. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.
- Maryam, A. (2020, October 22). *Ilmu Kesehatan Masyarakat Lanjut*. Retrieved from pascasarjana.uit: <https://pascasarjana.uit.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Bahan-Ajar-KesMas.pdf>
- BPS. (2020, March 17). Retrieved from Badan Pusat Statistik Web site: <https://www.bps.go.id/indicator/26/414/1/-metode-baru-umur-harapan-hidup-saat-lahir-uhh-.html>
- BPS. (2022, March 17). *Umur Harapan Hidup Saat Lahir*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Web site: <https://www.bps.go.id/indicator/26/414/1/-metode-baru-umur-harapan-hidup-saat-lahir-uhh-.html>
- Dwi, H. J., & Muhammad, A. R. (2021, January 21). *databoks*. Retrieved from Usia Produktif Kian Mendominasi Penduduk Indonesia: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/22/usia-produktif-kian-mendominasi-penduduk-indonesia>
- Health, B. (2020, May 27). *Wellbeing*. Retrieved from Better Health Web site: <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/wellbeing#where-to-get-help>
- Science, G. O. (2008, October 22). *Research and analysis Mental capital and wellbeing: Making the most of ourselves in the 21st century*. Retrieved from GOV.UK Web site: <https://www.gov.uk/government/publications/mental-capital-and-wellbeing-making-the-most-of-ourselves-in-the-21st-century>
- WorldBank. (2022, October 4). *Age Dependency Ratio*. Retrieved from The World Bank Web site: <https://data.worldbank.org/indicator>
- WorldBank. (2019, October 4). *Singapore Age Dependency Ratio*. Retrieved from The World Bank Web site: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND?locations=SG>
- WorldBank. (2019, October 4). *Thailand Age Dependency Ratio*. Retrieved from The World Bank Web site: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND?locations=TH>
- WorldBank. (2019, October 4). *Indonesia Age Dependency Ratio*. Retrieved from The World Bank Web site: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND?locations=ID>



- WorldBank. (2019, October 4). *Philippines Age Dependency Ratio*. Retrieved from The World Bank Web site: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND?locations=PH>
- WorldBank. (2019, October 4). *World Age Dependency Ratio*. Retrieved from The World Bank Web site: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND>

BAB

7

DAMPAK DAN SOLUSI PANDEMI TERHADAP DISTORSI TRANSISI DEMOGRAFI DAN FILANTROPI

Sari Lestari Zainal Ridho Dan Eddy Gunawan

7.1 Pendahuluan

Transisi demografi seringkali diterjemahkan sebagai keadaan penduduk dari pertumbuhan penduduk rendah dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang tinggi menuju pertumbuhan penduduk yang rendah dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang rendah. Sebelum pandemi, keadaan ini dialami Indonesia sebagai progress dari upaya mengurangi jumlah penduduk. Namun kini Indonesia tengah berjuang di tengah pandemi, keberadaan pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebuah distorsi dari proses panjang transisi demografi yang telah diupayakan terjadi di Indonesia sebagai bagian dari program mengatasi permasalahan kependudukan karena mengakibatkan perubahan pola fertilitas dan mortalitas. Meskipun perubahan perubahan yang terjadi bukanlah suatu perubahan yang besar dan hanya berjangka pendek, sehingga ada yang menggunakan fenomena mortalitas yang terjadi dengan istilah *short term mortality* (Meyerowitz-Katz et al., 2021), namun memiliki dampak yang tidak dapat diabaikan, dan dampaknya bagi penduduk secara umum dan penduduk dengan klasifikasi anak di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I, Pasal 1, Ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi serupa diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Anak merupakan modal manusia jangka panjang bagi suatu negara, dan di Indonesia jumlahnya juga cukup banyak, dimana 1/3 dari penduduknya merupakan penduduk dengan usia 0-17 tahun, yang merupakan penduduk dalam kategori anak (Windiarto et al., 2019).

Terkait dengan penduduk anak, menurut data dari UNICEF Indonesia, sejak pandemi bermula di Indonesia telah lebih dari 25.000 anak kehilangan orang tua akibat Covid-19 (Karana, 2021). Sedangkan berdasarkan data dari satgas penanganan COVID-19, dari situs resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia, per 20 Juli 2021, diperoleh informasi bahwa terdapat 11.045 anak telah menjadi yatim piatu, yatim atau piatu (Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). Tentunya kehilangan orang tua karena peningkatan tingkat mortalitas akibat Covid-19, sebagai bentuk distorsi transisi demografi, memiliki dampak secara sosial kependudukan.

Karena itu, tujuan dari Bab ini adalah menelaah mengapa pandemi merupakan suatu distorsi transisi demografi dan bagaimana uraian dampak serta solusinya dari sudut pandang sosial kependudukan.

7.2 Dampak

Fertilitas dan mortalitas merupakan diantara cara yang diperlukan untuk mengendalikan jumlah penduduk. Dinamisasi fertilitas dan mortalitas selama pandemi Covid-19 merupakan distorsi dari transisi demografi dikarenakan terjadinya perubahan pola fertilitas dan mortalitas selama pandemi merubah pola fertilitas dan mortalitas yang diharapkan yaitu penduduk dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang rendah.



7.2.1 Fertilitas

Fertilitas dalam pengertian demografi dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang lahir hidup (Mahendra, 2019). Pada kondisi transisi demografi penurunan jumlah kelahiran (fertilitas) merupakan kondisi yang seharusnya terjadi. Namun, selama pandemi, jumlah kelahiran ini diprediksi akan mengalami kenaikan yang memungkinkan terjadinya baby boom, yang merupakan ledakan jumlah kelahiran akibat Covid-19 (Fuadi & Irdalisa, 2020; Mahendra, 2019; Widiastuti et al., 2021). Apabila keadaan tersebut berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama, tentu angka kelahiran akan meningkat dan menjadi distorsi dalam demografi (Puspa, 2020b)

Distorsi atau gangguan ini, jika terus terjadi, selanjutnya dapat mengganggu atau mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Terbatasnya akses kesehatan tidak hanya pada layanan kesehatan yang mengiringi jumlah kehamilan yang meningkat, memungkinkan terjadinya mekanisme dimana ibu-ibu dengan kehamilannya tidak memperoleh masukan gizi yang diperlukan. Skenario lainnya yaitu bayi-bayi yang dilahirkan, para orang tuanya tidak memperoleh akses imunisasi yang seharusnya mereka dapatkan (Puspa, 2020a).

Berbagai kajian terdahulu menganalisis penyebab meningkatnya jumlah kelahiran selama pandemi, tentu asumsi ini menggunakan asumsi kondisi *anomaly*, yang berbeda dengan faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas jika pada kondisi normal (Mahendra, 2019). Beberapa penelitian terdahulu menyepakati bahwa yang menjadi pemicu terjadinya lonjakan fertilitas selama pandemi Covid-19 adalah berkurangnya akses terhadap layanan kesehatan, terutama terhadap layanan program perencanaan keluarga sebagai akibat dari berkurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan (Chairani, 2020; Ertiana & Wulandari, 2021; Fuadi & Irdalisa, 2020; Herawati et al., 2020; Tapscoot, 2009; Widiastuti et al., 2021; Yusita et al., 2020).

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terjadi penurunan jumlah layanan kesehatan reproduksi sebagaimana ditampilkan pada Tabel 7.1. Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 7.1, terjadi penurunan jumlah capaian peserta KB sebanyak 196524 atau sekitar 12,08% di tahun 2020, jika dibanding capaian di tahun 2019. Tidak hanya capaian peserta KB, pelayanan KB selama periode Januari sampai dengan April 2020 juga mengalami penurunan sebesar 1179467, jika dibandingkan tahun 2019 (Mardiya, 2020).

Tabel 7.1 Data Layanan Kesehatan Reproduksi

No	Tahun	Capaian Peserta KB
1	2019	1823223
2	2020	1626699

Sumber:(Mardiya, 2020)

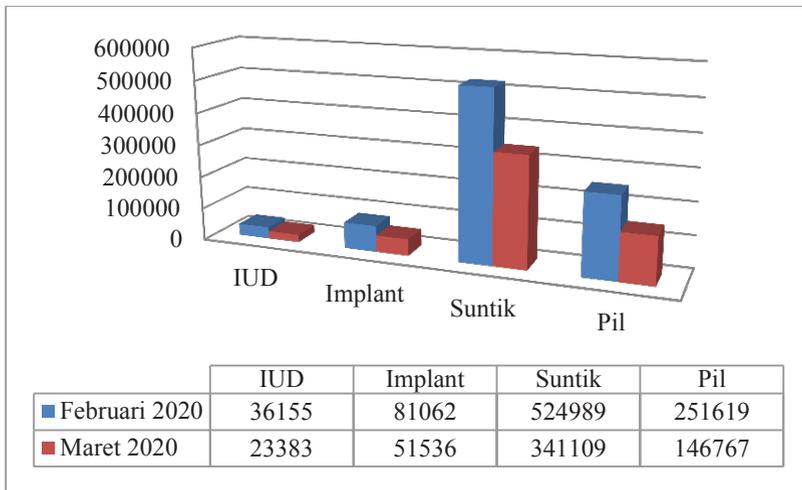
Selain capaian peserta KB dan pelayanan KB, kesadaran penggunaan penunda atau penjaga jarak kehamilan juga mengalami penurunan Data BKKBN menunjukkan adanya penurunan penggunaan kontrasepsi di Bulan Maret 2020 jika dibandingkan penggunaannya di Bulan Februari 2020. Penurunan tersebut terjadi secara nasional pada periode yang sama, yaitu mengalami penurunan sekitar 35% - 47% (Mardiya, 2020).

Adanya penurunan pengguna layanan jasa kontrasepsi seperti dipaparkan menunjukkan berkurangnya pengguna kontrasepsi selama periode awal terjadinya pandemic di Indonesia. Hal ini membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Karena sebagaimana disebutkan sebelumnya kebutuhan menjaga kesehatan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga jumlah kelahiran dan kematian.

Masih dalam periode yang sama, secara detail disampaikan penurunan peserta KB terlihat dari perubahan pemakaian beragam alat kontrasepsi sebagaimana ditampilkan pada Gambar 7.1. Jika dibandingkan penggunaan di Bulan Februari dan Maret 2020, pemakaian IUD di Bulan Februari sebanyak 36155, turun menjadi 23383 di Bulan Maret. Pemakaian implant di Bulan Februari

sebanyak 81062 menjadi 51536 di Bulan Maret. Pemakaian suntik dari 524989 di Bulan Februari turun menjadi 341109 dan Penggunaan pil dari 251619 turun menjadi 146767 (Puspa, 2020c).

Penelitian lainnya melihat fenomena kemunculan baby boomer selama pandemi dapat dikelompokkan dari 2 (dua) persepektif, yaitu demografi dan sosiologi. Dimana secara demografis, kemunculan *baby boomer* didorong oleh faktor geografis dan struktur kependudukan, berupa kepadatan penduduk dan ketenagakerjaan. Sehingga untuk menghindari mobilitas penduduk, pada saat pembatasan sosial berskala besar banyak penduduk dan atau pekerja yang harus dirumahkan (Suswandari et al., 2021).



Gambar 7.1: Data Penggunaan Alat Kontrasepsi

Sumber: BKKBN, 2020 (Puspa, 2020c)

7.2.2 Mortalitas

Mortalitas atau kematian merupakan peristiwa yang mengakhiri proses kehidupan, kehilangan nyawa dalam suatu organisme biologis (Fuadi & Irdalisa, 2020). Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kematian terjadi ketika seseorang telah mengalami terlebih dahulu keadaan hidup (Ilpaj

& Nurwati, 2020). Mortalitas yang diharapkan rendah dalam kerangka konsep transisi demografi, justru mengalami pola kenaikan di Indonesia. Yogyakarta misalnya, melaporkan bahwa terdapat 10 kematian dari 105 ibu hamil yang meninggal akibat Covid-19 berdasarkan data per Agustus 2021 (Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021)

Distorsi transisi demografi tersebut, menimbulkan dampak dari sudut pandang sosial, termasuk kependudukan. Tidak sedikitnya jumlah kematian yang terjadi akibat Covid-19, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, menggunakan data yang dirilis UNICEF Indonesia dalam situs resminya, menyatakan bahwa Covid-19 telah menyebabkan lebih dari 25.000 anak telah kehilangan orang tuanya. Dari sejumlah anak yang kehilangan orang tua tersebut, sebagian besar kehilangan ayah, yaitu sebanyak 57%, dan sebanyak 37% kehilangan ibu, serta sekitar 5% kehilangan kedua orang tuanya. Lebih lanjut data dari UNICEF Indonesia tersebut memetakan bahwa mayoritas dari anak-anak tersebut diasuh oleh anggota keluarga perempuan, dan lainnya sebanyak 114 anak tidak menerima pendampingan ataupun pengasuhan dari orang dewasa (Karana, 2021).

Informasi lain berhasil dikumpulkan dan diketahui dari sejumlah anak – anak yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur, per Agustus 2021, diketahui bahwa terdapat 166 anak yang saat ini kehilangan orangtua karena Covid-19, diantaranya mayoritas, yaitu 89 anak menjadi yatim, 58 anak menjadi piatu dan 12 anak menjadi yatim piatu. Sementara itu, di belahan Indonesia bagian lain yaitu Yogyakarta, teridentifikasi 142 anak yang kehilangan orangtuanya akibat Covid-19, berdasarkan pemetaan dari angka tersebut 92 anak kehilangan ayah, 31 anak kehilangan Ibu dan sisanya sebanyak 19 anak kehilangan kedua orang tuanya (Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).

Dampak lanjutan dari kematian atau kehilangan orangtuanya, merujuk dari pemetaan UNICEF Indonesia (Karana, 2021), adalah:



- a) Anak-anak yang masih bayi dan anak usia muda dari keluarga berpendapatan rendah. Anak-anak dengan kriteria tersebut di atas, berisiko dalam tumbuh kembang, korban penelantaran, kekerasan dan eksploitasi. Risiko lain adalah beban ekonomi yang dialami orang tua yang masih ada atau pengasuh pengganti dapat meningkatkan risiko anak-anak tersebut, terutama perempuan dan remaja, mengalami putus sekolah.
- b) Anak-anak yang menjadi yatim piatu, serta kehilangan pengasuhan. Anak-anak dengan kriteria tersebut di atas berisiko mengalami konsekuensi negatif berupa kemiskinan dan penempatan di lembaga pengasuhan.

7.3 Solusi

Lembaga filantropi, khususnya filantropi Islam yang bertujuan menyeimbangkan kesejahteraan di masyarakat dan menghindari eksploitasi ekonomi diharapkan menjadi solusi yang dapat mengatasi dampak negatif dari terjadinya distorsi transisi demografi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya terkait dampak perubahan pola mortalitas, bahwa peningkatan kematian dari orang tua yang meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah, berdampak pada tumbuh kembang, risiko beban ekonomi dimana salah satu konsekuensi negatifnya adalah kemiskinan serta risiko mengalami putus sekolah.

Berdasarkan *Q.S. At-Taubah:60*, zakat itu ditujukan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT. Zakat infak shadaqah merupakan komponen/instrumen dari Islamic Social Financial (Beik, 2019; Obaidullah & Shirazi, 2017) yang penyalurannya diupayakan untuk optimal untuk menyeimbangkan kesejahteraan di masyarakat dan menghapuskan economic exploitation, sesuai dengan Maqasid Sharia. Maqasid

Sharia berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan manusia secara komprehensif, sejalan dengan *sustainable development goals* (Hardiana, 2009).

Pada Tabel 7.2 ditampilkan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial, UNICEF, dan Lembaga Filantopi Islam (Islamic Social Finance Institution). Pertama, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah melakukan beberapa tindakan berupa tanggapan terhadap permasalahan bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat COVID-19 selain melakukan upaya pendataan. Selain itu Kementerian Sosial memberikan *support* bagi permasalahan tersebut dengan menjalankan program Asistensi Rehabilitasi Sosial atau yang disingkat dengan ATENSI yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa bantuan obat-obatan, vitamin, vaksinasi termasuk memberikan konseling kepada anak-anak dan keluarganya.

Tabel 7.2 Upaya Perlindungan pada Anak yang kehilangan orang tuanya Akibat Covid-19

Kementerian Sosial	UNICEF	Filantropi Islam
1. Pendataan dan respon kasus	1. Identifikasi berkelanjutan	1. Bantuan langsung tunai
2. Asistensi Rehabilitasi Sosial	2. Memperkuat peran keluarga	2. Pendampingan bantuan modal bagi keluarga besar
3. Mereunifikasi anak dengan keluarga besarnya	3. Memperluas cakupan perlindungan sosial	pengasuh anak, melalui skema pembiayaan syariah termasuk pembiayaan <i>qardul hasan</i>
4. Memfasilitasi pengasuhan alternatif	4. Pemantauan berkala	3. memfasilitasi pengasuhan alternatif, <i>foster care</i>
5. Membantu keluarga besar dalam kesulitan pengasuhan anak		
6. Membantu aksesibilitas kebutuhan lainnya		

Sumber: (Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021; Iskandar et al., 2021; Karana, 2021; Sari et al., 2021)



Kementrian Sosial juga mempersatukan kembali anak dengan keluarga besarnya dan memfasilitasi pengasuhan alternatif melalui pengasuhan orang tua asuh dan pengasuhan anak melalui panti-panti, sebagai upaya mencegah anak kehilangan hak pengasuhannya. Kementrian Sosial juga membantu keluarga besar anak untuk mengatasi kesulitan dalam mengasuh anak dan berusaha memberikan dukungan aksesibilitas kebutuhan anak lainnya.

Kementerian Sosial, dalam upaya ini berencana melibatkan kerjasama antar lembaga atau instansi terkait seperti lembaga non pemerintahan dan sektor pemerintahan yang bertanggungjawab dalam penanganan permasalahan tersebut. Upaya- upaya tersebut di atas merupakan kewajiban Pemerintah melalui Kementerian Sosial sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berikutnya adalah UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*). Badan ini memberikan dukungan kepada pemerintah dalam fungsinya untuk melindungi anak-anak yang terdampak Covid-19, tidak hanya mendukung upaya pemerintah namun juga para mitra yang bersama sama berupaya melindungi anak-anak terdampak Covid-19 tersebut. Diantara upaya yang dilakukan UNICEF adalah: pertama, melakukan identifikasi secara berkelanjutan terhadap anak-anak yang kehilangan orang tuanyanya akibat Covid-19. Upaya ini kurang lebih sama atau serupa dengan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan pendataan terhadap anak anak terdampak, karena langkah ini bisa disepakati sebagai langkah awal yang perlu dilakukan dalam merencanakan dan mengimplementasi

program yang perlu dilakukan, berupa pengumpulan data dan identifikasi masalah.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh UNICEF, bahwa terhitung sejak pandemi dimulai kurang lebih 25430 anak telah kehilangan ayahnya, atau ibunya atau kehilangan keduanya, ayah dan ibu. Jika dinilai dari segi jumlah, tidak sedikit anak yang kehilangan orang tuanya. Sekitar kurang lebih 14495 anak kehilangan ayah, kurang lebih 9409 anak kehilangan ibunya dan kurang lebih 1272 anak kehilangan kedua orang tuanya, sebagaimana terlampir pada Tabel 7.3. Jumlah yang terdata tersebut bukanlah jumlah yang dapat dikatakan sedikit.

Kedua, UNICEF berupaya menguatkan peran keluarga. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan anak-anak yang kehilangan orang tuanyanya akibat Covid-19, tetap diasuh oleh keluarga mereka. Ketiga, memperluas cakupan perlindungan sosial. Usaha ini terkait dengan upaya sebelumnya, perluasan cakupan perlindungan sosial dilakukan agar turut meliputi anggota keluarga di luar keluarga ini yang mengasuh anak yang kehilangan orang tuanya akibat Covid-19 tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari terciptanya beban (baik materil dan nonmateril) bagi keluarga yang mengasuh anak-anak yang kehilangan orang tuanya tadi, sehingga anak-anak tersebut dapat melanjutkan hidupnya termasuk bersekolah, terutama perempuan dan atau anak-anak perempuan yang sering kali rentan ketika menghadapi pilihan prioritas terkait keterbatasan ekonomi.

Keempat, UNICEF juga melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan kesejahteraan anak-anak tersebut termasuk dalam hal pengasuhan yang mereka alami, sebagai upaya memastikan bahwa anak-anak tersebut selalu berada dalam kondisi aman dan terlindungi serta memastikan mereka memiliki akses ke berbagai layanan yang dibutuhkan bagi anak-anak.



**Tabel 7.3 Data Kehilangan Orang Tua Akibat COVID-19
Per 30 September 2021**

No.	Kehilangan Orang Tua	Presentase (%)	Jumlah anak
1	Kehilangan Ayah	± 57	± 14495
2	Kehilangan Ibu	± 37	± 9409
3	Kehilangan Ayah & Ibu	± 5	± 1272

Sumber: UNICEF, 2021(Karana, 2021)

Lembaga berikutnya yang berupaya menanggulangi pemasalahan yang dihadapi oleh orang tuanya akibat pandemi Covid-19 adalah lembaga filantropi Islam atau *Islamic Social Finance Institution*. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh lembaga filantropi Islam adalah: pertama memberikan bantuan tunai langsung. Bantuan tunai langsung kepada anak-anak terdampak merupakan program yang sejalan dengan apa yang sudah dicanangkan sebagai agenda kegiatan suatu lembaga keuangan sosial (filantropi) Islam, yaitu memberikan bantuan untuk kegiatan konsumtif dalam bentuk bantuan tunai, yang bersumber dari zakat, infaq, dan shadaqah. Tentu syarat ketentuan berlaku bagi siapa yang dapat menerima bantuan keuangan jika bersumber dari zakat, yaitu 8 asnaf yang tertulis dalam Q.S. Attaubah ayat 60.

Lembaga filantropi Islam juga membantu anak anak yang menghadapi kematian kedua orang tuanya akibat Covid-19, dengan cara melakukan pendampingan bantuan modal bagi keluarga besar pengasuh anak melalui skema pembiayaan syariah termasuk pembiayaan *qardul hasan*. *Qardul hasan* disebut juga dana kebajikan, sering juga disebut dengan pinjaman kebajikan, yang sumber dananya diantaranya berasal dari zakat, infaq, shadaqah (Sukma et al., 2019; Suryadi & Putri, 2018).

Qardul hasan dapat didefinisikan sebagai pinjaman, dapat juga diinterpretasikan sebagai sumbangan (Falikhhatun et al., 2016). Kegiatan ini merupakan penyaluran dana untuk kegiatan yang produktif. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sebelumnya, yaitu memastikan anak anak

yang mengalami kehilangan orang tuanya, tetap diasuh oleh keluarga mereka. Namun, pengasuhan tersebut atau penambahan jumlah anggota keluarga tidak menjadi beban ekonomi, yang memungkinkan anak-anak rentan dalam tumbuh kembangnya.

Agenda selanjutnya dari Filantropi Islam dalam menanggulangi permasalahan anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat Pandemi Covid-19 adalah memfasilitasi pengasuhan alternatif, *foster care*. Hal ini tentunya dilakukan setelah memastikan anak-anak tersebut tidak dimungkinkan untuk diasuh oleh keluarganya sendiri. Selain karena anak-anak yatim piatu yang mengalami kemiskinan merupakan salah satu kelompok yang berhak menerima zakat, memelihara dan atau menyayangi anak yatim dalam Islam, memiliki keutamaan berupa kebaikan dan janji atas surga. Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran (QS. Al-Baqarah, Surat Al-Fajr, Surat Al-Maun dan Surat Ad-Dhuha) bahwa memelihara anak yatim merupakan sesuatu yang baik.

“Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik,” (QS. Al-Baqarah [2]: 220).

“Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: “Tuhanku menghinakanku”. Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim” (QS. Al-Fajr [89]: 16-17).

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.” (QS. Al-Maun [107]:1-2).

“Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu),” (QS. Ad-Dhuha [93]:6)

Tidak hanya membawa kebaikan, tapi juga janji atas surga, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Keutamaan memelihara anak yatim adalah akan dimasukkan ke surga bagi orang-orang yang melakukannya. Selama orang tersebut tidak melakukan dosa yang tidak dapat diampuni.



“Demi Yang Mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraannya dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. (HR. Thabrani dari Abu Hurairah). (Imam Ath-Thabrani, Al-Mu’jam Al-Ausath, VIII/346. Hadist no. 8828).

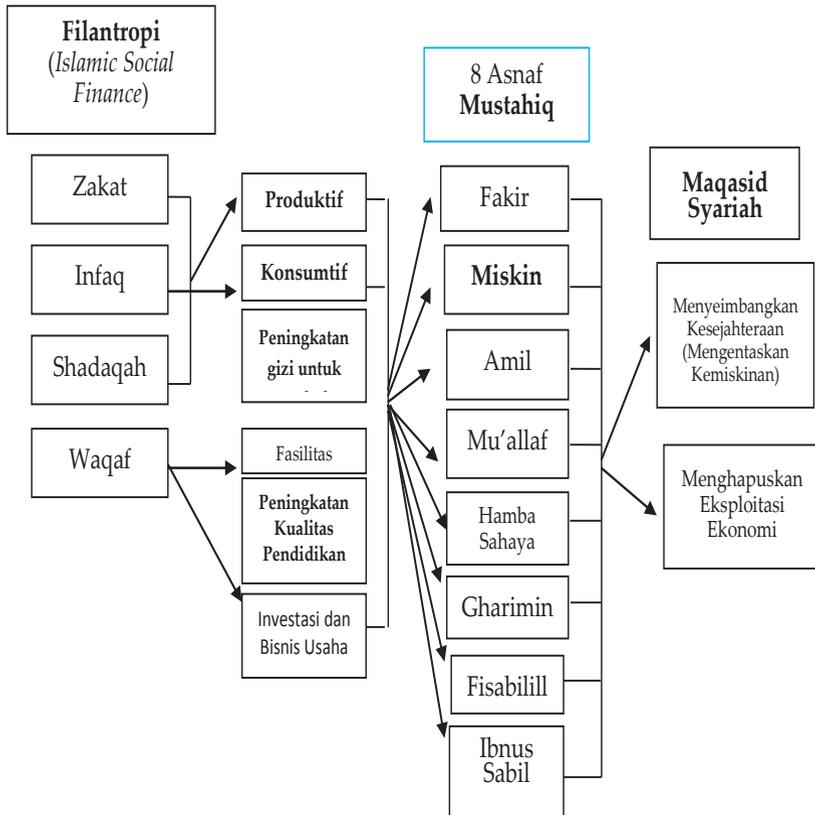
Masih terdapat beberapa keutamaan lagi bagi muslim yang menyayangi, menyantuni dan atau memelihara anak yatim. Hal ini menjadi motivasi bagi para pengelola filantropi Islam yang menjalankan organisasinya dengan program memberikan bantuan, santunan dan memelihara anak-anak yatim, termasuk anak-anak yang yatim piatu, kehilangan kedua orang tuanya akibat pandemi Covid-19 dengan memberikan pengasuhan alternatif *foster care*.

7.4 Penutup

Distorsi transisi demografi berupa perubahan pola tingkat fertilitas dan mortalitas yang terjadi selama pandemi menimbulkan dampak dalam bidang kependudukan diantaranya pada penduduk anak di Indonesia, dalam bentuk dampak terhadap tumbuh kembang, dampak terhadap peningkatan beban ekonomi atau kemiskinan, dan dampak berupa putus sekolah. Berdasarkan kajian pada penelitian ini dampak-dampak yang timbul dapat diselesaikan melalui peran dari lembaga filantropi termasuk lembaga filantropi Islam melalui optimalisasi perannya sebagaimana model kebijakan yang diusulkan dalam kajian ini, yaitu: penggunaan Islamic social financial berupa zakat, infaq, dan shadaqoh dengan cara menyalurkannya kepada para mustahik melalui kegiatan baik konsumtif maupun produktif.

Pertama, kegiatan produktif seperti bantuan bagi anak putus sekolah, yang juga dapat secara tidak langsung mengurangi beban ekonomi, menghindari terciptanya kemiskinan. Kedua, secara langsung bantuan juga dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif, termasuk bantuan pemenuhan tumbuh kembang termasuk bantuan bahan/barang konsumsi untuk pemenuhan gizi anak. Lebih lanjut diharapkan dukungan dari para pemangku

kepentingan untuk tetap mendukung dan meningkatkan dukungannya dalam implementasi solusi tersebut baik secara moril maupun materil secara berkelanjutan, seperti dalam pembuatan kebijakan pendampingan pembiayaan dengan skema *qardul al hasan*. Sehingga permasalahan yang ada akan dapat ditanggulangi secara berjamaah dalam jangka panjang.



Gambar 7.2 Model Pengembangan Optimalisasi Filantropi/ Lembaga Keuangan Sosial Islam



Daftar Pustaka

- Beik, I. S. (2019). *Islamic Social Finance Islamic Social Finance (ISF) Its emergence : The Milestones Components of ISF ISF as Pillar of Islamic Economy*. October.
- Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Perlindungan Anak yang Kehilangan Orangtua Akibat Covid-19*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://kemensos.go.id/perlindungan-anak-yang-kehilangan-orangtua-akibat-Covid-19>
- Chairani, I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2902, 39. <https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.571>
- Ertiana, D., & Wulandari, W. (2021). *Motivasi Ibu Untuk Melakukan Kunjungan Ulang Suntik KB 3 Bulan Pada Saat Pandemi Covid-19*. 10(2).
- Falikhatun, Assegaff, Y. U., & Hasim. (2016). Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(1), 94–103.
- <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/152/pdf>
- Fuadi, T. M., & Irdalisa. (2020). Covid 19: Antara Angka Kematian dan Angka Kelahiran. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(3), 199–211.
- <https://doi.org/10.22373/jsai.v1i3.767>
- Hardiana, M. D. (2009). *Innovative Islamic Social Finance*. ISEF. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_3097
- Herawati, D., Fitriana Rosyada, D., Dian Pratiwi, R., & Neni Wigati, E. (2020). Family Planning Services by Mandiri Midwife Practices in Yogyakarta During the Pandemic Period of Covid-19. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 11(2), 123–135. <https://doi.org/10.26553/jikm.2020.11.2.123-135>

- Ilpaj, S. M., & Nurwati, N. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Indonesia. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28123>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2021). *Global COVID - 19 : What Islamic Economic and Finance Can Do ?* 6(2), 119–134.
- Karana, K. P. (2021). 25.000 Anak Kehilangan Orang Tua Akibat COVID-19. UNICEF Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/indonesia-sejak-pandemi-dimulai-lebih-dari-25000-anak-kehilangan-orang-tua-akibat#:~:text=JAKARTA%2C> 30 September 2021 – Terhitung, tua mereka akibat COVID-19.
- Mahendra, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fertilitas Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 3(2), 223–242. <https://doi.org/10.54367/jrak.v3i2.448>
- Mardiya. (2020). *Pesan untuk PUS di Era New Normal*. <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1129/pus-di-era-normal-baru>
- Meyerowitz-Katz, G., Bhatt, S., Ratmann, O., Brauner, J. M., Flaxman, S., Mishra, S., Sharma, M., Mindermann, S., Bradley, V., Vollmer, M., Merone, L., & Yamey, G. (2021). Is the cure really worse than the disease? The health impacts of lockdowns during COVID-19. *BMJ Global Health*, 6(8), 1–6. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-006653>
- Obaidullah, M., & Shirazi, N. S. (2017). Irti islamic social finance report 2017 (1438h). *ResearchGate*, 2017(October 2017), 1–105. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26825.44645>
- Puspa, A. (2020a). Atasi Ancaman Baby Boom. *Mediaindonesia.Com*. <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/310521/atasi-ancaman-baby-boom>
- Puspa, A. (2020b). Covid-19 Turunkan Angka Partisipasi KB, Ancam Bonus Demografi. *Mediaindonesia.Com*. <https://>



mediaindonesia.com/humaniora/309889/Covid-19-turunkan-angka-partisipasi-kb-ancam-bonus-demografi.html

- Puspa, A. (2020c). Pandemi Covid-19 Bisa Picu Baby Boom. *Mediaindonesia.Com*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/309951/pandemi-Covid-19-bisa-picu-baby-boom>
- Sari, F. N., Burasukma, M., & Nursolihah, S. (2021). *The Role of Islamic Sosial Finance Through Ziswaf and BMT during The COVID-19 Pademic*. 5(2), 81–98.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>
- Suryadi, N., & Putri, Y. R. (2018). Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(1), 37–50. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(1\).2043](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(1).2043)
- Suswandari, M., Guru, P., Veteran, S. D., Nusantara, B., Veteran, P. G., & Nusantara, B. (2021). *Baby Boom dalam Perspektif Demografis dan Sosiologis*. 13(1), 76–87.
- Tapscoot, D. (2009). *Grown up digital: how the net generation is changing your world*. Mc Graw Hill. <https://doi.org/10.5860/choice.47-3242>
- Widiastuti, N. M. R., Widiantari, K., & Agustina, N. K. T. (2021). Pendidikan Kontrasepsi Pada Wanita Pasangan Usia Subur Sebagai Upaya Antisipasi Baby Bomming Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pasca Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kecamatan Kuta Utara. *Lontara Abdimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 80–83. <https://doi.org/10.53861/lomas.v2i2.247>
- Windiarto, T., Yusuf, A. H., Nugroho, S., Latifah, S., Solih, R., & Hermawati, F. (2019). Profil Anak Indonesia Tahun 2019.



In *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)*. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/15242-profil-anak-indonesia_-2019.pdf

Yusita, I., Noprianty, R., Kurniawati, R. D., Rofiasari, L., & Anriani, A. (2020). Pendampingan wanita pasangan usia subur dalam penggunaan kontrasepsi sebagai upaya menekan baby booms di masa pandemi covid 19. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 2(Desember), 59–64.

BAB



STUNTING DAN PEMBANGUNAN SDM

Nurlina T. Muhyiddin dan Neneng Miskiyah

8.1 Pendahuluan

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan tubuh dan otak anak yang disebabkan asupan makanan ibu kurang bergizi selama kehamilan. Pemenuhan gizi yang tidak memadai selama 1000 hari pertama kelahiran, juga menyebabkan anak mengalami stunting. Pemenuhan gizi dimaksud adalah untuk mencegah terjadinya infeksi yang berulang. Balita (bayi di bawah lima tahun) yang menderita stunting membuat kemampuan kognitifnya tidak berkembang maksimal dan akan berakibat buruk pada kualitas SDM (sumber daya manusia) di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu penanganan yang baik dimulai sejak janin berada dalam kandungan.

Sebuah negara tidak mampu bersaing dengan negara lain dalam menghadapi tantangan global jika sebagian penduduknya terperangkap kasus stunting. Stunting akan menurunkan tingkat produktivitas dan pendapatan bangsa di masa depan. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah Indonesia mencanangkan program terintegrasi yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga, antara lain kemenkes, kemensos, BKKBN, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) tingkat Kota dan Kabupaten. Diharapkan kerjasama ini dapat menekan angka stunting turun sampai 40% pada tahun 2025 (Kementerian Kesehatan, 2018) dapat dicapai.

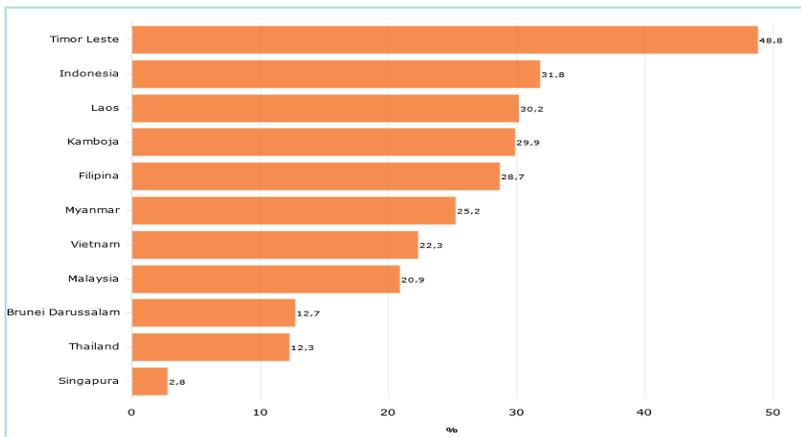
Program terintegrasi tersebut hendaknya didukung keluarga penderita stunting saat ini untuk melakukan berbagai langkah dan perubahan sikap dan perilaku untuk menuju arah hidup yang lebih sehat. Diharapkan dengan perubahan ini target SDGs (*Social Development Goals*) dapat dicapai melalui peningkatan *capital aset*, terutama aset modal manusia (*human capital*).

8.2. Stunting Di Indonesia Dan Negara Lainnya

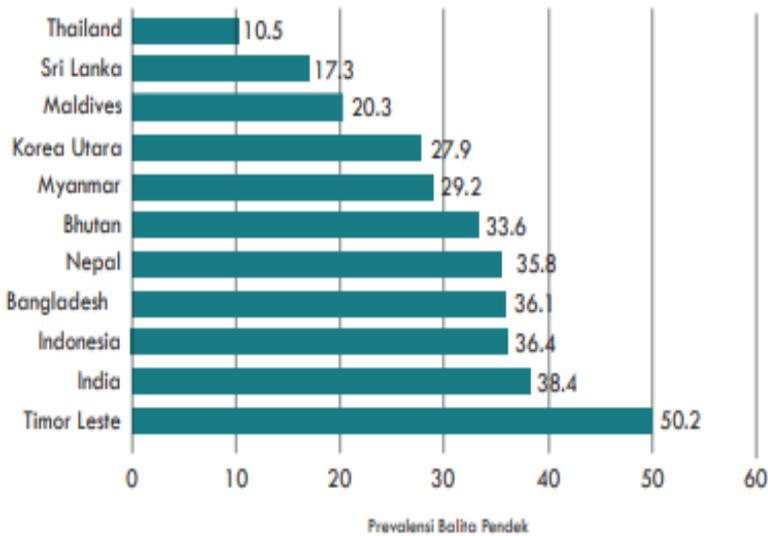
8.2.1 Profil Stunting Indonesia dan Negara Asia Tenggara

Berdasarkan Global Nutrition Report pada 2018, prevalensi stunting Indonesia berada pada peringkat ke-108 dari 132 negara. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara prevalensi stunting Indonesia tertinggi kedua setelah Kamboja. UNICEF (2017) melaporkan prevalensi Indonesia terbesar kedua di Asia Tenggara dengan nilai 36,4 dan hanya di bawah Laos 43,8. Tahun 2020, prevalensi stunting Indonesia seperti yang dilaporkan ADB (*Asian Development Bank*) adalah 31,8 tertinggi kedua di Asia Tenggara (Gambar 8.1). Angka 31,8 masih masih di atas ambang batas yang ditetapkan WHO yakni 20%.

Ciri fisik penderita stunting adalah memiliki badan yang pendek. Di antara negara Asia Tenggara, jumlah balita Indonesia yang berbadan pendek mencapai 36,4% lebih tinggi dari Timor Leste 50,2% dan India 38,4% (WHO, 2018) (Gambar 8.2).



Gambar 8.1 Prevalensi Stunting di Negara Asia Tenggara



Gambar 8.2 Prevalensi Balita Pendek Asia Tenggara 2005-2017

Sumber: Pusat Data Informasi, Kementerian Kesehatan RI, 2018

8.2.2 Profil Stunting Tiap Provinsi di Indonesia

Tabel 8.1 memperlihatkan balita dengan tubuh yang pendek dan sangat pendek di tiap Provinsi di Indonesia tahun 2016 dan tahun 2018. Tidak terdapat pola profil yang pasti di setiap Provinsi. Ada Provinsi dimana balita pendek dan sangat pendek mengalami persentase yang menurun pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2016, namun ada sebaliknya. Seperti kasus di Provinsi Sumatera Selatan balita pendek dan sangat pendek pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016, sedangkan di DKI Jakarta mengalami penurunan.

Provinsi dimana persentase balita badan pendek dan sangat pendek yang mengalami peningkatan, bermakna balita tersebut dilahirkan oleh remaja dengan gizi buruk. Sebaliknya, provinsi dengan persentase balita badan pendek dan sangat pendek yang menurun dapat diduga remaja yang menikah adalah remaja dengan gizi yang sudah cukup baik, sehingga remaja tersebut dapat melahirkan anak dengan kecukupan gizi. Tabel 8.2 menunjukkan kondisi Balita di masing-masing kabupaten-

kota di Sumatera Selatan. Balita pendek dan sangat pendek pada tahun 2018 mencapai 31,7% dan angka ini masih di atas ambang batas yang ditetapkan WHO 20%. Kabupaten Lahat dan Ogan Ilir merupakan wilayah yang terbanyak balita pendek dan sangat pendek.

8.3 Cara Atau Tindakan Menghindari Stunting

Untuk menghindari stunting, seorang ibu harus memahami hal-hal sebagai berikut, antara lain:

8.3.1 Pengetahuan tentang GIZI

Seorang ibu harus memiliki pengetahuan tentang asupan nutrisi yang baik, sehingga janin sejak dalam kandungan sudah menerima asupan makanan yang bergizi. Setelah lahir, seorang ibu memiliki tanggung jawab yang besar untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada masa bayi umur 0-2 tahun harus diberikan ASI Eksklusif dan makanan pendamping ASI (MPASI) yang berkualitas.

Seorang ibu juga harus mengetahui dan memahami bahwa konsumsi alkohol harus dihindari selama masa kehamilan dan masa menyusui, apalagi jika alkohol dikonsumsi secara berlebihan. Kondisi ini disebut sindrom alkohol janin (*fetus alcohol syndrome*) yang akan menyebabkan bayi menderita stunting.

Tabel 8.1 Balita Pendek-Sangat Pendek di Indonesia

Provinsi	Balita Pendek (%)		Sangat Pendek (%)	
	2016	2018	2016	2018
Indonesia	19,97	19,3	8,57	11,5
Aceh	18,84	21,1	7,56	16,0
Sumatera Utara	15,1	19,2	9,34	13,2
Sumatera Barat	18,88	20,3	6,66	9,6
Riau	17,75	17,1	7,32	10,3
Jambi	18,5	16,8	8,5	13,4
Sumatera Selatan	14,58	17,2	4,66	14,4
Bengkulu	16,35	18,2	6,61	9,8



Lampung	18,19	17,7	6,59	9,6
Bangka Belitung	15,7	16,1	6,22	7,3
Kep, Riau	15,64	15,1	7,21	8,5
DKI Jakarta	13,78	11,5	6,28	6,10
Jawa Barat	19,0	19,4	6,13	11,7
Jawa Tengah	17,78	20,1	6,09	11,2
DI Yogyakarta	17,1	15,1	4,74	6,3
Jawa Timur	18,62	19,9	7,51	12,9
Banten	18,9	17,0	8,09	9,6
Bali	14,48	16,3	5,22	5,6
NTB	21,66	24,3	8,31	9,2
NTT	23,72	26,7	15,03	16,0
Kalbar	22,99	21,9	11,94	11,4
KalTeng	22,91	21,3	11,2	12,7
KalSel	21,31	21,1	9,82	12,0
KalTim	19,92	19,0	7,22	10,2
KalUtara	21,31	20,1	10,29	6,8
SULUT	14,42	15,7	6,79	9,8
SULTENG	21,85	20,4	10,19	11,9
SULSEL	25,87	23,2	9,73	12,5
SULTengara	20,64	18,6	8,93	10,1
Gorontalo	21,5	19,8	11,54	12,7
SULBAR	25,02	25,4	14,69	16,2
Maluku	16,65	21,5	10,3	12,5
Maluku Utara	19,72	20,4	8,2	11,0
Papua Barat	18,83	16,1	11,45	11,7

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/30/1325/1/persentase-balita-pendek-dan-sangat-pendek.html>

Tabel 8.2 Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek Kabupaten-Kota di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten-Kota	Balita Pendek dan Sangat Pendek
	Sumatera Selatan	31,7
1	Ogan Komering Ulu	33,2
2	Ogan Komering Ilir	30,6
3	Muara Enim	34,4
4	Lahat	48,1
5	Musi Rawas	34,6
6	Musi Banyuasin	31,1
7	Banyu Asin	29,3
8	Ogan Komering Ulu Selatan	26,4
9	Ogan Komering Ulu Timur	27,2
10	Ogan Ilir	43,9
11	Empat Lawang	36,0
12	Penukal Abab Lematang Ilir	39,5
13	Musi Rawas Utara	33,2
14	Kota Palembang	25,9
15	Kota Prabumulih	26,2
16	Kota Pagar Alam	31,9
17	Kota Lubuklinggau	32,0

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/30/1531/1/prevalensi-balita-sangat-pendek-dan-pendek-menurut-kabupaten-kota-tahun-2018.html>

8.3.2 Pemahaman tentang Infeksi Berulang

Bayi membutuhkan energi dan asupan makanan yang bergizi, jika tidak maka akan terjadi penyakit infeksi yang berulang. Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih banyak untuk melawan penyakit. Tindakan ini memerlukan biaya dan menghabiskan waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Faktor penyebab rendahnya perawatan dan pemberian makanan bergizi pada anak sangat terkait dengan pendidikan dan pengetahuan ibu. Dengan demikian, ibu atau calon ibu sangat perlu memahami factor kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan.



8.3.3 Pemahaman Kesehatan Sebelum & Sesudah Melahirkan

Pemahaman masalah kesehatan hendaknya dimulai ketika seseorang calon ibu akan melangkah ke pernikahan. Usia kehamilan ibu yang terlalu muda, di bawah 20 tahun, beresiko BBLR, bayi dengan berat lahir rendah, dan akan mempengaruhi terjadinya stunting kurang lebih 20%.

Pasca melahirkan, seorang ibu harus memperhitungkan jarak kelahiran berikutnya. Jarak kelahiran yang demikian dekat akan beresiko terhadap kesehatan bayi berikutnya. Hal ini disebabkan perhatian akan terbagi terutama dan pemberian ASI Eksklusif dan MPASI (makanan pendamping ASI). Tidak saja ibu hamil dengan umur terlalu muda dan jarak kelahiran terlalu dekat, umur melahirkan yang terlalu tua dan terlalu sering melahirkan juga beresiko terjadinya stunting.

8.4 Pendidikan Ibu, Kesejahteraan Keluarga, Dan Fasilitas Kesehatan

Cara menghindari stunting yang dibicarakan pada sesi di atas berkaitan dengan pendidikan ibu/orang tua, kesejahteraan keluarga dan akses terhadap fasilitas kesehatan.

8.4.1 Pendidikan Ibu

Penelitian di wilayah kerja Puskesmas Kandanghaur, Kabupaten Indramayu menunjukkan persentase balita menderita stunting lebih tinggi pada ibu berpendidikan rendah dibandingkan ibu berpendidikan tinggi (Tabel 8.3). Ibu yang berpendidikan SMP ke atas memiliki kejadian stunting lebih kecil dibandingkan ibu dengan tingkat pendidikan rendah (SD dan tidak sekolah) (Husnaniyah, dkk, 2020). Ibu yang memiliki pendidikan \geq SMP cenderung lebih baik dalam pola asuh anak serta lebih baik dalam pemilihan dan penentuan jenis makanan yang dibutuhkan anak, Selain itu juga, Ibu yang berpendidikan \geq SMP memiliki peluang lebih besar dalam mengakses informasi sehingga pengetahuan ibu meningkat mengenai gizi dan kesehatan anak.

Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah kerja Puskesmas Way Urang, Kabupaten Lampung Selatan (Sutarto dkk, 2020)

bahwa ibu dengan tingkat pendidikan rendah memiliki balita stunting sebesar 79,6%, sedangkan 20,4% balita stunting dimiliki oleh ibu dengan tingkat pendidikan tinggi (Tabel 8.4).

Namun seringkali terjadi kontradiksi dengan temuan di atas. Stunting dapat juga terjadi pada seorang ibu berpendidikan tinggi seperti yang ditemukan oleh Maywita dan Putri (2019) di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang tahun 2019 (Tabel 8.5). Faktor penyebabnya antara lain:

- a) Ibu pendidikan tinggi terlalu sibuk dengan urusan publik, sehingga urusan domestik diabaikan. Seperti kurang memiliki waktu luang untuk pemberian ASI eksklusif.
- b) MPASI (makanan pendamping ASI) yang diberikan tidak sesuai dengan usia balita, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Tabel 8.3 Pendidikan Ibu dan Kejadian Stunting Wilayah Kerja Puskesmas Kandanghaur, Kabupaten Indramayu 2019

Pendidikan	Stunting (%)	Tidak Stunting (%)	(n)
Tidak Sekolah	37,5	62,5	16
SD	50,0	50,0	134
SMP	33,3	66,7	90
SMA	23,0	77,0	61
PT	28,6	71,6	7
Total	38,6	61,4	308

Sumber: Husnaniyah dkk, 2020

Tabel 8.4 Pendidikan Ibu dan Kejadian Stunting Wilayah Kerja Puskesmas Way Urang, Kabupaten Lampung Selatan 2020

Pendidikan	Stunting (%)	Normal (%)	Total (%)
Rendah	79,6	55,1	67,3
Tinggi	20,4	44,9	32,7
(n)	49	49	98

Sumber: Sutarto dkk, 2020



Tabel 8.5 Pendidikan Ibu dan Kejadian Stunting di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang 2019

Pendidikan	Stunting (%)	Normal (%)	Total (%)
Rendah	30,0	20,8	25,4
Tinggi	70,0	79,2	74,6
(n)	130	130	260

Sumber: Maywita dan Putri, 2019

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan ibu yang rendah merupakan faktor risiko terjadinya keterlambatan perkembangan anak. Ibu dengan tingkat pendidikan yang rendah, kurang memberikan stimulasi dibandingkan dengan ibu pendidikan tinggi. Ariani dan Yosoprawoto (2012) menyatakan bahwa pola asuh kepada anak, perilaku hidup sehat, ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua terutama ibu.

Pendidikan dimaksud bukan saja pendidikan formal Ibu tetapi juga pengetahuan tentang kesehatan dan gizi. Menurut Chandra (2020) kurangnya pendidikan kesehatan dan gizi menyebabkan masyarakat lebih mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan.

Orang tua yang paham dan sadar gizi akan selalu memberikan makanan bergizi bukan makanan yang hanya memberikan rasa kenyang. Pengetahuan dan kesadaran tentang gizi tidak bisa diperoleh secara instan, namun melalui proses yang cukup panjang, oleh karena itu pendidikan kesehatan dan gizi harus diberikan sejak dini, misalnya melalui penyuluhan, kelompok PKK, Posyandu, media cetak, media elektronik, dan sosial media.

8.4.2 Kesejahteraan Keluarga

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi,

selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Secara umum kesejahteraan keluarga dapat diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan agar dapat hidup layak, sehat, dan produktif. Berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, ada faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting yaitu:

- a) Faktor lingkungan prenatal dan lingkungan postnatal. Faktor lingkungan prenatal merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi anak pada waktu masih dalam kandungan. Sementara faktor lingkungan postnatal adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak setelah lahir.
- b) Faktor sosial ekonomi. Pengaruh faktor ini sangat besar terhadap kejadian stunting. Faktor sosial meliputi: pendidikan orangtua dan pekerjaan orangtua yang memberikan kontribusi terhadap tumbuh kembang anak mulai dari dalam kandungan hingga usia emas balita. Faktor ekonomi berkaitan dengan pendapatan orangtua dan pengeluaran konsumsi terutama konsumsi pangan. Pendapatan yang kurang berimbas pada ketidak mampuan orang tua memberikan makanan yang berfungsi untuk tumbuh kembang anak yang bersumber dari protein, vitamin, dan mineral sehingga meningkatkan risiko kurang gizi dan mengalami stunting.

Terbatasnya pendapatan orangtua menyebabkan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kondisi ini mengkategorikan keluarga tersebut miskin. Kemiskinan mengakibatkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dengan kuantitas dan kualitas yang baik, apalagi untuk memenuhi kebutuhan pangan: 4 sehat 5 sempurna. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa anak dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah cenderung berisiko stunting (Semba RD, dkk 2008; Lee J 2012) (Schrijner S:2018).



8.4.3 Akses terhadap Fasilitas Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Aksesibilitas masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya kesehatan, termasuk di dalamnya hal untuk mendapatkan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan (Laksono, 2016).

Pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pola hidup sehat dan mencegah terjadinya permasalahan kesehatan masyarakat atau penyakit. Sedangkan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif berorientasi pada penyembuhan dan pengobatan suatu penyakit serta mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa (1) pelayanan kesehatan perseorangan; dan (2) pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara jenis fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat terdiri atas:

- a) Tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan,
- b) Pusat kesehatan masyarakat,
- c) Klinik,
- d) Rumah sakit,
- e) Apotek,
- f) Unit transfuse darah,
- g) Laboratorium kesehatan,
- h) Optikal,
- i) Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum,
- j) Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional

Akses pelayanan seringkali dilihat hanya sebatas pemberian pelayanan saja, terkadang akses masyarakat seringkali kurang diperhatikan. Terlebih lagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggal di daerah terpencil atau letak geografis yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan akan semakin kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Beberapa daerah masih banyak kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan seharusnya dilihat dari dua sisi yaitu masyarakat dan pemberi layanan kesehatan.

Indikator pengetahuan akses ke fasilitas kesehatan diukur dengan menggunakan beberapa pertanyaan di tingkat rumah tangga. Dalam Riskesdas 2018 (Kementerian Kesehatan, 2018), indikator dianalisis menggunakan metode *Principal Component Analysis (PCA)* yang dibangun dengan 3 (tiga) dimensi, yaitu (1) jenis alat transportasi yang digunakan ke fasilitas kesehatan; (2) waktu tempuh pulang pergi dari rumah ke fasilitas kesehatan, dan (3) biaya yang dikeluarkan untuk transportasi pulang pergi ke fasilitas kesehatan. Pada Riskesdas 2018, ada 3 (tiga) jenis akses pelayanan kesehatan yang dihitung yaitu (1) akses ke fasilitas Rumah Sakit; (2) akses ke fasilitas Puskesmas/ Pustu/Pusling/Bidan Desa; dan (3) akses ke fasilitas Klinik, praktek Dokter, praktek Dokter Gigi dan praktek Bidan Mandiri.

Berikut Tabel 8.6 menunjukkan proporsi pengetahuan rumah tangga terhadap kemudahan akses ke fasilitas kesehatan. Ternyata lokasi tempat tinggal di perdesaan, dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga rendah dan jenis pekerjaan yang tergolong kedalam kelompok petani, nelayan, dan buruh/sopir/pembantu rumah tangga, **mengalami kesulitan** dalam mengakses fasilitas kesehatan menunjukkan persentase yang besar.

Upaya peningkatan akses dapat dilakukan melalui pemenuhan tenaga kesehatan, peningkatan sarana pelayanan primer seperti Puskesmas, klinik, dokter praktek mandiri, pemenuhan prasarana pendukung seperti alat kesehatan, obat-

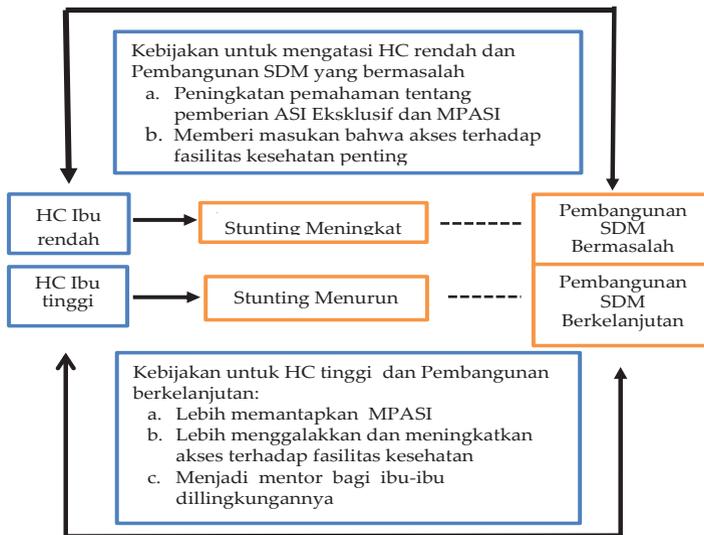


obatan terutama untuk pelayanan di daerah terpencil dan sangat terpencil.

8.5 Stunting, Human Capital, Pembangunan Kependudukan

Dari analisa di atas, dapat diinventarisir bahwa terjadinya stunting karena faktor modal manusia (*human capital*) yang lemah, seperti ibu yang berpendidikan rendah, kurang memahami dalam pemberian makanan bergizi, pola pemberian makanan yang salah, keluarga yang tidak sejahtera, serta akses terhadap fasilitas kesehatan yang rendah. Tidak dinafikan tidak semua keluarga bercirikan hal seperti di atas. Kelemahan *human capital* (HC) akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan SDM. Kaitan antara stunting, *human capital* (HC) dan pembangunan SDM, dalam naskah ini dipresentasikan pada Gambar 8.3. Peran ibu, antara ibu yang memiliki *human capital* yang tinggi dan yang rendah, akan menyebabkan kebijakan untuk mengatasinya juga berbeda. Tentu kebijakan yang disarankan yang tertera pada Gambar tidak dapat berjalan tanpa kebijakan pemerintah seperti kebijakan penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan pemberian dana BLT (bantuan langsung tunai).

Hasil dari berbagai kebijakan makro pemerintah sangat berimbang pada penurunan prevalensi stunting di Indonesia yang berarti Indonesia mengalami kemajuan yang positif. Pemerintah Indonesia mencanangkan akan menurunkan prevalensi stunting serendah mungkin hingga mencapai angka $< 14\%$. Apalagi pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Permasalahan stunting menjadi salah satu yang harus diselesaikan untuk mencapai pembangunan SDM yang berkualitas, dinamis, terampil serta menguasai IPTEK.



Gambar 8.3 Hubungan stunting, *human capital* dan Pembangunan SDM.

Stunting memberi implikasi buruk terhadap pembangunan, mengurangi perkembangan daya saing SDM dan merugikan perekonomian. Kerugian ekonomi yang menurut World Bank sangat signifikan dapat mencapai 2 hingga 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun dari suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan dan langkah strategis pemerintah merupakan motor utama penggerak menuntaskan masalah stunting.

Keberhasilan pemerintah menurunkan angka stunting ditunjukkan dari data SSGBI (Survei Status Gizi Balita Indonesia) dari sebesar 30,8% pada tahun 2018 menjadi 27,67% pada tahun 2019. Demikian juga data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) tahun 2021, bahwa angka stunting mengalami penurunan relatif tajam menjadi 24,4 persen tahun 2021, turun sebesar 3,3% dari tahun 2019. Penurunan ini terjadi hampir sebagian besar provinsi dan hanya 5 provinsi yang menunjukkan kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan pemerintah mendorong percepatan penurunan stunting di Indonesia telah memberi hasil yang cukup baik. Saat ini prevalensi stunting di Indonesia masih lebih baik dari Myanmar (35%) tetapi masih lebih tinggi dari Vietnam (23%) dan Malaysia (17%).



Dampak dari keberhasilan menurunkan angka stunting saat ini adalah keberhasilan pembangunan kependudukan di masa depan, ditandai oleh:

- a) Di masa yang akan datang penduduk bertindak sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional. Penduduk berperilaku sebagai subjek pembangunan bukan hanya pembangunan.
- b) Penduduk merupakan aset untuk rumah tangganya, untuk institusi dan atau untuk organisasi yang mampu berkompetensi dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk keluarga dan untuk institusi. Sebagai aset yang bernilai, penduduk dapat melipat gandakan *outcome* dari perannya dalam perusahaan yang melebihi peran modal/peran investasi.

8.6 Penutup

Keberhasilan Pembangunan Sumber Daya Manusia harus dipersiapkan sejak dini, agar anak yang dilahirkan tidak termasuk golongan Balita Stunting yaitu balita tumbuh sehat dan fisik tumbuhkembang dengan baik. Banyak factor yang menyebabkan Balita tidak menderita Stunting, yaitu: (a) pendidikan/ pengetahuan ibu terhadap kesehatan bayi yang sudah dimulai sebelum hamil, saat hamil dan setelah persalinan dan menjaga asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan yaitu sejak janin hingga bayi umur dua sampai lima tahun (Balita), (b) ekonomi keluarga tergolong sejahtera, (c) mudah meraih akses terhadap fasilitas kesehatan, dan (e) sanitasi tempat tinggal yang baik dan sehat.

Upaya pencegahan stunting harus diprioritaskan, karena stunting akan berpengaruh terhadap produktivitas dan kompetensi anak di masa depan. Pencegahan stunting merupakan jalan keluar untuk mencapai pembangunan SDM yang berkualitas, dinamis, terampil serta menguasai IPTEK. Pencegahan stunting juga merupakan upaya untuk memanfaatkan bonus demografi yang sekarang terjadi di Indonesia.



Daftar Pustaka

- Ariani, dan Mardhani Yosoprawoto. 2012. Usia Anak dan Pendidikan Ibu sebagai Faktor Risiko Gangguan Perkembangan Anak. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, Vol. 27, No. 2, hal. 118-121.
- BPS RI. 2019. *Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (Persen) 2016-2018*.
<https://www.bps.go.id/indicator/30/1325/1/persentase-balita-pendek-dan-sangat-pendek.html>
- BPS RI. 2019. *Prevalensi Balita Sangat Pendek dan Pendek Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 (Persen)*.
<https://www.bps.go.id/indicator/30/1531/1/prevalensi-balita-sangat-pendek-dan-pendek-menurut-kabupaten-kota-tahun-2018.html>.
- Chandra, Aryu. 2020. *Epidemiologi Stunting (Cetakan 1)*. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Husnaniyah, Dedeh, Depi Yulyanti, dan Rudiansyah. 2020. Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu dengan Kejadian Stunting. *The Indonesian Journal of Health Science*, Vol. 12, No. 1, hal. 57-64.
- Jounghee Lee. 2012. Socioeconomic Disparities and The Familial Coexistence of Child Stunting and Maternal Overweight in Guatemala. *Economics and Human Biology (Elsevier)*, 10 (2012), hal. 232-241. doi:10.1016/j.ehb.2011.08.002.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Laporan Nasional RISKESDAS 2018*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Laksono, Agung Dwi, dkk. 2016. *Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Maywita, Erni dan Novia Wirna Putri. 2019. Determinan Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Ibu dengan Kejadian Stunting Bayi 6-24 Bulan. *Jurnal Human Care*, Vol. 4, No. 3, hal. 173-177.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan. Jakarta: Pusat Data dan Informasi.



- Schrijner, Sandor, dan Jeroen Smits. 2018. Grandparents and Children's Stunting in Sub-Saharan Africa. *Social Science and Medicine*. S0277-9536(18)30155-2. doi: 10.1016/j.socscimed.2018.03.037.
- Semba, Richard D, dkk. 2008. *Effect of Parental Formal Education on Risk of Child Stunting in Indonesia and Bangladesh: A Cross-Sectional Study*. www.thelancet.com, Vol. 371, hal. 322-328.
- Sutarto, dkk. 2020. Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu dan Pendapatan Keluarga dengan Kejadian Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Way Urang Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Dunia Kesmas*, Vol. 9, No. 2, hal. 256-263.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BAB

9

PERAN PEREMPUAN MENJAGA KETAHANAN EKONOMI RUMAH TANGGA DI SUMATERA BARAT

Sri Maryati

9.1 Pendahuluan

Membahas aktivitas ekonomi tidak dapat terlepas dari pembahasan mengenai aktivitas kaum perempuan, sebab kenyataannya, perempuan adalah pelaku ekonomi yang juga berperan sebagai *agent of development*, dimana perannya turut menentukan arah perkembangan perekonomian. Hal ini tidak terlepas dari jumlah dan kualitas perempuan sebagai penduduk dan pelaku ekonomi.

Partisipasi kaum perempuan dalam angkatan kerja terus meningkat. Di negara-negara dunia ketiga, khususnya negara-negara Asia, semenjak tahun 1990 terjadi peningkatan kaum perempuan dalam angkatan kerja sampai 4,3%. Tetapi kebanyakan kaum perempuan bekerja di tempat-tempat yang tidak banyak menghasilkan pendapatan, mereka terpusat di sektor pertanian sebanyak 80% atau sektor-sektor informal perkotaan 25% hingga 40%. Selain itu, kaum perempuan hampir selalu mengalami diskriminasi dalam hal perolehan imbalan dan peningkatan dalam pekerjaan (Todaro, 2011).

Meskipun demikian, peran perempuan dalam ketahanan ekonomi keluarga khususnya dan perekonomian pada umumnya tidak pernah surut. Keberdayaan perempuan di bidang ekonomi adalah salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Saat

perempuan menjadi kaum terdidik, mempunyai hak-hak kepemilikan, dan memiliki kesempatan untuk bekerja di luar rumah serta mempunyai pendapatan mandiri, menurut Todaro & Smith (2011) akan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rumah tangga atau keluarganya.

9.2 Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Pembangunan

Rumah Tangga merupakan suatu unit sosial atau kelompok-kelompok sosial terkecil dalam suatu organisasi sosial, dimana rumah tangga merupakan komponen penting dalam kelompok sosial yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi suatu negara. Apabila semua rumah tangga yang berada di dalam suatu negara memiliki tingkat kesejahteraan dalam rumah tangga maka hal ini akan mendorong pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu Negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan untuk semua penduduk di wilayah Negara yang bersangkutan.

UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyatakan Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Salah satu unsur penting yang menentukan ketahanan keluarga adalah kondisi ekonomi keluarga/rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri factor ekonomi merupakan faktor penting yang menjadi indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan keluarga/rumah tangga.

Dalam upaya mencapai kesejahteraan keluarga, kaum perempuan bukanlah pencari nafkah utama, sehingga ketika perempuan bekerja dan memperoleh penghasilan yang memadai, ia tetap berstatus "membantu suami". Kesempatan untuk membantu suami dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga bagi kaum perempuan dewasa ini semakin terbuka, mereka bekerja di sector formal maupun non formal. Harus diakui masih ada kaum perempuan yang mengalami kesulitan untuk



memasuki pasar kerja karena keterbatasan yang mereka hadapi, baik keterbatasan kualifikasi pendidikan maupun keterbatasan kemampuan dalam menjalankan fungsi produktif dan reproduksi secara bersamaan.

Ada tiga pendekatan analisis peran perempuan dalam pembangunan. yaitu, WiD (Women in Development), WaD (Women and Development), dan GaD (Gender and Development) (Mosse, 1996). *WiD approach* muncul pada awal tahun 1970an dalam publikasi Easter Boserup *tentang Women's Role in Economics Development*. Boserup menganalisis dampak perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern pada laki-laki dan perempuan. *WiD approach* sangat dipengaruhi oleh pemikiran teori modernisasi, yang menganggap bahwa keterbelakangan kaum perempuan lebih disebabkan oleh faktor individu perempuan sendiri seperti tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu melalui pendidikan yang lebih baik akan dapat meningkatkan posisi kaum perempuan dan mengintegrasikannya dalam proses pembangunan.

Pendekatan WiD ini kemudian digunakan oleh *Women's Committee of Washington DC*, dan selanjutnya banyak disuarakan oleh kaum feminist liberal Amerika (*American Liberal Feminist*), yang memberikan focus perhatian pada perlunya perubahan legal dan administratif untuk menjamin agar perempuan dapat berintegrasi dalam sistem pembangunan. Oleh karena itu, fokus WiD adalah perancangan dan penetapan desain strategi pembangunan yang dapat mengurangi kerugian perempuan di sektor produktif dan mengakhiri diskriminasi bagi kaum perempuan (Boserup, 1997).

Agenda utama program WiD adalah bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan. Asumsinya, penyebab keterbelakangan perempuan adalah karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Diskursus WiD dimulai ketika pemerintah Amerika mengeluarkan "*The Percy Amendment to the 1973 Foreign Assistance Act*" yang mencantumkan perlunya

perhatian terhadap perempuan dalam pembangunan. Amandemen tersebut kemudian mempengaruhi PBB pada tahun 1974 yang kemudian mendeklarasikan *International Decade of Women (1976-1985)*. Sejak deklarasi ini hampir serentak, pemerintah di Negara-negara Dunia Ketiga memasukkan agenda WiD ke dalam program kebijakan pembangunan.

WaD approach muncul pada pertengahan tahun 1970an yang dipengaruhi oleh *Neo Marxist Feminist Approach*. Pendekatan WaD mengasumsikan bahwa perempuan sudah berpartisipasi aktif dalam pembangunan. WAD mengadvokasikan bahwa baik wanita bekerja yang dibayar ataupun tidak dibayar sama pentingnya dalam pembangunan. Fokus utama dari pendekatan ini adalah melihat pada hubungan perempuan dalam proses pembangunan, dimana proses pembangunan sering menyebabkan marginalisasi kaum perempuan. Hal ini disebabkan adanya struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil di dalam masyarakat. Keterbelakangan kaum perempuan dianggap sebagai akibat adanya struktur yang tidak adil tersebut.

Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Menurut pendekatan WaD, partisipasi wanita dalam pembangunan akan semakin baik jika ada perubahan dalam struktur kelembagaan. dimana WAD telah menggiring kepada pergeseran dimana wanita akan semakin produktif dengan dasar korbanan sisi reproduktif dari kerja dan kehidupannya.

Gender and Deveploment (GaD) approach adalah pendekatan yang dipengaruhi oleh *Socialist Feminist Approach*. Pendekatan ini dikenal sebagai upaya pemberdayaan perempuan. Pendekatan GaD lebih melihat perempuan sebagai agen perubahan dari pada objek yang pasif dalam pembangunan. Oleh karena itu, perempuan harus mampu mengorganisir dirinya dalam proses



pembangunan. Untuk itu, pembangunan harus dilihat sebagai usaha untuk memandirikan dan membangun kekuatan internal bagi kaum perempuan.

GaD approach memandang pentingnya partisipasi negara dalam menunjang emansipasi perempuan dan negara memiliki tugas untuk menyediakan jasa sosial yang selama ini disediakan oleh perempuan secara individual seperti peralatan anak dan kesehatan. Pendekatan ini telah menghasilkan kebijakan global yang monumental bagi perjuangan kaum perempuan secara internasional, yakni dengan diterimanya secara global konvensi anti segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan yang dikenal dengan CEDAW (*Convention on the Elimination of all Form of Discrimination Against Women*).

Pendekatan GaD terkait dengan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Indonesia telah diatur berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

9.3 Ketenagakerjaan Perempuan Di Sumatera Barat

Peningkatan jumlah perempuan yang bekerja disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu terjadinya peningkatan dari penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran peningkatan didorong oleh semakin membaiknya tingkat pendidikan kaum perempuan yang didorong oleh kondisi dimana semakin besarnya jumlah masyarakat yang menerima perempuan bekerja di luar rumah. Dari sisi permintaan, tenaga kerja perempuan diperlukan dalam proses produksi seperti industri tekstil dan garmen. Sedangkan fenomena lain yang mendorong masuknya perempuan

ke lapangan pekerjaan adalah karena semakin tingginya biaya hidup jika hanya ditanggung oleh pendapatan keluarga yang rendah (ILO, 2015).

Sensus penduduk (SP) 2020 mencatat jumlah penduduk Sumatera Barat relative seimbang, perempuan ada sebanyak 2,75 juta jiwa dan penduduk laki-laki 2,79 juta jiwa berjumlah 5,53 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 2,79 juta jiwa laki-laki dan 2,75 juta jiwa perempuan. Jika dilihat dari perkembangan rasio jenis kelamin (*sex ratio*), ternyata jumlah penduduk perempuan di Sumatera Barat, secara relatif semakin berkurang. Hal ini diperlihatkan oleh semakin besarnya nilai *sex ratio* sepanjang periode sensus yang pernah dilaksanakan di Indonesia (Gambar 9.1).



Gambar 9.1. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sumatera Barat, 1971-2020

Sumber: BPS, Sumbar 2021

9.3.1 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Perempuan

Di Sumatera Barat, perempuan memegang peran yang penting dalam aspek kehidupan social budaya dan ekonomi masyarakat, hal ini didukung oleh system kekerabatan matriakhart, dimana tidak hanya memiliki akses pada aspek garis keturunan secara budaya, kaum perempuan di Sumatera Barat juga diberi kesempatan untuk memiliki asset keluarga yang lebih besar dibandingkan kaum pria, terutama untuk asset yang dimiliki secara turun temurun (*pusako tuo*). Hal inilah yang mendukung terbukanya peluang kaum perempuan Sumatera Barat untuk masuk dalam dunia kerja, khususnya pekerjaan mandiri yang memberikan peluang untuk berusaha dengan tetap memberikan curahan waktu untuk keluarga secara memadai.



Pada Tabel 9.1 dapat dilihat bahwa perempuan Sumatera Barat memiliki TKK yang cukup tinggi yakni 93,01. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang perempuan usia kerja, terdapat 93 orang yang bekerja, meskipun angka ini masih sedikit lebih rendah dibandingkan kaum lelaki yang memiliki TKK sebesar 93,21 pada tahun 2020. Dilihat dari aspek tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kaum perempuan yang tidak punya ijazah SD memiliki peluang paling besar untuk memasuki dunia kerja, hal ini mengindikasikan mereka bekerja di sector informal. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan Todaro (2011) di negara sedang berkembang yang menemukan bahwa perempuan cenderung bekerja di lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha informal karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan serta keharusan untuk membagi waktu antara bekerja di pasar kerja dan di bekerja rumah tangga di rumah. Sedangkan perempuan dengan tingkat pendidikan Universitas memiliki nilai TKK yang paling rendah, hal ini disebabkan kaum perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih selektif dalam memilih pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pendidikan dan keahliannya.

Tabel 9.1 Penduduk Bekerja dan TKK menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	Bekerja	TKK	Bekerja	TKK	Bekerja	TKK
Tidak tamat SD	204.871	95,84	151.759	97,45	356.630	96,52
SD/MI/Paket A	319.760	96,31	181.927	96,40	501.687	96,34
SLTP/Paket B	306.119	94,97	175.873	95,27	481.992	95,08
SM Umum/Paket C	334.044	90,85	223.626	92,79	557.670	91,62
SM Kejuruan	184.800	90,28	93.191	87,77	227.991	89,42
Diploma I/II/III	36.618	91,35	60.051	90,59	96.669	90,88
D4/S1/S2/S3	133.193	89,01	175.655	88,09	308.849	88,50
Total	1.519.406	93,21	1.062.082	93,01	2.581.488	93,12

Sumber: SAKERNAS Agustus 2020

Jika dilihat dari aspek umur, tampak bahwa perempuan Sumatera Barat masih tetap produktif di usia tua, hal ini diperlihatkan oleh angka TKK pada usia 65 tahun ke atas yang tinggi yakni 99,81. Angka ini memperlihatkan bahwa kaum perempuan pada usia ini hampir semuanya bekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa kaum perempuan di Sumatera Barat mampu memanfaatkan akses ke pasar kerja dengan baik, terutama untuk usaha mandiri yang pada umumnya di sector informal, dalam skala usaha rumah tangga. Hal yang sama juga terjadi pada tenaga kerja laki-laki, dimana TKK penduduk laki-laki usia 65 tahun ke atas, nilainya 99,96 (Tabel 9.2). Dari table ini tampak bahwa penduduk perempuan yang bekerja paling banyak pada kelompok 35-44 tahun, sedangkan penduduk laki-laki pada kelompok 25-34 tahun. Hal ini mengindikasikan kaum perempuan memasuki dunia kerja setelah anak-anaknya dapat ditinggalkan atau dibawa bekerja, hal ini menunjukkan perempuan tidak terlepas dari tanggungjawabnya terhadap pekerjaan domestik.

9.3.2 Pekerjaan Utama Menurut Kategori Lapangan Usaha

Dilihat dari pekerjaan utama menurut kategori lapangan usaha, tampak bahwa perempuan paling banyak bekerja pada lapangan usaha pertanian (31,28%), diikuti lapangan kerja Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (21,30%), dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,28%) serta jasa pendidikan (10,80%). Data pada Tabel 9.3 ini memperlihatkan bahwa lapangan usaha yang dimasuki oleh kaum perempuan dalam bekerja disamping lapangan usaha pertanian, yang memang masih menjadi tumpuan usaha masyarakat sebagai daerah agraris, adalah lapangan usaha yang dekat dengan peran domestik namun memberikan nilai ekonomi bagi diri dan keluarganya.



Tabel 9.2 Penduduk Bekerja dan TKK Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	Bekerja	TKK	Bekerja	TKK	Bekerja	TKK
15-19	69.987	88,51	46.381	89,03	116.271	88,71
20-24	139.531	79,48	87.988	72,93	227.519	76,81
25-34	389.607	92,41	248.203	92,60	637.810	92,48
35-44	371.988	96,13	260.826	95,62	632.814	95,92
45-54	282.251	95,98	223.636	97,03	505.890	96,44
55-64	174.303	96,25	130.320	97,94	304.623	96,97
65+	91.736	99,36	64.861	99,81	156.597	99,90
Total	1.519.406	93,21	1.962.118	93,01	2.581.488	93,12

Sumber: SAKERNAS Agustus 2020

Tingginya persentase perempuan bekerja di sektor perdagangan juga telah diungkapkan oleh Levin, (1999) dalam studinya tentang perempuan pedagang di Accra, Ghana, Afrika. Perempuan cenderung memilih bekerja ke sektor perdagangan disamping untuk menyeimbangkan tugas-tugas utama mereka dalam pekerjaan rumah tangga, sebagai ibu dalam pengasuhan anak, dan melaksanakan tugas domestic lainnya, juga untuk menambah sumber pemasukan pendapatan keluarga. Perempuan yang bekerja di sektor perdagangan di kawasan ini mencapai 60% -80%, studi ini juga memperlihatkan peranan penting perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga sangat dominan. Artinya, perempuan pedagang telah mampu menjadi penopang utama ekonomi rumah tangga mereka, baik sebagai orang tua tunggal, maupun sebagai penopang pendapatan suaminya.

Tabel 9.3 Persentase Pekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

N0	Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	39,68	31,28	36,22
2	Pertambangan dan Penggalian	2,08	0,10	1,26
3	Industri Pengolahan	8,24	11,20	0,46
4	Pengadaan Listrik, Gas dan Air Minum	0,51	0,13	0,35
5	Konstruksi	8,54	0,14	5,08
6	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	17,57	21,30	19,10
7	Transportasi dan Pergudangan	4,81	0,32	2,96
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum	4,57	11,28	7,33
9	Informasi dan Komunikasi	0,62	0,48	0,56
10	Jasa Keuangan, Asuransi dan Real Estate	0,99	0,83	0,92
11	Jasa Perusahaan	0,81	0,64	0,74
12	Jaminan Sosial Wajib	5,14	4,43	4,86
13	Jasa Pendidikan	2,84	10,80	6,12
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	3,46	1,86
15	Jasa lainnya	2,88	3,61	3,18
	Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: SAKERNAS Agustus 2020

Kajian terhadap perempuan Minangkabau yang berusaha di lapangan usaha perdagangan khususnya komoditi ekspor yang dilakukan oleh Zusmelia (2012) menunjukkan bahwa jiwa *entrepreneurship* kaum perempuan di Minangkabau diturunkan dari orang tua (*family enterprise*) sebanyak 71,92%, lebih dominan ibu yang telah terlebih dahulu terjun sebagai pedagang (*one man enterprise*). Kemudian jiwa *entrepreneurship* itu berkembang menjadi milik keluarga besar (*extended family*) yang diperlihatkan oleh cukup dominannya keluarga besar seperti saudara, paman, nenek yang dahulu adalah pedagang, dan saat ini masih diteruskan oleh generasi sesudahnya sebanyak 38,70%. Temuan ini sejalan dengan yang dikemukakan Khan 1980, yang menemukan bahwa kaum perempuan memasuki sunia usaha lebih berorientasi pada aspek "kecukupan." Artinya, *entrepreneurship* yang dimulai dari usaha individual yang dirintis oleh perempuan di tengah keluarga,



kemudian akan menjadi cikal bakal lahirnya usaha dagang keluarga, apabila kemudian hari telah pula mengikutkan anggota keluarga dari *extended family*, maka inilah yang kemudian berkembang menjadi *small enterprise*, yang oleh Khan (1980) disebut dengan *petty commodity* yang sudah berorintasi pasar dimana dalam hubungan produksi telah menunjukkan adanya gejala eksploitasi surplus usaha melalui ikatan kekerabatan dan hubungan sosial antar pekerja.

9.3.3 Peran Pendapatan Perempuan Dalam Perekonomian

Dari aktivitas produktif yang dilakukan oleh kaum perempuan yang bekerja di Sumatera Barat, tampak bahwa adanya peningkatan peran kaum perempuan dalam perekonomian. Hal dapat dilihat dari kontribusi pendapatan kaum perempuan dalam perekonomian daerah yang cenderung meningkat sepanjang periode 2010-2018, dengan pertumbuhan rata-rata pertahun 9,72% (Tabel 9.4)

Peningkatan kontribusi paling tinggi pertumbuhannya dicapai oleh kaum perempuan di daerah Kota Pariaman (13,82%), kemudian daerah lain yang memiliki pertumbuhan tinggi yakni di atas 10% adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai (12,20%), Kabupaten Solok Selatan (12,07%) dan Kabupaten Lima Puluh Kota (11,90%), Kota Solok (11,17%). Kota Padang (10,21%) dan Kota Payakumbuh (10,09%). Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang kerja dan usaha di Sumatera Barat bagi kaum perempuan terus tumbuh dan berkembang.

Tidak hanya disektor informal, keterlibatan kaum perempuan dalam aktivitas ekonomi sector formal juga mengalami peningkatan di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan hampir di seluruh Kota/Kabupaten, dengan pertumbuhan sebesar 1,45% pada tahun 2018 hingga tahun 2019 (Tabel 9.5). Hal ini mengindikasikan bahwa peran kaum perempuan dalam sektor publik juga semakin meningkat yang juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas kaum perempuan, karena spesifikasi pendidikan untuk masuk lapangan kerja ini sangat jelas dan terukur.

Dari aspek pengeluaran perkapita yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin (Rupiah/Orang/Tahun), yang merupakan indikator ekonomi dalam pengukuran IPM berbasis gender, tampak bahwa pengeluaran kaum perempuan di Sumatera Barat relatif lebih kecil dibandingkan kaum laki-laki. Akan tetapi jika dilihat dari laju pertumbuhan secara rata-rata ternyata laju Pertumbuhan pengeluaran kaum perempuan lebih tinggi, yakni sebesar 2,85% rata-rata/tahun sedangkan kaum laki-laki sebesar 1,40% rata-rata/tahun pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan kesejahteraan kaum perempuan pada periode ini. (Gambar 9.2)

Tabel 9.4 Sumbangan Pendapatan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2018 (Persen)

Wilayah	Tahun		Pertumbuhan Rata-rata
	2010	2018	
Sumatera Barat (Provinsi)	34,16	37,48	9,72
Kab. Kepulauan Mentawai	27,63	31,00	12,20
Kab. Pesisir Selatan	32,46	34,02	4,81
Kab. Solok	36,14	39,20	8,47
Kab. Sijunjung	27,27	28,40	4,14
Kab. Tanah Datar	31,51	33,52	6,38
Kab. Padang Pariaman	30,43	31,21	2,56
Kab. Agam	36,92	38,85	5,23
Kab. Lima Puluh Kota	25,46	28,49	11,90
Kab. Pasaman	35,64	38,39	7,72
Kab. Solok Selatan	32,57	36,50	12,07
Kab. Dharmasraya	24,65	26,89	9,09
Kab. Pasaman Barat	36,06	36,47	1,14
Kota Padang	31,33	34,53	10,21
Kota Solok	32,60	36,24	11,17
Kota Sawahlunto	26,53	28,05	5,73
Kota Padang Panjang	44,83	46,63	4,02
Kota Bukittinggi	37,74	37,43	-0,82
Kota Payakumbuh	34,69	38,19	10,09
Kota Pariaman	27,28	31,05	13,82

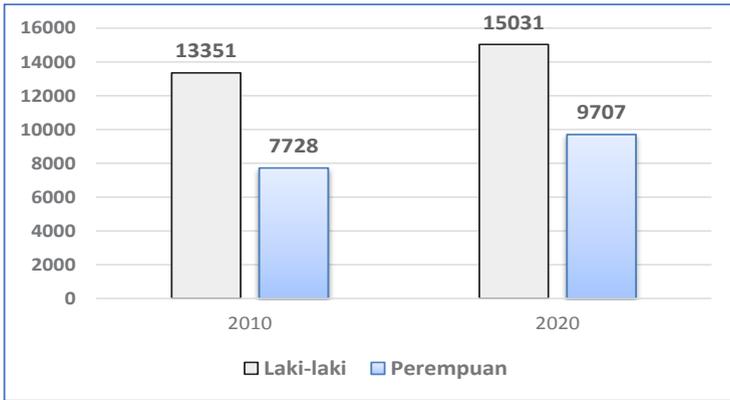
Sumber: BPS Sumbar, 2021



Tabel 9.5 Jumlah dan Persentase Pegawai Negeri Sipil Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

Wilayah	Jumlah PNS Perempuan (Jiwa)		Persentase PNS Perempuan (Persen)	
	2018	2019	2018	2019
Kab. Kepulauan Mentawai	1.167	1.291	49	50
Kab. Pesisir Selatan	4.450	4.455	65	66
Kab. Solok	3.871	3.727	70	66
Kab. Sijunjung	2.459	2.522	63	65
Kab. Tanah Datar	3.914	3.933	69	69
Kab. Padang Pariaman	4.593	4.585	72	72
Kab. Agam	4.562	4.571	69	70
Kab. Lima Puluh Kota	4.182	4.247	67	68
Kab. Pasaman	2.784	2.811	62	64
Kab. Solok Selatan	2.270	2.332	67	68
Kab. Dharmasraya	2.260	2.391	65	66
Kab. Pasaman Barat	3.007	3.123	66	67
Kota Padang	6.433	6.469	70	70
Kota Solok	1.347	1.370	63	63
Kota Sawahlunto	1.383	1.389	65	66
Kota Padang Panjang	1.227	1.232	61	61
Kota Bukittinggi	1.604	1.635	61	62
Kota Payakumbuh	2.041	2.071	67	67
Kota Pariaman	1.541	1.687	65	66
Jumlah	55.095	55.841	66	67
Provinsi Sumatera Barat	11.980	12.196	60	62
Seluruhnya	67.075	68.037	65	66
Pertumbuhan (%)	1,43%		1,54%	

Sumber: BPS, 2020



Gambar 9.2. Pengeluaran Perkapita Menurut Jenis Kelamin
Sumber: BPS Sumbar, 2021. Diolah.

9.3.4 Peran Kaum Perempuan Dalam Aktivitas Politik

Peningkatan keterlibatan dan peran kaum perempuan dalam aktivitas ekonomi di Sumatera Barat ternyata tidak sejalan dengan peningkatan kaum perempuan dalam politik, hal ini tampak dari menurunnya keterlibatan kaum perempuan pada periode 2010-2018 di Sumatera Barat, dengan angka rata-rata 15,40% untuk provinsi Sumatera Barat. Meskipun demikian di beberapa kabupaten/kota ada yang mengalami peningkatan, dimana peningkatan terbesar terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang (Tabel 9.6). Hal ini menunjukkan pemenuhan kuota partisipasi perempuan dalam aktivitas politik sesuai amanah UU No.2 tahun 2008 tentang partai politik masih harus terus diperjuangkan oleh organisasi politik dan semua pihak yang terkait, tentunya diiringi dengan meningkatkan kualitas kaum perempuan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Data tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Periode 2014–2019 memperlihatkan di semua Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi, kuota 30% keterwakilan kaum perempuan di parlemen belum dapat dipenuhi. Secara rata-rata keterwakilan kaum perempuan



baru mencapai 8,22%. Jika dilihat menurut daerah, Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto merupakan daerah dengan tingkat partisipasi perempuan dalam parlemen paling tinggi pada periode ini, yakni sebesar 20%. Sedangkan di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak ada keterwakilan kaum perempuan di parlemen pada periode 2014-2019. Dari data ini tercermin bahwa daerah perkotaan cenderung lebih tingkat tingkat partisipasi kaum perempuan dalam dunia politik dibandingkan di daerah perdesaan. Hal ini tidak terlepas dari akses pendidikan dan informasi serta keterbukaan dan kepercayaan masyarakat terhadap peran kaum perempuan dalam dunia politik. Secara keseluruhan tingkat partisipasi kaum perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang periode 2014-2019 diperlihatkan Tabel 9.7.

Tabel 9.6 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2018 (Persen)

Wilayah	2010	2018	Pertumbuhan Rata-rata
Sumatera Barat (Provinsi)	12,73	10,77	-15,40
Kab. Kepulauan Mentawai	0,01	0,00	-100,00
Kab. Pesisir Selatan	0,01	6,67	66600,00
Kab. Solok	2,86	8,57	199,65
Kab. Sijunjung	8,00	10,00	25,00
Kab. Tanah Datar	8,57	11,43	33,37
Kab. Padang Pariaman	8,57	5,00	-41,66
Kab. Agam	7,50	2,22	-70,40
Kab. Lima Puluh Kota	5,71	8,57	50,09
Kab. Pasaman	3,33	8,57	157,36
Kab. Solok Selatan	8,00	0,00	-100,00
Kab. Dharmasraya	4,00	4,00	0,00
Kab. Pasaman Barat	2,86	2,50	-12,59
Kota Padang	6,67	15,56	133,28
Kota Solok	5,00	5,00	0,00
Kota Sawahlunto	20,00	20,00	0,00
Kota Padang Panjang	20,00	20,00	0,00
Kota Bukittinggi	25,00	8,00	-68,00
Kota Payakumbuh	8,00	8,00	0,00
Kota Pariaman	10,00	5,00	-50,00

Sumber: BPS, 2020.

Tabel 9.7 Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Barat Periode 2014 – 2019

No	Wilayah	Anggota DPRD					
		Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Provinsi Sumatera Barat	58	89,23	7	10,77	65	100,0
2	Kabupaten Agam	44	97,78	1	2,22	45	100,0
3	Kabupaten Dharmasraya	24	96,00	1	4,00	25	100,0
4	Kabupaten Kep. Mentawai	20	100,00			20	100,0
5	Kabupaten Lima Puluh Koto	32	91,43	3	8,57	35	100,0
6	Kabupaten Padang Pariaman	38	95,00	2	5,00	40	100,0
7	Kabupaten Pasanan	33	94,29	2	5,71	35	100,0
8	Kabupaten Pasanan Barat	39	97,50	1	2,50	40	100,0
9	Kabupaten Pesisir Selatan	42	93,33	3	6,67	45	100,0
10	Kabupaten Sijunjung	27	90,00	3	10,00	30	100,0
11	Kabupaten Solok	32	91,43	3	8,57	35	100,0
12	Kabupaten Solok Selatan	25	100,00			25	100,0
13	Kabupaten Tanah Datar	33	94,29	2	5,71	35	100,0
14	Kota Bukit Tinggi	23	92,00	2	8,00	25	100,0
15	Kota Padang	38	84,44	7	15,56	45	100,0
16	Kota Padang Panjang	16	80,00	4	20,00	20	100,0
17	Kota Pariaman	19	95,00	1	5,00	20	100,0
18	Kota Payakumbuh	23	92,00	2	8,00	25	100,0
19	Kota Sawahlunto	16	80,00	4	20,00	20	100,0
20	Kota Solok	19	95,00	1	5,00	20	100,0
	Total	691	92,00	49	7,54	650	100,0

Sumber: <https://dpppa.sumbarprov.go.id>, 2021



9.4 Perempuan Dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga

9.4.1 Kajian Empiris Peran Perempuan Dalam Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga

Di Indonesia seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, perkembangan keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi secara umum dan lapangan pekerjaan khususnya, sangat berpotensi sebagai motor utama pendorong proses pemberdayaan perempuan dan transformasi sosial, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan tingkat kemiskinan. Namun demikian, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara berkembang lainnya, terutama di negara-negara yang pembangunan ekonominya masih belum maju, yang direfleksikan oleh tingkat pendapatan per kapita dan derajat dari industrialisasi yang masih relatif rendah, potensi yang dimiliki perempuan tersebut masih belum termanfaatkan secara optimal. Hal ini berbeda dengan di negara-negara maju yang perkembangan perempuan pengusaha sudah jauh lebih maju. Sinhal (2005), misalnya, menemukan pelaku usaha perempuan kurang dari 10 persen dari jumlah pengusaha di negara-negara di wilayah Asia Selatan, yang mencakup Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka, dan jumlah ini tentu sangat kecil dibandingkan yang telah dicapai di negara-negara maju yang persentasenya jauh di atas 10 persen.

Kajian pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Guner, dkk, di Barcelona menemukan bahwa dengan adanya penambahan tenaga kerja perempuan, tingkat pengangguran berkurang sebesar 0,3% di kalangan angkatan kerja perempuan. Studi Giannakopoulos (2015) di Yunani menemukan perempuan kawin di wilayah ini meningkatkan penawaran tenaga kerjanya ketika suaminya kehilangan pekerjaan sebagai dampak krisis yang terjadi, akan tetapi penambahan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Hal ini diperlihatkan oleh perbedaan peningkatan tingkat pengangguran yang terjadi dengan tingkat penambahan tenaga kerja, dimana peningkatan tenaga kerja laki-laki dimasa krisis lebih tinggi dari pada peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan, meskipun

di dalam jangka pendek (data bulanan) respon penawaran tenaga kerja perempuan kawin cukup besar namun di dalam jangka panjang (data tahunan) cenderung menurun.

Ortega (2015) menemukan bahwa penawaran tenaga kerja perempuan sebagai akibat suami kehilangan pekerjaan lebih besar terjadi di kawasan perkotaan dari pada kawasan perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa guncangan akibat krisis lebih besar dirasakan oleh masyarakat perkotaan dari pada masyarakat di perdesaan. Sedangkan studi di Jerman yang dilakukan oleh tim peneliti dari DIW SOEP, Berlin di tahun yang sama, menemukan bahwa probabilitas penambahan penawaran tenaga kerja perempuan kawin lebih tinggi terjadi pada individu yang memiliki pasangan kehilangan pekerjaan dari pada individu yang memiliki pasangan bekerja.

Dari beberapa hasil kajian di atas tampak bahwa peran perempuan dalam mempertahankan kondisi dan ketahanan ekonomi keluarganya sangat penting dan terbukti secara empiris di berbagai Negara.

9.4.2 Peran Perempuan Dalam Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga di Sumatera Barat

Di Sumatera Barat telah banyak dilakukan kajian terhadap peran perempuan dalam keluarga atau rumah tangga dengan berbagai aspek dan sisi pandang keilmuan. Menurut Zusmelia,dkk (2012), terdapat sejumlah faktor yang mendorong kaum perempuan di Sumatera Barat untuk bekerja di sektor perdagangan yaitunya: (1) Karena ingin melanjutkan kehidupan keluarga, karena ditinggal oleh suami baik karena ditinggal merantau maupun karena maeninggal dunia; (2) Adanya ketimpangan kepemilikan lahan pertanian yang dikuasai dan dikelola; (3) tingkat pendidikan yang relative rendah; (4) Karakter masyarakat yang bersifat egaliter, demokratis dan mudah menerima perubahan. Sedangkan menurut Agustina (2017), motivasi utama perempuan Sumatera Barat melakukan usaha ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ketertarikan dan lingkungan keluarga.



Kajian Maryati, dkk (2018) tentang penawaran tenaga kerja perempuan memiliki balita di Sumatera Barat menemukan bahwa perempuan dipengaruhi oleh karakteristik individu yaitu variabel umur dan pendidikan, karakteristik rumah tangga yang diperlihatkan oleh jumlah anggota keluarga dan status rumah tangga, serta karakteristik pekerjaan suami yang ditunjukkan oleh status kedudukan pekerjaan suami. Dimana perempuan memiliki balita bekerja sebagai komplementer bagi pekerjaan suami, dengan bekerja sebagai tenaga pendukung dalam pekerjaan suami, dan pada umumnya tidak menerima upah oleh karena itu sulit menghitung nilai pendapatan yang diperolehnya.

Selanjutnya untuk mendorong partisipasi kaum perempuan khususnya yang telah memiliki Balita memasuki lapangan kerja untuk mendapatkan upah dalam rangka mendorong peningkatan ketahanan ekonomi keluarga dan kesejahteraan, maka perlu dipertimbangkan kendala yang dihadapi, untuk itu faktor yang perlu diperhatikan adalah tempat bekerja yang layak dan aman bagi si ibu maupun anak, sebaiknya tidak terlalu jauh dari rumah sehingga perempuan atau ibu balita dapat dengan mudah kembali ke rumah untuk mengawasi kondisi si anak. Selanjutnya, ibu memiliki Balita sebaiknya bekerja paruh waktu sehingga dapat membagi waktu antara bekerja produktif dengan melakukan kewajiban domestiknya dalam rumah tangga.

Peran perempuan dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga semakin teruji dengan datangnya wabah penyakit pandemic Covid-19. Ida Fauziah menyatakan terdapat empat beban tambahan yang dirasakan perempuan di masa pandemi covid-19. Pertama, penurunan pendapatan akibat pandemi. Kedua, peningkatan beban mengurus rumah tangga akibat bekerja dari rumah (*work from home*/WFH). Ketiga, perempuan harus mengawal proses pembelajaran anak yang belajar dari rumah (*school from home*). Keempat, peningkatan kekerasan rumah tangga terhadap perempuan. Menteri Ketenagakerjaan mendapatkan

laporan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 25% hingga 33 % di dunia akibat pandemi.

Tercatat, sampai dengan Januari 2021 ada sebanyak 623.407 pekerja perempuan dan 1.552.521 pekerja laki-laki terkena dampak pandemi corona. Meskipun pekerja perempuan yang terkena covid-19 lebih sedikit dibandingkan pekerja laki-laki, namun secara beban masalah yg dipikul kaum perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki (<https://www.cnnindonesia.com>).

Menurut Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani; ada 4 (empat) sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona atau Covid-19 yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan (Saubani, 2020). Sektor rumah tangga akan mengalami tekanan dari sisi konsumsi, karena masyarakat sudah tidak beraktivitas di luar rumah sehingga daya beli pun menurun. Tak hanya itu, sektor rumah tangga juga terancam kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terutama bagi keluarga miskin dan rentan di sektor informal.

Berdasarkan catatan Tri Rismaharini, 40 persen pekerja formal perempuan di dunia terdampak pandemi Covid-19, sedangkan dari sektor informal, 60 persen dari total 740 juta pekerja perempuan telah kehilangan pekerjaan sejak pandemi Covid-19. Hal ini pun berpengaruh terhadap pendapatan mereka. <https://www.cnnindonesia.com>

Kondisi yang sama tentunya dihadapi oleh para perempuan di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kajian yang dilakukan Maryati, Elfindri dan Febriandi (2020), menemukan bahwa akibat Covid-19 ini telah terjadi penurunan pendapatan rata-rata perempuan yang diukur dengan pendapatan/minggu. Sebelum wabah Covid-19, sebanyak 35% perempuan memiliki pendapatan rata-rata per minggu kurang dari Rp. 500.000,- dan saat pandemi meningkat menjadi 55%. Artinya, konsekuensi dari pandemi ini telah memberikan tekanan pada kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah seperti yang diungkapkan oleh banyak pengamat ekonomi dan menteri keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawari.



Di sisi lain, terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran selama pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari peningkatan persentase dari golongan terbawah ke golongan atas, peningkatan pengeluaran terutama dilakukan untuk memenuhi persediaan kebutuhan pokok dan alat kesehatan seperti masker dan cairan pembersih, baik sabun biasa maupun disinfektan.

Para perempuan di Sumatera Barat pada umumnya telah melakukan persiapan untuk menjaga kondisi ekonomi keluarganya, terlihat dari hasil survei yang memperlihatkan 91,55% menyatakan bahwa mereka mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi diterapkannya pembatasan sosial berskala besar diberlakukan pemerintah. Ditemukan bahwa 50,70% melakukan pengurangan pengeluaran tidak penting (seperti commuting, membeli aksesoris atau perhiasan dan kosmetik) sementara 39,44% dari perempuan ini meningkatkan pasokan kebutuhan pangan keluarga. Untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga, 16,20% perempuan ini mencari pekerjaan tambahan, kelompok ini merupakan perempuan yang berpendidikan SLTA ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan juga menentukan kemampuan perempuan dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarganya.

Jika hanya mengandalkan pendapatan dari kepala keluarga dan cadangan keuangan (tabungan), maka 74,54% RT rentan perkotaan di Sumatera Barat yang pada umumnya bergerak di sector informal hanya akan mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dalam waktu kurang dari 2 minggu. Untuk mengatasi kemungkinan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, 40,14% dari mereka memilih untuk meminjam dari lembaga keuangan formal dan non-formal. Hanya 8,45% dari perempuan RT rentan perkotaan ini yang mampu mempertahankan kondisi ekonomi keluarga selama lebih dari satu bulan tanpa bantuan. Data ini menggambarkan besarnya dampak pandemi dan penerapan pembatasan sosial berskala besar bagi perempuan khususnya dan ketahanan ekonomi keluarga di perkotaan Sumatera Barat.

Kaum perempuan ini tidak mau tinggal diam dan menyerah pada keadaan, mereka tetap beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan keluarga di tengah pandemi. Untuk mempertahankan kehidupan, mereka melakukan pekerjaan tambahan yang dapat dilakukan di rumah, membuat kue hingga berbisnis on line, bahkan ada yang menjadi driver ojek. Upaya terakhir yang terpaksa mereka lakukan adalah berhutang, dimana 55,70% diantara mereka sudah mempunyai utang.

Sebagai daerah dengan budaya matrilineal, peran perempuan baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pekerja di Sumatera Barat sangat penting, selain mengurus keluarga, mereka juga berperan memberikan kontribusi ekonomi pada keluarga, bahkan ada yang menyiapkan diri menjadi relawan untuk memberikan literasi kepada masyarakat di sekitarnya agar mematuhi protocol kesehatan. Inilah bukti empiris bahwa perempuan Sumatera Barat, yang dikenal dengan Ranah Minangkabau memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga khususnya dan ketahanan ekonomi daerah dalam arti luas.

9.5 Penutup

Kedudukan dan peranan perempuan di Minangkabau, Sumatera Barat dapat dilihat dari dua segi. Pertama, perempuan berperan untuk mampu bertahan dan mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Kedua, perempuan sebagai pemegang amanah dalam melindungi dan mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, untuk itu perempuan di ranah Minangkabau melakukan berbagai upaya untuk membantu perekonomian keluarga. Dari kegiatan usaha yang dilakukannya, disamping dapat membantu perekonomian keluarga sendiri, perempuan Minangkabau juga dapat membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Peranan ini disebut dalam adat Minangkabau sebagai *umbun puruak pagangan kunci, umbun*



puruak aluang bunian. Maknanya perempuan berperan sebagai pemegang kunci (orang yang menyimpan dan menjaga) hasil kegiatan ekonomi anggota keluarga. Peranan itu telah melekat pada perempuan Minangkabau sejak lama dan tetap terjaga dari masa ke masa.

Keterlibatan perempuan di sektor publik, membawa dampak terhadap peranan perempuan dalam kehidupan keluarga. Di satu pihak, perempuan bekerja dapat berperan membantu ekonomi keluarga dan sebagai pencari nafkah utama maupun penunjang dalam keluarga, disisi lain peranannya dalam urusan rumah tangga (domestik) akan menjadi berkurang karena lamanya waktu yang digunakan untuk aktivitas di luar rumah tangga (publik). Untuk itu dukungan anggota keluarga lain dalam keluarga sangat dibutuhkan agar ketahanan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi keluarga dapat dijaga dan ditingkatkan.

Pekerjaan perempuan yang tidak dibayar, khususnya di bidang urusan rumah tangga dan keluarga, perlu mendapat perhatian lebih besar dari para pengambil kebijakan dalam upaya peningkatan peran perempuan dalam ketahanan ekonomi keluarga khususnya dan perekonomian pada umumnya. Untuk itu perlu diupayakan strategi mengurangi dan mendistribusikan kembali pekerjaan perempuan yang tidak dibayar dengan meningkatkan akses ke pasar kerja dan teknologi informasi. Dengan penguasaan terhadap teknologi informasi secara produktif kaum perempuan tetap dapat melakukan aktivitas produktif di rumah, dengan melakukan bisnis *online*, sehingga mereka dapat tetap produktif menghasilkan pendapatan untuk keluarga tanpa meninggalkan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sesuai norma yang berlaku di masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Stevany, Legiani, Wika Hardika, Rahmawati; 2020, Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Kondisi Pandemi Covid-19, UCEJ, Vol. 5 No. 2, Desember 2020, Hal. 149-162 Untirta Civic Education Journal, ISSN : 2541-6693 e-ISSN : 2581-0391
- Agustina, 2017, Analisis Profil Usaha Pengusaha Perempuan Sumatera Barat: Kasus Pada Pengusaha Perempuan di Padang, Polibisnis, Volume 9 No.2 Oktober 2017
- Armia, 2013. Budaya Berwirausaha Perempuan Minangkabau. Disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Ekonomi: "Membangun Daya Saing Bangsa dalam Menghadapi Persaingan Global". Hal. 280-297, ISBN 978-602-17129-1-7 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 26 Oktober 2013
- Aswiyati, Indah. (2016). Peran Perempuan dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat. Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17 / Januari - Juni 2016. Pp. 1-18
- BPS, 2021, Ringkasan Eksekutif Informasi Ketenagakerjaan Sumatera Barat 2020. BPS Sumatera Barat.
- Boettke, P.J, Storr, V.H. 2002. Post Classical Political Economy: Polity, Society and Economy in Weber, Mises and Hayek, in Moss. L.S (ed), (2002). The New Political Economies: A Collection of Essays from Around The World, Blackwell Publishers, Ltd, United Kingdom.
- Boserup, E, 1997, Women's Role in Economic Development. London: Earthscan.
- Buttner, E. H. 1993. Female entrepreneurs: how far have they come? Business Horizons, 36 (Mar-April), 59-65.
- Elfindri & Nasri Bachtiar, (2004). Ekonomi Ketenagakerjaan, Andalas University Press, Padang.
- Ehrenberg, Ronald G, dan Smith, Robert S, (2012). Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, Eight Edition. Pearson Education, Inc. New York City.



- Giannakopoulos, Nicholas. (2015). The Added Worker Effect of Married Women in Greece during The Great Depression, MPRA (Munich Personal RePEc Archive Paper No. 66298.
- ILO, (2015). *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2014 - 2015: Memperkuat daya saing dan produktivitas melalui pekerjaan layak*, Kantor Perburuhan Internasional – Jakarta
- Ironmanger, Duncan. 2001, *Household Production and the Household Economy*, Research Paper, The University of Melbourne.
- Maryati, Sri. Elfindri, Bachtiar, N. 2018, *Analisis Penawaran Tenaga Kerja Perempuan Memiliki Balita Di Perdesaan Sumatera Barat*, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol 26, No.1, 2018. LIPI Jakarta.
- Maryati, Elfindri, P.P. Febriandi, 2020. *The Role Of Women In Household Economic Resilience During The Covid-19 Epidemic In Urban Areas Of West Sumatra*. *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)* ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714 www.ijhssi.org || Volume 9 Issue 11 Ser. I || November 2020 || PP 34-41
- Miko, Alfian. 1991. *Pekerja Perempuan pada Industri Rumahtangga Sandang di Propinsi Sumatera Barat*. PPK-UGM. Yogyakarta
- Mosse, J. C., 1996, *Half the World, Half a Chance: An Introduction to Gender and Development*, terj. Hartian Silawati, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ortega, Jorge Alejandro Vega. (2015). *A Study of The Added Worker Effect in Mexico*, UMEA Universtitet.
- Saubani, A. (2020, April 01). *Empat Sektor Ekonomi yang Paling Tertekan Pandemi Covid-19*. Retrieved from REPUBLIKA: <https://republika.co.id>.
- Sinhal, Shalini (2005), *“Developing Women Entrepreneurs in South Asia: Issues, Initiatives and Experiences”*, ST/ESCAP/2401, Trade and Investment. Division, Bangkok: UNESCAP
- Tarmizi, N. (2012), *Ekonomi Ketenagakerjaan*, UNSRI Press, Palembang.



- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2011. "Pembangunan Ekonomi". Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- Tuwu, Darmin, 2018, Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik. *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*-ISSN: 1978-9726 (p); 2541-0717 (e) Volume 13, Nomor 1 (Mei, 2018)
- Zusmelia, Dasrizal, Yeni Erita, Rinel Fitlayeni. 2012. Model Pengembangan Entrepreneurship dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga di Minangkabau, *MIMBAR*, Vol. 28, No. 2 (Desember, 2012): 125-134.

PERAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Fauzia Afriyani

10.1 Pendahuluan

Penduduk memiliki peran penting dalam pembangunan Negara. Hubungan antara kependudukan dan pembangunan bersifat sebab akibat, pembangunan dapat mempengaruhi kependudukan dan kependudukan dapat mempengaruhi pembangunan (Gould, 2009). Faktor yang berperan dari hubungan sebab akibat ini adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan sumber daya alam (SDA) yang tersedia. Kualitas penduduk memiliki pengaruh yang dominan dan akan membuat pembangunan suatu bangsa berkelanjutan. Salah satu SDM yang berperan dalam gerak Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN diharapkan jadi motor penggerak kinerja organisasi pemerintahan sehingga tujuan Pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang, Untuk mensukseskan tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan, maka harus dibangun suatu kondisi agar penghidupan dapat berkelanjutan.

Penghidupan Berkelanjutan ASN/individu didasari atas beberapa hal: (a) *capital asset* atau aset modal yang dimiliki, (b) kendala yang dihadapi, (c) kebijakan pemerintah dan (d) strategi umum yang harus dijalankan. Aset modal terdiri dari modal manusia, modal social, modal fisikal, modal keuangan dan modal alam dan kelima unsur saling terikat dan digambarkan dalam bentuk pentagonal. Kerentanan yang dihadapi ASN antara lain: pengaruh politik, perilaku kerja/tingkat kompetensi, dan kekakuan hirarki. Aset modal dan kerentanan saling pengaruh mempengaruhi, aset modal yang rendah akan membuat kerentanan sulit untuk dieliminir atau sebaliknya, Diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengeliminir kerentanan, dan perlu ditetapkan strategy yang tepat untuk meningkatkan aset modal.

Sumber Daya Manusia (SDM) ASN adalah salah satu aset paling berharga bagi organisasi pemerintah. Kemampuan sebagai aparatur pemerintah yang profesional dalam menjalankan tugas tidak saja memberikan kontribusi yang berarti bagi unit kerja mereka tetapi juga bagi masyarakat. Oleh karena itu, mengembangkan, memelihara, dan meningkatkan kinerja perangkat ASN merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh setiap badan publik.

10.2 Capital Aset (Aset Modal) ASN

Capital asset mencakup semua jenis property, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, tetap atau beredar. Untuk individu, capital asset mengacu pada apapun yang dimiliki individu untuk tujuan pribadi atau investasi. Untuk ASN, asset yang memiliki masa manfaat selama ASN bekerja dan dampak manfaat masih dapat dirasakan setelah ASN pension.

10.2.1 Modal Manusia

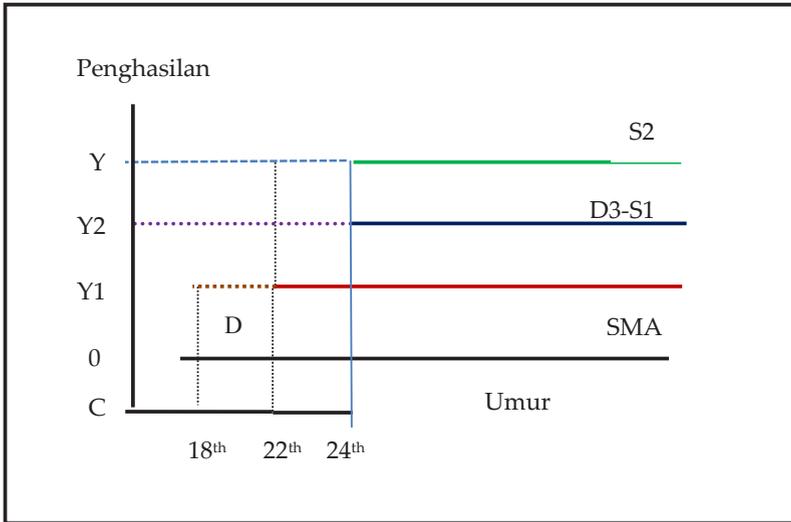
Shultz, 2010 (dalam Nurlina dan Putri 2021) mendeskripsikan modal manusia sebagai suatu variable yang dibentuk oleh fasilitas dan layanan kesehatan, pelatihan kerja, pendidikan formal yang terorganisir. Frank dan Bemanke (2007) berpendapat bahwa



modal manusia adalah perpaduan antara pendidikan, pengalaman, ketrampilan, kebiasaan, kesehatan, energy dan inisiatif yang mempengaruhi produktivitas manusia, Sebagaimana juga telah dinyatakan oleh Shultz (1961) pada masa lalu bahwa modal manusia merupakan factor penting dalam peningkatan produktivitas ekonomi di suatu Negara.

Beberapa peneliti antara lain Basch (2011) menyatakan bahwa kemajuan pendidikan akan sangat terbatas jika siswa tidak termotivasi dan mampu belajar, masalah kesehatan memainkan perana utama dalam memotivasi dan memberikan kemampuan untuk belajar. Unsur pendidikan yang mampu ditamatkan mengandung unsur kesehatan. Sebab tidaklah mungkin seseorang akan berhasil menamatkan pendidikan, terutama pendidikan tinggi, kalau individu tersebut tidak sehat (Lleras-Muney,2011). Berdasarkan pendapat tersebut, human capital ASN hanya difokuskan pada pendidikan yang ditamatkan. Tinggi rendahnya jenjang pendidikan yang ditamatkan akan mempengaruhi penghasilan yang diperoleh, mereka yang tamat S2 memiliki pendapatan Y3 yang banyak dari mereka yang berpendidikan D3 dan S1 (Gambar 10.1).

Tabel 10.1 memperlihatkan ASN berdasarkan pendidikan yang ditamatkan tahun 2017 dan 2018. Data tersebut menunjukkan tidak ada kenaikan pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2017 dan tahun 2018. Padahal pendidikan dapat mengembangkan kualitas atau kemampuan pegawai dalam mengelola sumber daya dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat secara optimal, sehingga mampu mencapai tujuan organisasi.



Gambar 10.1 Pendapatan Potensial Berdasarkan Pendidikan (dimodifikasi)
 Sumber Borjas, 2000: 231

Tabel 10.1 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan 2017-2018

Pendidikan Terakhir	2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sampai dengan SD	2778	2.80	2801	2.80
SLTP/ sederajat	2977	3.00	3001	3.00
SMA/ sederajat	20044	20.20	20208	20.20
Diploma I, II, III	5855	5.90	5902	5.90
Diploma IV	298	0.30	300	0.30
Sarjana/Doktor/Ph.D	67278	67.80	67828	67.80
Jumlah	99230	100,00	100042	100,00

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi SumSel, 2019, diolah

Berdasarkan hasil penelitian Afriyani tahun 2021, didapati dari 400 ASN di Sumatera Selatan, yang menamatkan pendidikan S2 lebih banyak dari yang tamat S1 apalagi bila dibandingkan yang tamat S3, lihat Tabel 10.2. Dari 400 ASN, sebanyak 65,5 persen pendidikan akhir S2.

**Tabel 10.2 Pendidikan yang Ditamatkan ASN, 2021**

Pendidikan yang Ditamatkan	ASN	
	Jumlah	%
S1	130	32,5
S2	262	65,5
S3	8	2,0
Jumlah	400	100,0

Sumber: Hasil Penelitian

ASN juga menerima pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan yang akan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan *human capital* pegawai ASN itu sendiri,. Ternyata banyaknya jumlah pelatihan yang diikuti tidak serta merta meningkatkan *human capital* ASN. Sejalan dengan mengikuti pelatihan, ASN dapat memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas, efektifitas dan efisiensi organisasi.

10.2.2 Modal Sosial

Putnam, Robert D (2000) menyatakan bahwa komponen modal social terdiri dari *trust* (kepercayaan), *norms* (aturan-aturan) dan *networks* (jaringan kerja) yang dapat memperbaiki efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Bahkan Solow (2000) mempertegas modal social akan memberi kontribusi besar terhadap kebijakan keberlanjutan produktivitas Ketiga komponen yang dinyatakan Putnam, bertindak sebagai penopang proses hubungan manusia yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebijakan bersama.

Modal social tidak selamanya memiliki konsekuensi positif. Menurut Poters (Yustika, 2012) ada empat konsekuensi negative yaitu: pengucilan dari pihak luar (*exclusion of outsiders*), klaim anggota kelompok (*excess claim on group members*), rintangan kebebasan individu (*restricition individual freedoms*), dan penyempitan ruang lingkup norma (*downward leveling norms*),

Seringkali yang dinyatakan oleh Poters diyakini tidak terjadi terutama di kehidupan masyarakat pedesaan.

Aspek struktural modal sosial berkaitan dengan interaksi sosial dalam suatu organisasi dan memiliki efek positif pada pegawai, terutama jika mereka berada pada struktur atau level tertentu. Interaksi yang terjadi pada tingkat struktur ini memfasilitasi proses berbagi informasi, yang mengarah pada sikap saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Adanya interaksi yang baik sangat kondusif bagi kerjasama yang baik antar anggota suatu organisasi. Interaksi yang baik mengarah pada kekuatan hubungan kerja yang lebih baik dan meningkatkan keintiman di antara pegawai ASN. Oleh karena itu, lebih mudah untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari rekan-rekannya. Misalnya, seseorang akan dapat mengakses sumber daya dan informasi dengan rekan kerja mereka. Ini mempercepat proses kerja anggota organisasi dan meningkatkan kinerja mereka. Dimensi ini juga menggambarkan model hubungan seperti keintiman, hubungan, hierarki, dan ukuran kesesuaian organisasi.

Menurut Akdere (2005), keberadaan modal sosial pegawai ASN sangat penting karena memengaruhi kinerja yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja organisasi. Hal inilah yang mendasari mengapa birokrasi pemerintah harus melihat unsur-unsur modal sosial yang relevan untuk melakukan tinjauan kinerja. Pegawai ASN sebagai pemain kunci dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan, di pengaruhi modal sosial. Faktor-faktor ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok. Faktor situasional (eksternal) seseorang dan faktor disposisional (internal) seseorang. Salah satu faktor situasional yang dapat mempengaruhi modal sosial adalah kepemimpinan.

Kepemimpinan manajerial sangat penting karena modal sosial pegawai ASN harus dibangun dan dikelola dengan baik untuk kinerja yang lebih baik. Ketika pimpinan dapat membangun modal sosial pada bawahannya, mereka dapat saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga meningkatkan kerjasama antar



pegawai ASN. Proses kolaboratif ini memastikan setiap pegawai ASN bekerja dengan baik dan mencapai kinerja yang unggul. Ketika semua pegawai ASN berkinerja baik, tujuan organisasi tercapai. Oleh karena itu, modal sosial dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal pegawai ASN, seperti: kepemimpinan atasan dan lingkungan kerja (Stone & Hudes, 2002) juga dipengaruhi oleh factor kelompok dan masyarakat (Harper & Kelly, 2003).

Faktor situasional (eksternal) lain yang sangat dominan mempengaruhi modal sosial suatu perangkat adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan tempat pegawai ASN melakukan aktivitas sehari-hari. Lingkungan kerja yang nyaman memberikan rasa aman dan memungkinkan pegawai ASN untuk melakukan yang terbaik. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai ASN. Jika pegawai ASN menyukai lingkungan kerja di mana mereka bekerja, mereka merasa nyaman dan dapat memanfaatkan jam kerja mereka dengan sebaik-baiknya. Meningkatkan produktivitas dan otomatis meningkatkan kinerja pegawai ASN. Lingkungan kerja juga mencakup hubungan kerja antara bawahan dan atasan.

Modal sosial di Indonesia malah berkembang di sisi gelapnya. Salah satu contohnya adalah pengendalian korupsi, kolusi, nepotisme, dan berbagai bentuk praktik serupa mafia di birokrasi. Petunjuk nyata dari fenomena ini adalah meningkatnya praktik korupsi. Tradisi patrimonial birokrasi yang kuat mendasari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Mereka yang dekat dengan kekuasaan selalu merasa lebih mudah untuk melakukan bisnis karena jaringan kekuasaan yang mereka bangun. Transaksi sosial tanpa gesekan berarti penghematan besar dalam transaksi ekonomi. Dengan modal sosial yang kuat, mereka cenderung melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (Edy, 2015).

10.2.3 Modal Alam

Modal alam umumnya didefinisikan sebagai persediaan sumber daya, baik biotik (yaitu komunitas organisme hidup

seperti tumbuhan, hewan dan mikroorganisme) dan abiotik (benda mati), dan lingkungan, beberapa di antaranya dapat diperbarui dan lainnya yang bukan (bahan bakar fosil, mineral dan bijih). Di bidang kehidupan ilmu pengetahuan, modal alam dekat dengan konsep ekosistem dan keanekaragaman hayati. Modal alam yang mendukung gerak sektor ekonomi terdiri dari: (a) tanah, merupakan modal alam yang dapat menjadi tempat tinggal, lahan produksi, pabrik, dan penghasil bahan mentah lainnya; (b) air, merupakan SDA penting untuk keperluan pribadi ataupun usaha; (c) energy terdiri dari minyak bumi, gas alam, batubara, tenaga air dan tenaga surya; (d) lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya.

Ide dasar modal alam menganggap bahwa ekosistem, melalui barang dan jasa yang diperoleh manusia darinya, berada di jantung kesejahteraan manusia dan penciptaan nilai ekonomi. Beberapa mendukung fungsi biosfer secara keseluruhan, dan berkontribusi pada pemeliharaan bumi atau kelayakhunian bagi umat manusia. Dengan kata lain, kesejahteraan manusia, aktivitas manusia, dan sistem ekonomi yang mengatur produksi, perdagangan dan konsumsi barang dan jasa bergantung pada jasa ekosistem. Melalui konsep modal alam, kita dapat memahami bahwa ekosistem dan keanekaragaman hayati, melalui perannya dalam penciptaan nilai dalam ekonomi, mewakili elemen strategis baik untuk organisasi swasta maupun publik, dan harus terintegrasi ke dalam proses pengambilan keputusan.

Sumber daya alam yang dibutuhkan oleh suatu organisasi termasuk barang-barang seperti kayu, ikan, air dan bahan bakar fosil selain proses alami yang membuat polutan dan limbah aman seperti siklus alam. Oleh karena itu, pemerintah harus beroperasi dalam batas peningkatan atau regenerasi lingkungan alam dan tidak menyebabkan penipisannya. Semua organisasi bergantung pada modal alam sampai tingkat tertentu dan memiliki dampak lingkungan. Semua organisasi mengkonsumsi energi dan menciptakan limbah. Pemerintah perlu menyadari



batasan penggunaan lingkungan alam oleh kita, dan beroperasi di dalamnya.

Pegawai ASN dapat berperan dalam mempertahankan dan meningkatkan modal alam diantaranya: mengganti bahan yang langka secara alami dengan yang lebih melimpah; pastikan bahwa semua bahan tambang digunakan secara efisien dan sistematis guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil; menggunakan sumber daya terbarukan sebagai penggantinya; hilangkan limbah, gunakan kembali atau daur ulang; lindungi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem, karena sumber daya alam memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Pembangunan ekonomi melalui perannya sebagai modal alam modal). Interaksi modal alam ekonomi dapat bersifat searah atau timbal balik melalui investasi dan penyediaan tenaga kerja modal alam yang dihasilkan dari proses pembangunan.

Menurut WWF, deforestasi di Indonesia sekitar 1,9 juta hektar per tahun terjadi kerusakan hutan Pada tahun 2007 dan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga, terutama CO₂ setelah Amerika Serikat dan China serta merupakan kantong tempat tinggal orang miskin. Di tengah indikator kemiskinan, terutama kebijakan belum berkembang menuju perbaikan bagi seluruh umat manusia, masih berpegang pada tujuan yang sama yaitu menguntungkan bagi investor (menarik investasi), memastikan anggaran Pengeluaran pemerintah (pembayaran utang seperti DPR, DPRD dan gaji instansi) Dengan mengurangi anggaran untuk pelayanan publik (misalnya pendidikan, kesehatan). Di tengah kemiskinan yang semakin tidak manusiawi, kita masih melihat peningkatan penjualan mobil mewah, pusat perbelanjaan dan *merchandise* kemewahan lain yang mewakili kesenjangan antara kaya dan miskin (tingkat ketimpangan).

10.2.4 Modal Fisik

Modal fisik adalah barang-barang material dan infrastruktur yang dimiliki, disewa, atau dikendalikan oleh pemerintah,

berkontribusi pada produksi atau penyediaan layanan, tetapi tidak menjadi bagian dari keluarannya. Komponen utama meliputi gedung, infrastruktur (jaringan transportasi, komunikasi, system pembuangan limbah) dan teknologi. Sebuah organisasi pemerintah tidak akan berjalan dengan baik jika memiliki input dari alam, pegawai ASN terlatih dan sehat, serta struktur komunikasi yang bagus namun tidak memiliki peralatan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat. Dalam artian bahwa modal fisik seperti gedung, jaringan transportasi, peralatan mesin dan computer harus digunakan secara fleksibel dan inovatif untuk mengurangi penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi.

Modal yang di produksi penting bagi organisasi pemerintahan yang berkelanjutan dalam dua cara, yaitu: Pertama, penggunaan modal manufaktur yang efisien memungkinkan pegawai ASN menjadi fleksibel, inovatif dan mampu meningkatkan tingkat promosi serta pemasaran produk dan layanan. Kedua, modal manufaktur dan teknologi dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi keberlanjutan. Guna meningkatkan modal yang di produksi, pemerintah dapat melakukan beberapa cara diantaranya: menggunakan infrastruktur, teknologi, dan proses dengan cara yang banyak menggunakan sumber daya efisien; sistem manufaktur modular; pergeseran produk ke layanan (menyewakan produk dengan kontrak layanan berkelanjutan); system penggunaan kembali atau remanufaktur; produksi nol limbah dan nol emisi; teknik konstruksi berkelanjutan.

10.2.5 Modal Keuangan

Aset-aset organisasi yang ada dalam bentuk mata uang yang dapat dimiliki atau diperdagangkan termasuk saham, obligasi, dan uang kertas/koin yang mencerminkan daya produktif dari jenis modal lainnya dan penting bagi organisasi karena merupakan ukuran kinerja dan kesuksesan bisnis, terutama dalam hal pelaporan kinerja kepada pemegang saham, investor, regulator, dan pemerintah. Organisasi yang berkelanjutan membutuhkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana nilai finansial diciptakan,



khususnya ketergantungan pada bentuk-bentuk modal lainnya dan bagaimana menetapkan kepentingan finansial.

Bentuk modal keuangan yang paling umum adalah utang dan ekuitas: Hutang adalah pinjaman atau kewajiban keuangan yang harus dilunasi di masa depan. Ini memiliki beban bunga yang melekat padanya, yang merupakan biaya pinjaman uang. Uang tunai yang diterima dari pinjaman uang kemudian digunakan untuk membeli aset dan mendanai operasi bisnis, yang pada gilirannya menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Sementara Ekuitas adalah kepemilikan saham di sebuah perusahaan, dan investor ekuitas akan menerima nilai sisa perusahaan jika dijual atau ditutup. Tidak seperti hutang, itu tidak harus dilunasi dan tidak memiliki beban bunga yang terkait dengannya. Ekuitas digunakan untuk mendanai bisnis dan membeli aset untuk menghasilkan pendapatan.

Organisasi dapat meningkatkan modal keuangan dengan cara: Pastikan ukuran keuangan mencerminkan nilai modal lain; Nilai asset tidak berwujud seperti merk dan reputasi; menginternalisasi biaya lingkungan dan social serta menetapkan nilai ekonominya; Manajemen resiko dan masalah tata kelola perusahaan yang efektif; Pastikan kekayaan yang tercipta terdistribusi secara adil; Hormati hubungan dengan pemasok dan pelanggan; Menunjukkan sikap positif pada pengelolaan, isu-isu keberlanjutan untuk meningkatkan akses ke modal keuangan.

Sebagai seorang pegawai ASN harus menghargai gaji bulanan yang diterima, Pegawai ASN dapat menggunakan gaji tetap untuk yang diterima untuk kebutuhan sehari-hari dan dapat menyisihkan gaji untuk investasi atau tabungan masa pension sebagai bentuk manajemen keuangan guna mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di hari tua, namun tidak membebani kehidupan di masa sekarang.

10.3 Kerentanan

Kerentanan adalah rangkaian kondisi yang akan menimbulkan bencana atau tidak dan akan menjadi penghalang untuk mencapai hidup sejahtera. Kerentanan mencakup aspek: shock (guncangan), seasonality, trends, dan change. Shock atau guncangan seperti meningkatnya harga yang tidak terkendali, perubahan politik, perubahan dalam aturan ASN, Seasonality, kondisi cuaca yang buruk dan cerah, Trends, yang terjadi yang menyebabkan perubahan perilaku seperti bekerja online. Change, aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan yang mendukung kegiatan.

Kerentanan menunjukkan tingkat kerapuhan masyarakat dan juga pada ASN jika tidak mampu menanggulunginya. Kerentanan yang terjadi pada ASN, diantaranya persoalan politik. ASN dipolitisasi dengan cara monoloyalitas terhadap suatu partai dari abdi penguasa, dan diarahkan untuk memilih kepala daerah yang sesuai dengan pilihan pimpinannya. ASN dimobilisasi untuk menjadi tim sukses dan memenangkan partai tertentu walaupun legal formalnya ASN tidak boleh dipaksa untuk memilih dan menjadi anggota suatu organisasi ataupun partai.

Trends juga menjadi salah satu kerentanan bagi ASN, sehingga menyebabkan perubahan perilaku. ASN terbiasa dengan pola kerja yang *offline* atau tatap muka, tiba-tiba berubah menjadi *online* saat terjadi pandem Covid-19. ASN yang mampu dan menguasai teknologi akan dengan mudah melaksanakan pekerjaan kantor dari rumah (*work from home*). Namun bagi yang tidak akrab atau gagap teknologi terutama bagi ASN yang usia lanjut sulit mengikuti perubahan kondisi ini.

Kerentanan lainnya adalah kekakuan hirarki dan rutinitas yang ada dalam birokrasi pemerintahan sehingga menghambat inovasi, dimana inovasi harus dihadapi dengan kreativitas dan kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan. Untuk itu pemerintah perlu memberikan pendidikan dan pelatihan teknologi



informasi guna mengembangkan inovasi dan meningkatkan kemampuan ASN dalam menghadapi resiko dan perubahan.

Hal penting untuk mendukung profesionalisme ASN untuk mempertahankan dan mengembangkan kompetensi, pemerintah perlu memperkuat rancangan pelayanan public, mengimplementasikan dan meningkatkan proses kebijakan, termasuk umpan balik berbasis bukti, agar solusi yang dicapai akan berkelanjutan. Pengalaman COVID 19 telah menggambarkan dengan jelas betapa pentingnya persiapan, reaktif dan tata kelola yang tangguh, mampu dan cepat beradaptasi dengan tantangan. Pengalaman ini menjadi pembelajaran bagi ASN, dan diharapkan ASN akan mampu mengadopsi keterampilan dan kapasitas inovatif.

10.4 Sustainable Livelihood ASN

Beberapa prinsip yang perlu dikembangkan agar tujuan Penghidupan Berkelanjutan (*Sustainable Livelihood*) dapat tercapai (UNDP, 2007 dalam Nurlina, 2017):

- a) Manusia adalah *people centered* pembangunan,
- b) Penghidupan bersifat holistic bukan parsial,
- c) Dinamika penghidupan masyarakat perlu memperoleh respon yang baik,
- d) Mengoptimalkan potensi masyarakat (*building on strengths*),
- e) Prinsip untuk mewujudkan keberlanjutan penghidupan.

Prinsip-prinsip di atas, perlu menjadi landasan ASN dalam kiprahnya di pemerintahan. Peran ASN sebagai pelaksana kebijakan public hendaknya mampu menjadi sentral dalam pemerintahan, sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda negeri ini. Oleh karena itu diperlukan ASN profesional yang bebas dari intervensi politik dan mampu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Semangat yang mengutamakan kesejahteraan dan profesionalisme serta

menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan untuk kemajuan negeri ini.

ASN harus mampu menerapkan budaya berorientasi pelayanan melalui pelayanan berbasis kebutuhan unggul dan memiliki tanggung jawab, jujur serta dapat menerapkan nilai-nilai disiplin dan semangat yang tinggi. Harmoni dalam membangun kolaborasi dan motivasi serta dinamis beradaptasi dengan perubahan melalui inovasi dan kreativitas yang tinggi. Kelancaran tugas nasional dan pembangunan nasional sangat bergantung pada berfungsinya lembaga-lembaga negara dan sipil. ASN bukan hanya bagian dari lembaga nasional, tetapi juga pejabat yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Kemampuan ASN yang berperan penting untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, diharapkan berdampak pada perbaikan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Non diskriminasi adalah politik berbasis hak azazi manusia yang melindungi kaum lemah dan miskin. Hal ini sesuai inti paradigma pembangunan yang focus pada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mewujudkan penghidupan berkelanjutan, ASN perlu melakukan strategi internal dan eksternal. Strategi internal adalah strategi untuk meningkatkan aset yang dimiliki (lihat Muhyiddin dan Putri, (2021) yaitu: (a) berdasarkan status social ekonomi rumah tangga yang dikemukakan White (1991), (b) berdasarkan kegiatan (Scoones, 1998). (c) berdasarkan basis aktivitas (Ellis, 2000), (c) berdasarkan adaptasi (World Bank, 2010), dan (d) berdasarkan nafkah. Untuk ASN, lebih tepat strategi berdasarkan kegiatan dibanding dengan strategi yang lain.

Strategi berdasarkan kegiatan mencakup 4 strategi: intensifikasi, extensifikasi, diversifikasi, dan migrasi. Strategi intensifikasi adalah strategi meningkatkan hasil kerja melalui peningkatan aset yang dimiliki. Strategi extensifikasi dengan



menambah factor (modal) baru, diversifikasi adalah strategi yang menghasilkan karya turunan, sedangkan migrasi adalah pindah ke wilayah lain agar pendapatan dapat lebih ditingkatkan. Tiga strategi terakhir diasumsikan given.

Strategi kegiatan intensifikasi adalah segala bentuk upaya ASN meningkatkan *capital asset* dimiliki disertai dengan mengeliminir berbagai kendala. Dalam konteks ini ASN bagaikan memegang dua perspektif yang terkadang dipandang berlawanan. Di satu sisi adalah perspektif yang berorientasi pada actor dimana ASN sebagai agen aktif yang membuat pilihan dan menyusun strategi mereka sendiri yang sering disebut 'analisis ekonomi politik'. Di sisi lain, strategi pilihan ASN dibentuk oleh struktur masyarakat yang lebih luas di mana mereka hidup: politik, kekuasaan, institusi, budaya, dan seterusnya. Kebutuhan untuk memegang dua perspektif yang berbeda pada saat yang sama tidak membuat analisis Kegiatan ASN menjadi mudah dan diperlukan merangkul keragaman dan kompleksitas masyarakat.

Strategi eksternal, adalah yang secara umum dan harus dijalankan ASN terdiri dari: (a) *Working From Anywhere (WFA)*, (b) *Online/e-Government*, dan (c) Pelatihan Teknologi & Informasi. WFA merupakan upaya untuk mengubah budaya kerja birokrasi dalam cara ASN menggunakan teknologi untuk menerapkan pola kerja fleksibel yang memungkinkan mereka bekerja di mana saja. Bekerja secara fleksibel bukanlah hal baru bagi ASN. Di puncak pandemi COVID-19, ASN bekerja dari rumah melalui sistem kerja yang disebut *Work From Home (WFH)*. Dimana WFH adalah tindakan darurat yang harus diambil untuk memastikan keselamatan karyawan, WFA adalah model kerja yang dirancang khusus, permanen dan fleksibel. WFA diharapkan menghasilkan birokrasi yang lincah dan siap menjawab tantangan era ditruptif saat ini. WFA memungkinkan terciptanya ASN yang dapat bekerja sesuai dengan tujuan kerja yang dinamis, ASN selalu terhubung dengan berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal

melalui media komunikasi yang ada, dan dimanapun mereka terintegrasi serta taat pada kode etik.

Kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik menjadi penting, Pandemi Covid-19 memberi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau implementasi *e-government*. Seperti yang dijelaskan Mustafa dkk (2021), Sistem *e-government* yang mendukung pembuatan dan penyebaran informasi serta meningkatkan eksistensi. Artinya implementasi sistem *e-government* mendukung terselenggaranya pelayanan menjadi lebih efektif dan meningkatkan kehadiran pemerintah. Kehidupan serba digital yang dapat memfasilitasi kehidupan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Penggunaan di bidang teknologi informasi untuk memajukan dan membentuk kegiatan hukum publik; Menjadi lebih efektif dan efisien.

Pengembangan kompetensi merupakan hal penting yang perlu dimiliki oleh ASN karena diperlukan pembaruan dalam kompetensi, kapasitas, dan kemampuan. Perkembangan teknologi perlu dipahami untuk mewujudkan dan menerapkan digitalisasi sistem administrasi pemerintahan guna memberikan pelayanan publik yang transparan, cepat dan efektif. Salah satunya dengan mengimplementasikan *e-Government* untuk melakukan pelayanan masyarakat dengan lebih baik. Peningkatan kompetensi ASN pada pemanfaatan teknologi bertujuan untuk memberikan nilai tambah terhadap pelaksanaan pembangunan serta kecepatan dan efisiensi pengelolaan organisasi.

Dengan meningkatkan *capital asset* yang dimiliki: *human capital*, *social capital*, *natural capital*, *physical capital*, dan *financial capital* serta mengambil strategi atau langkah-langkah di atas, diharapkan kerentanan pada ASN dapat diatasi sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan menggapai *sustainable livelihood*, juga dapat mendukung dan berkontribusi bagi pembangunan yang berkelanjutan.



10.5 Kebijakan

Penghidupan berkelanjutan yang efektif dapat menjadi daya dorong untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Berkaitan dengan ASN maka yang diperlukan adalah: (a) Sosialisasi UU dan Peraturan Kepegawaian tentang Netralitas ASN, (b) Kebijakan penyelenggaraan kerja yg fleksibel, dan (c) Penyederhanaan Hierarki.

ASN adalah sebuah profesi Bagi PNS yang terikat kontrak dengan pemerintah. Salah satu prinsip yang mendasari implementasi kebijakan dan manajemen ASN, terutama asas netralitas. Prinsip ini mengeluarkan pernyataan yang mengklaim tidak ada bentuk pengaruh, tidak ada kepentingan terbaik, asas ketidakberpihakan dalam hukum administrasi. Meskipun istilahnya berbeda, prinsip netralitas hukum ASN memiliki arti yang sama yaitu prinsip birokrasi untuk tata kelola yang baik (kepemimpinan yang baik). Status ASN sebagai pejabat dan pelaksana pemerintahan tidak terlepas dari sorotan public, karena mampu menggerakkan potensi sosial dan politik. ASN seharusnya tidak memiliki pengaruh dalam bentuk apapun dan tidak boleh mengadvokasi kepentingan apapun, bahkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Birokrasi pemerintah menjadi kuat ketika ASN netral terhadap semua kepentingan. Pejabat netral memastikan birokrasi yang kuat dan mendukung suasana demokrasi yang sehat dalam pemilihan umum yang langsung, universal, bebas, independen, jujur, dan adil.

Secara umum, pengaturan kerja yang fleksibel atau FWA adalah konsep gaya kerja fleksibel melalui reformasi gaya kerja yang mengizinkan karyawan untuk memilih jam kerja mereka. Pengaturan ini termasuk 1) Penjadwalan waktu yang flexibel. 2) Fleksibilitas jam kerja (*shift, job sharing*); 3) Fleksibilitas tempat kerja (WFH) (Georgetown University Law Center, 2006). Hal ini menjelaskan implementasi FWA diharapkan sebagai solusi masa depan. kepuasan kerja, keterlibatan agensi, keseimbangan kehidupan kerja, mendorong karyawan untuk mencapai kinerja

puncak. Karyawan dapat terus aktif dengan gaya kerja bebas optimal, terlepas dari bagaimana hal itu dicapai, Kelliher & Anderson (Simanjuntak; et al., 2019).

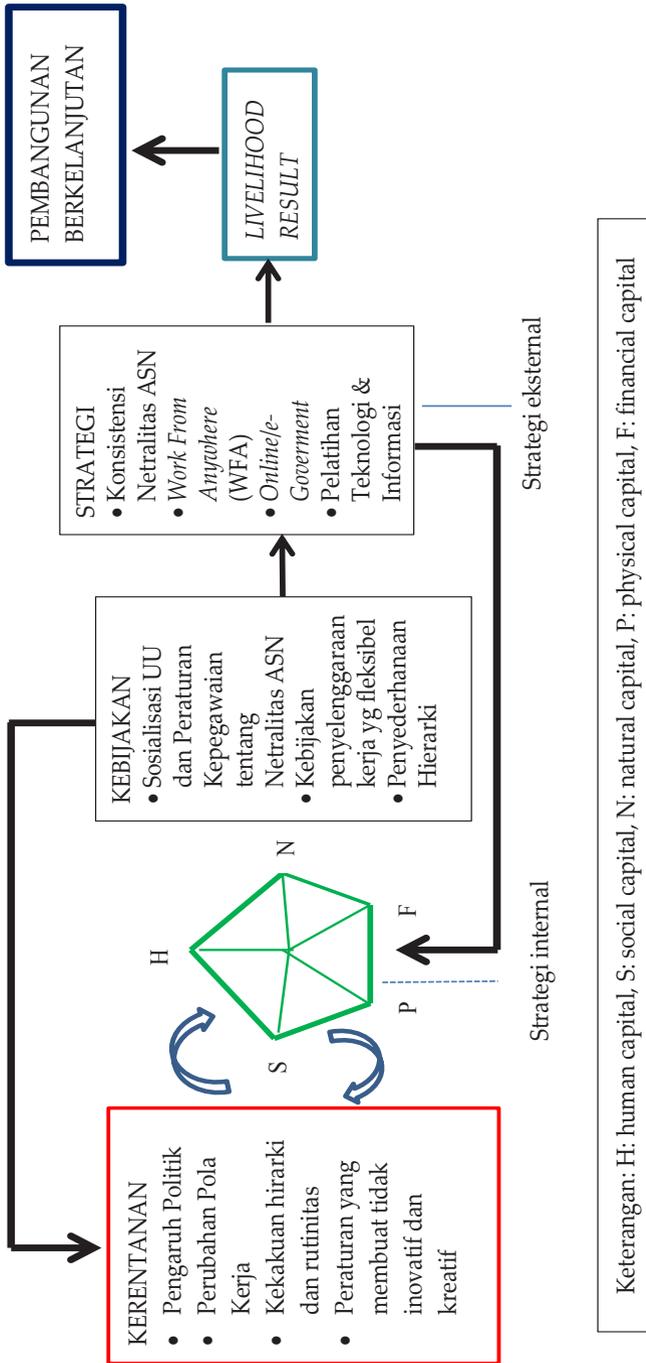
Alasan utama untuk menerapkan FWA adalah alternative pemecahan masalah karena tingginya prevalensi Covid-19, bekerja dari rumah dan flextime. Menurut Parker (2020), ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan kantor, desain ulang jadwal kerja yang ada, tata kelola kantor berdasarkan krisis, meningkatkan teknologi dalam krisis. Selain berfokus pada perubahan fisik dan material, Pemerintah juga harus mampu mempelajari isu dan dampak merebaknya pandemic. Ketika pemerintah mulai menyiapkan factor resiko dari system kerja FWA, penting bagi pemerintah dan Masyarakat untuk memahami hal ini secara kritis dan komprehensif bahwa pandemi telah mengubah cara kita bekerja. dengan harapan masyarakat tidak merasa dirugikan dengan kehadirannya, Mallet et al., (2020).

Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, pemerataan jabatan, dan penyelarasan sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, yang didukung dengan pengelolaan kinerja ASN yang optimal. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Instansi Pemerintah diterbitkan untuk penyederhanaan birokrasi, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kepengurusan diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan sistem kerja dan manajemen ASN. Dengan berlakunya dua Arahan terbaru ini, seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah didorong untuk memperbaiki sistem kerjanya dengan memperbaiki mekanisme kerja birokrasi dan proses bisnis yang bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik harus disesuaikan. ASN dipaksa untuk mengubah pola pikir hierarkis dan sistem kerja sebelumnya menjadi yang gesit, fleksibel, dan kolaboratif. Telah terjadi pergeseran sistem kerja yang menekankan pada kompetensi, keahlian, dan keterampilan, dengan dukungan tata kelola berbasis



digital untuk mendorong kerja sama tim yang berorientasi pada hasil dan mencapai tujuan pembangunan sehingga ASN dapat berfungsi lebih optimal sesuai dengan kemampuannya, dapat berkontribusi di luar unit organisasi maupun unit organisasi.

Struktur organisasi sektor publik menetapkan dan menerapkan kebijakan dan undang-undang; memberikan layanan; dan melakukan fungsi lain yang mempengaruhi mata pencaharian. Proses mencakup hukum, peraturan, kebijakan, pengaturan operasional, kesepakatan yang pada gilirannya, menentukan cara struktur beroperasi. Struktur penentu kebijakan tidak dapat menjadi efektif tanpa adanya lembaga dan proses yang tepat di mana kebijakan dapat diimplementasikan. Beberapa kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung *Sustainable Livelihood* ASN terlihat pada kerangka kerja ASN untuk mencapai pembangunan berkelanjutan psds Gambar 10.2.



Gambar 10.2 Kerangka Kerja ASN untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan



10.6 Penutup

Kependudukan dan pembangunan memiliki hubungan sebab akibat, kependudukan memengaruhi pembangunan begitupun sebaliknya pembangunan memengaruhi kependudukan. Faktor yang berperan dalam hubungan tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. SDM dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan sebagai motor penggerak organisasi pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang tentu saja dapat dicapai bila ASN itu sendiri sudah berada dalam kondisi penghidupan yang berkelanjutan.

Penghidupan berkelanjutan ASN berlandaskan pada *capital asset* yang dimiliki (modal manusia, modal alam, modal social, modal fisik dan modal keuangan), kemampuan dalam menghadapi kerentanan yang terjadi (pengaruh politik, perubahan Pola kerja, kekakuan hierarki, dan peraturan yang mengekang kreativitas dan inovasi), adanya kebijakan pemerintah (sosialisasi Undang-Undang dan peraturan kepegawaian mengenai netralitas ASN, kebijakan penyelenggaraan kerja yang fleksibel, juga penyederhanaan hierarki) guna meminimalisir kerentanan serta adanya strategi (konsistensi netralitas ASN, program *Work From Anywhere, online/e-government*, pelatihan teknologi dan Informasi) yang harus dijalankan.

Daftar Pustaka

Afriyani, Fauzia dkk.2021. The Influence Of Human Capital, Innovation Capability, Self-Efficacy On Civil Servant Productivity And Its Implications For The Performance Of Local Government Organizations In South Sumatera Province. International Journal of Entrepreneurship, Volume 25, Special Issue 4, 2021.

- Ahmad Erani Yustika. 2012. *Ekonomi Kelembagaan*. Jakarta: Erlangga.
- Akdere dan Mesut. 2005. "Social Capital Theory and Implication For Human Resource Development," *Singapore Management Review*, Vol. 27, No.2
- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2019. bkdsumselprov.go.id.
- Basch Charles E., 2011. Healthier Students Are Better Learners: A Missing Link in School Reforms to Close the Achievement Gap. *Journal of School Health*. October 2011, Vol. 81, No. 10
- Borjas, G. J. (2000). *Labor economics* (Vol. 2). New York: McGraw-Hill.
- Cutler, D. M. & Lleras-Muney, A., 2011. Understanding in Ifferences in Health Behaviors by Education. *National Institutes of Health*, 29(1)
- Edy Sutrisno, 2015, *Manajemen Sumbe Daya Manusia*, Jakarta: Kencana.
- Ellis F. 2000. *Rural Livelihood and Diversity in Developing Countries*. London (UK): Oxford University Press.
- Frank, R. H., & Bernanke, B. S. 2007. *Principles of Microeconomics* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Georgetown University Law Center. (2006). *Flexible Work Arrangements: A Definition And Examples*. Georgetown University Law Center, 1-4.
- Gould T.D., 2009, *Mood and Anxiety Related Phenotypes in Mice Characterization Using Behavioral Tests*, Dalam *Mood and Anxiety Related Phenotypes in Mice Characterization Using Behavioral Tests*, Humana Press, USA.
- Harper dan Kelly. 2003. *Measuring Social Capital in the United Kingdom*. National Statistics
- John Binns, 2018. *The Five Capital-a Model For Sustainable Development*.<https://blog.rrc.co.uk/category/environment-2/>
- Jonathon Porritt's., 2020. *The Five Capitals – a framework for sustainability*. Forum For The Future



- Mallett, O., Marks, A., & Skountridaki, L. (2020). Where does work belong anymore? The implications of intensive homebased working. *Gender in Management*. <https://doi.org/10.1108/GM-06-2020-0173>
- Muhyiddin dan Putri, 2021. Sustainable Livelihood dan Kesejahteraan. Teori dan Berbagai Kasus di Provinsi Sumatera Selatan. Unsri Press.
- Mustafa, Akhmad dkk. 2021. Pelaksanaan E-Kliping Berbasis E-Goverment Pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/>
- Neva R. Goodwin. G-DAE Working Paper No. 03-07: Five Kinds of Capital: Useful Concepts for Sustainable Development
- Olivier Serrat. 2008. The Sustainable Livelihoods Approach. Asian Development Bank
- Pari Baumann and Subir Sinha. 2001. Linking Development With Democratic Processes In India: Political Capital And Sustainable Livelihoods Analysis. *Natural Resource perspectives* Number 68, June 2001
- Parker, L. D. (2020). The COVID-19 office in transition: cost, efficiency and the social responsibility business case. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(8), 1943-1967. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2020-4609>
- Putnam, R. D. 2000. *Boling Alone. The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schyster.
- Simon Levine.2014. How to study livelihoods: Bringing a sustainable livelihoods framework to life. Working Paper 22. September 2014
- Schultz, T Paul. 2010. Health Human Capital and Development. *Journal of Africans Economics*. 19, Issues 3:312-280.
- Scoones, I. 1998. Sustainable Rural Livelihood: A Framework for analysis. *IDS Working Paper*, 72. Brighton: IDS.
- Simanjuntak, F Dewi dkk. 2019. Pengaruh Flexible Work Arrangement Terhadap Ethical Decision Making: Peran Employee Engagement Sebagai Mediator. Volume 5 no 1 (2019); *Jurnal Diversita Juni*.

- Smith, S.C dan Todaro, M. 2015. *Economic Development (Twelfth Edition)* Newyork: Pearson.
- Solow, R.M. 2000. Notes on Social Capital and Economic Performance in Dasgupta, P. and Serageldin, I (eds) *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Stone W dan Hughes J. 2002. *Social Capital: Emperical Meaning and Measurement Validity*. Australia: Australian Institute of Family Studies, Working Paper No. 27. ISSN 1446-9863. 278.
- Tarmizi, Nurlina.2015b. *Fertilitas, Urbanisasi, Pengangguran*. Unsri Press. Palembang.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
- United Nations Development Programme.2007. *Modul Pembelajaran Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan Bagi Perencana dan Pegiat Pembangunan Daerah*. UNDP. Jakarta. 176.
- United Nations Development Programme. 2015. *GUIDANCE NOTE Application of the Sustainable Livelihoods Framework in Development Projects*
- Wagner, J. (2005). *The Systematic Use Of Rape As A Tool Of War In Darfur: A Blueprint For International War Crime Prosecutions*. United States: Georgetown University Law Center.
- Wijayanti, R., Baiquni, M., & Harini, R. (2016). Strategi penghidupan berkelanjutan masyarakat berbasis aset di Sub DAS Pusur, DAS Bengawan Solo. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 4(2), 133-152
- World Bank. (2010). *The World Bank Annual Report 2010*.

DAFTAR ISTILAH

Angka Harapan Hidup (AHH)	Atau <i>life expectancy at birth</i> adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Angkatan Kerja	Bagian dari penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja dan menganggur.
Angka Kematian Ibu (AKI)	Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.
ASI Eksklusif	Pemberian ASI (air susu ibu) tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi berumur 0 bulan sampai 6 bulan.
Bekerja	Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu.
<i>Capital Asset</i>	Mencakup semua jenis property, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, tetap atau beredar
Ciri fisik stunting	Berbadan pendek dan sangat pendek



<i>Demography Dividend</i> (Bonus Demografi)	Kondisi yang terjadi saat sebuah negara memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi daripada penduduk usia non-produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah rentang usia 15 hingga 64 tahun.
<i>Demography Burden</i> (Beban Demografi)	Bila penduduk usia produktif yang banyak tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas.
Distorsi transisi demografi	Merupakan perubahan pola tingkat fertilitas dan mortalitas yang terjadi selama pandemi menimbulkan dampak dalam bidang kependudukan
Fertilitas	Hasil reproduksi yang nyata dari seorang atau sekelompok perempuan. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi yang dilahirkan hidup.
<i>Fetus alcohol syndrome</i>	Sindrom alkohol janin yaitu konsumsi alkohol berlebihan akan menyebabkan bayi menderita stunting
<i>Financial Capital</i> (Modal Keuangan)	Aset-aset yang dimiliki (uang, saham, obligasi) yang mendorong daya produktif dan kreatif.
Garis kemiskinan	Tingkat pendapatan minimum spesifik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar agar dapat bertahan hidup berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Untuk makanan adalah 2.100 kilokalori per kapita per hari, non makanan meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
<i>Gender and Development</i> (GaD)	Cara pandang proses pembangunan yang partisipatif dan memberdayakan, berkeadilan, berkelanjutan, bebas dari kekerasan, menghormati hak asasi manusia, mendukung penentuan nasib sendiri dan aktualisasi potensi manusia.



<i>Human Capital</i> (Modal Manusia)	Variable yang dibentuk oleh fasilitas dan layanan kesehatan, pelatihan kerja, pendidikan formal yang terorganisir. Merupakan perpaduan antara pendidikan, pengalaman, ketrampilan, kebiasaan, kesehatan, energy dan inisiatif yang mempengaruhi produktivitas manusia
<i>Infant Moratlity Rate</i>	Angka Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun.
Keluarga	Dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan lainnya, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya
Kemiskinan	Situasi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.
Kemiskinan ekstrim	Penduduk yang hidup dalam rumah tangga dengan konsumsi atau pendapatan per orang di bawah garis kemiskinan sebesar \$1,9 PPP per hari per kapita.
<i>Kerentanan</i> (<i>Vulnerability</i> <i>Context</i>)	Rangkaian kondisi yang menentukan bahaya yang terjadi yang akan menimbulkan bencana atau tidak. Kerentanan mencakup aspek: shock (guncangan), seasonality, trends, dan change. Kerentanan menunjukkan tingkat kerapuhan masyarakat.



Ketahanan Ekonomi Keluarga	Merupakan kondisi keluarga yang memiliki ketanggungan serta mengandung kemampuan fisik-materill guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin.
Konsepsi (conception)	Pembuahan yang dapat terjadi dan dapat tidak terjadi yang disebabkan kemandulan dan penggunaan alat kontrasepsi
Kuratif	Suatu upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan
Lembaga Filantropi	Lembaga keuangan sosial yang bertujuan menyeimbangkan kesejateraan dimasyarakat dan menghindari eksploitasi ekonomi
<i>Natural Capital</i> (Modal Alam)	sebagai persediaan sumber daya, baik biotik (komunitas organisme hidup), abiotik (benda mati), dan lingkungan, yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Modal alam pendukung gerak sektor ekonomi terdiri: (a) tanah, (b) air, (c) energy, dan (d) lingkungan .
Makanan Bergizi	Makanan yang mengandung Protein Zat Besi Karbohidrat Kalsium
Menganggur	Mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan
Migrasi Komuter	Pekerja yang melakukan perjalanan rutin pergi dan pulang setiap hari antara tempat tinggal dan tempat bekerja yang berbeda kabupaten/kota



Mobilitas	Pergerakan penduduk vertical dan horizontal. Vertical terjadi perubahan status, horizontal adalah gerak penduduk melintasi batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu.
Mortalitas	Kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup
MPASI	makanan pendamping ASI
Paritas daya beli (<i>purchasing power parity</i>)	Pengukuran harga di berbagai negara yang menggunakan harga barang tertentu untuk membandingkan daya beli absolut mata uang negara.
Pekerjaan Tambahan	Pekerjaan lain di samping pekerjaan utama untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan tambahan.
Pekerjaan Utama	Jika seseorang hanya mempunyai satu pekerjaan. Bila pekerjaan yang dilakukan lebih dari satu, maka pekerjaan utama adalah pekerjaan yang dilakukannya dengan waktu terbanyak. Jika waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberi penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan utama.
Penyakit Infeksi stunting	Adalah penyakit diare, ISPA, Kecacangan dan TBC
<i>Physical Capital</i> (Modal Fisik)	Barang-barang material dan infrastruktur yang dimiliki, disewa, atau dikendalikan oleh pemerintah, yang berkontribusi pada produksi atau penyediaan layanan.
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yaitu pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah.



Preventif	Upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang.
Prevalensi Stunting	Indikator mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan.
Promotif	Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan
<i>Pull Factor</i>	Faktor penarik yaitu factor yang menyebabkan alasan penduduk menuju suatu tempat yang menjadi tujuan kaum pendatang.
<i>Push Factor</i>	Faktor pendorong yaitu factor yang menyebabkan alasan penduduk menuju suatu tempat yang menjadi tujuan kaum pendatang.
Qardul hasan	Didefinisikan sebagai pinjaman, dapat juga diinterpretasikan sebagai sumbangan
Rehabilitatif	Suatu upaya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita (pasien yang sudah tidak menderita penyakit) agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan social.
Rumah Tangga	Adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.



Sektor formal	Merupakan bidang usaha yang mendapatkan izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada suatu kawasan dimana bidang usaha ini terdaftar pada instansi pemerintahan dan diakui secara negara.
Sektor informal	Merupakan aktivitas atau usaha ekonomi yang pembentukan dan operasionalnya tidak melalui perizinan atau peraturan tertentu yang diberlakukan di suatu daerah/wilayah /Negara.
<i>Social Capital</i> (Modal Sosial)	Terdiri dari <i>trust</i> (kepercayaan), <i>norms</i> (aturan-aturan) dan <i>networks</i> (jaringan kerja) yang dapat memperbaiki efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakan yang terkoordinasi.
<i>Stayers</i>	Bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi tempat tinggal dalam satu kabupaten/kota.
<i>Stunting</i>	Kondisi gagal pertumbuhan tubuh dan otak anak yang disebabkan asupan makanan ibu kurang bergizi selama kehamilan.
<i>Sustainable Development</i>	Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang,
Tingkat Kesempatan Kerja	Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja.
<i>Total Fertility Rate</i>	Angka Kelahiran Total adalah rata-rata anak yang akan dimiliki oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya.



<i>Urban Transition</i>	Pergeseran dari pedesaan ke perkotaan dan dari pekerjaan pertanian ke pekerjaan industri dan jasa.
<i>Window Opportunity</i>	Jendela Peluang adalah bila jumlah usia produktif lebih banyak dari usia non produktif dengan rasio < 50
<i>Women and Development (WaD)</i>	mengasumsikan bahwa perempuan sudah berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
<i>Women in Development (WiD)</i>	WiD mengintegrasikan peran perempuan dalam proses pembangunan. Pendekatan ini lebih menekankan posisi produktif dalam tenaga kerja wanita.

BIODATA PENULIS



Prof. Nurlina T Muhyiddin, MS., Ph.D. Lahir 13 April 1947 di Palembang. Pendidikan: (1) S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya 1967-1975, (2) S2 Program Kependudukan dan Ketenagakerjaan Pascasarjana Universitas Indonesia 1988-1990, (3) S3 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Kebangsaan Malaysia, 1997-2003.

Jabatan Struktural: (1) Ketua Program Studi S2 Kependudukan Pascasarjana Unsri 2008-2012, (2) Ketua Pusat Penelitian Kependudukan Unsri 2005-2009

Jabatan Non Struktural: (1) Ketua Koalisi Kependudukan Sumatera Selatan, 2009-2014, 2016 sampai sekarang, (2) Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2018, 2018-2021

Buku yang dipublikasi, diantaranya:

1. Teori Ekonomi Mikro, 2021.
2. Sustainable Livelihood dan Kesejahteraan, 2021.
3. Ekonomi Bisnis, Menurut Perspektif Islam dan Konvensional, 2020.
4. SDM dalam Berbagai Perspektif, 2020.

Jurnal:

1. Rural Urban Linkage: Fair Trade and Poverty in Rural Urban Fringe, ERSJ, Vol XX, Issues 2A, tahun 2017,
2. Fertility, Urbanization, and Underemployment, ERSJ, Vol XX, Issues 4B. 2017.



Prof. Dr. Ir. Suandi, M.Si, IPU. Lahir 1 Nopember 1963 di Jujun Kerinci. Pendidikan: (1) S1 Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi, tamat tahun 1988, (2) S2 Program Studi Kependudukan Pascasarjana Universitas Gajah Mada, tamat tahun 1996, (3) S3 bidang Studi Gizi Masyarakat dan

Sumberdaya Keluarga (GMK) Institut Pertanian Bogor University, selesai pada tahun 2007.

Publikasi Ilmiah

1. The Relationship between Socioeconomic Status and The Patterns of Food and Nutrition Consumption of the Household in Rural Areas of Muaro Jambi Regency.
2. Hubungan Modal Sosial dengan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Daerah Perdesaan Jambi.
3. Hubungan Karakteristik Kependudukan dengan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Jambi.
4. Studi Pengaruh Sosio Demografi Terhadap *Remittance* Pada Migrasi Internasional Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
5. Management strategy for household food security in Jambi Province.
6. Poverty alleviation model in communities peatland areas of Jambi Province.
7. Commodity Competitiveness Analysis of Arabica Coffee in Kerinci Regency, Jambi Province.
8. The impact of the COVID-19 pandemic on socio-economic conditions for households in Jambi city, Indonesia.

Karya Buku:

1. Profil Statistik dan Indikator Gender Provinsi Jambi,
2. Profil Provinsi Jambi: Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2010,



3. Profil Provinsi Jambi: Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017,
4. Kemerdekaan RI Ke-75 dari Sudut Pandang Profesor: Telaah Covid-19 dan Ketahanan Keluarga Menuju Masyarakat Indonesia Madani.



Dr. Junaidi, SE., M.Si. Lahir 2 Juni 1967 di Padang. Pendidikan: (1) Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Tahun 1992, (2) Pendidikan Magister pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tamat pada Tahun 1996, (3) Program Doktor pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor pada Tahun 2012. Berkarir sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi sejak tahun 1992, saat ini mendapat tugas tambahan sebagai Dekan pada fakultas tersebut untuk periode jabatan 2020 - 2024. Aktif menulis buku dan karya ilmiah dalam berbagai jurnal

Karya buku: (1) Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan (Penerbit: Hamada Prima), (2) Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya (Penerbit: IPB Press), (3) Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi (Penerbit: IPB Press), (4) Ekonometrika: Teori dan Tuntunan Praktis Penggunaan Aplikasi (Penerbit: WIDA Publishing), (5) Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Indonesia Refleksi dan Gagasan ke Depan - Book chapter (Penerbit PT. Insan Sempurna Mandiri).

Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS/WOS)

1. The impact of the COVID-19 pandemic on socio-economic conditions for households in Jambi city, Indonesia tahun 2022. Humanities, Arts and Social Sciences Studies
2. Economic coping strategies and food security in poor rural households tahun 2022. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal

Jurnal Internasional terindeks database

Poor Households Expenditure For Preventive And Curative Health Needs tahun 2020. *International Journal of New Economics and Social Sciences*

Jurnal nasional terakreditasi (Sinta 2 – 4)

1. Transmigration In Jambi Province From The Perspective of Regional Policymakers tahun 2022. *Jambura Agribusiness Journal*
2. The Relationship Between Absolute Poverty Income Inequality in Rural and Urban Areas in Indonesia: The Granger Causality Approach tahun 2022. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
3. Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah pertambangan. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*



Dr. Lily Rahmawati Harahap, SE., MM.
Lahir di Medan, 27 September 1968.
Pendidikan: (1) S1 bidang Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (1993), (2) S2 bidang Manajemen Keuangan Asuransi Universitas Gunadarma (1997), (3) S3 bidang Ekonomi Keuangan Syariah Universitas Trisakti (2016).

Chief of Editor pada *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (JEMASI)* terakreditasi SINTA (2021-2026), *Editor Transformasi Indonesia Menuju Cashless Society* (Tohar Media, 2022). Anggota *Koalisi Kependudukan Kota Palembang* (2018-2022).

Kegiatan Tridarma: (1) *Presenter and Best Paper* pada *1st International Seminar & Call Paper On Accounting For Society "Sustainable Development Challenge and Opportunity for Accountant Profession in Developing Countries"*, University of Pamulang (2018),



(2) Presenter pada *2nd ICIFEB 2018, International Conference on Islamic Finance, Economics and Business, "Islamic Banking and Finance in The Era of Digital Revolution"*, UIN Syarif Hidayatullah, (3) Presenter pada *3rd Asia International Multidisciplinary Conference 2019 (AIMC 2019)*, Universiti Teknologi Malaysia.

Karya Buku

1. The Tawhidi Methodological Worldview, A Transdisciplinary Study of *Islamic Economics, Chapter 14* dengan judul *Society's Attitude to Pay Zakah Relating to Employment and Income Variables Seen From Tawhidi Perspective in South Sumatera: A Cross Sectional Study Based on Survey*. Springer, Singapore tahun 2019.
2. Book Chapter buku *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional* (Peneleh, 2020).

Karya Ilmiah yang terbit pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional, antara lain:

1. *Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (JEMASI)* (2014, 2017, 2019),
2. *How Are Employment and Income Influence Society Attitude to Pay Zakat in South Sumatera With Tawhidi Perspective* (penulis utama), *Universitas Pamulang Economic and Accounting Journal* (2018),
3. *Zakat Fund As The Starting Point of Entrepreneurship In Order to Alleviate Poverty (SDGs Issue)* (penulis utama). *Global Review of Islamic Economics and Business* (2018).



Dr. Sri Maryati, SE, MSi. Lahir di Bukittinggi pada tanggal 17 Juni 1966. Pendidikan: (1) S1 diraih pada tahun 1991 di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, (2) S2 bidang Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjahmada Yogyakarta pada tahun 1998, (3) S3 Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, dengan bidang kajian Ekonomi Ketenagakerjaan, berhasil diselesaikan pada tahun 2017.

Mengemban tugas sebagai Sekretaris Pusat Studi Keuangan dan Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (PSKP-FEUA) periode 2018-2021. Tim ahli dan pendamping pemerintah daerah, dan aktif di berbagai organisasi,

Karya buku

1. Book chapter dalam buku *Ekonomi Wanita: Riset-Riset untuk Kebijakan* (Grafindo Persada, 2019),
2. *Derap langkah Menuju PANAMA* (Paninjauan Nagari Madani (UNAND Pers, 2019,
3. *Ekonomi Anti Korupsi: Pendidikan Anti Korupsi Dalam Konteks Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* (Rajawali Pers; 2022).

Karya Ilmiah

1. Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Era Bonus Demografi di Sumatra Barat tahun 2021. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 21 No. 1 Januari 2021, hlm. 95–107.
2. The Role of Women in Household Economic Resilience during the Covid-19 Epidemic in Urban Areas of West Sumatra. *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)* ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714 www.ijhssi.org || Volume 9 Issue 11 Ser. I || November 2020 PP 34-41



3. Potential and Challenges Of Halal Tourism Development In Padang. ICBE 4th FEUA Padang



Dr. Neneng Miskiyah, S.E., M.Si. Dosen Tetap pada Politeknik Negeri Sriwijaya. Pendidikan S1 Manajemen (Unsri, 1998), S2 Ilmu Ekonomi (Unsri, 2006), dan S3 Ilmu Ekonomi (Unsri, 2017).

Karya Buku Book chapter: (1) Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat: Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 dalam Dampak dan Analisa Pandemi Covid-19: Sudut Pandang Mikro dan Makro Ekonomi (2021), (2) Mobilitas Pekerjaan di Era Revolusi Industri 4.0: Antara Peluang dan Tantangan dalam SDM Dalam Berbagai Perspektif (2020).

Jurnal

1. Ownership Structure, Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure and Company's Financial Performance, tahun 2022. Scitepress. In Proceedings of the 2nd FIRS.
2. Welfare Evaluation of the Duck Breeding in Gandus Subdistrict, Palembang, tahun 2022. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volumen 641, Atlantis Press. 5th FIRST T3 2021 International Conference.
3. Women Attribute and Household Level Factor on Women's Empowerment. Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen (Vol 36, No 2, Juli 2021)
4. Dimensions of Women's Empowerment Advances in Social Science, Education and Humanities Research (Vol 1, Tahun 2021), Atlantis Press.
5. Human Resource Role and Online Strategy, tahun 2020. Advances in Social Science, Education and Humanities (Atlantis Press, Jilid 431)



Dr. Yunisvita, SE, M.SI. Lahir di Palembang pada tanggal 29 Juni 1970. Pendidikan: (1) S1 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya lulus tahun 1994, (2) Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya lulus tahun 2005. (3) S3 Doktor Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya lulus 2016.

Sejak tahun 2019, bekerja sebagai dosen FE Unsri. tugas yang diemban: (1) Pengelola Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (2) Reviewer dan co Editor in Chief pada Jurnal Ekonomi Pembangunan, (3) dWakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan (2021-2024).

Karya Buku

Book chapter:

1. Buku Perilaku Pasar Tenaga Kerja (UNSRI PRESS, 2013),
2. Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris (UNSRI PRESS, 2021)

Karya Ilmiah:

1. Determinants of Premium and Penalty of Worker Income in Indonesia, 2022. *Economics Development Analysis Journal* Vol. 11 No. 2
2. Occupational Segregation Based on Gender and Wage Inequality by Education, Age and Mobility (South Sumatra, Indonesia), 2021. *Modernization, Innovation, Development* Vol. 12 No.2
3. Effect of Economic and Demographic Factors on Educational Mismatch Probability of Sectoral Workers. 2021. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business* Vol. 5 No. 3.



Dr. Sari Lestari Zainal Ridho, S.E., M.Ec., CHE.
Lahir di Palembang, 21 Mei 1977. Pendidikan: (1) S1 Manajemen (Pemasaran) Universitas Airlangga tahun 1995-2000, (2) S2 Ilmu Ekonomi (SDM) International Islamic University Malaysia tahun 2003-2005, (3) S3 Ilmu Ekonomi (SDM) Universitas Sriwijaya tahun 2012-2015.

Pemakalah: (1) The Education Measurement Specific Effect on Sustainable Development: An Experience of Indonesia, 2018. Unhas the 3rd International Conference Accounting, Management and Economics. (2) Life Expectancy and Working Population in Indonesia: The implications of demographic bonus 2018. Fakultas Ekonomi, Universitas Janabadra, Yogyakarta. The 2nd International Conference on Banking, Accounting, Management and Economics

Karya Buku

1. Potensi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi SDM di Sumatera Selatan (Book Chapter) 2021 Ideas Press Yogyakarta.
2. Demografi dan Generasi Digital: Bonus atau Bencana (Book Chapter) 2020 Idea Press Yogyakarta

Jurnal

1. The Community Participation in Tourism Sustainability and Tourist Satisfaction 2021. International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events
2. The Cross-Provincial Data of Life Expectancy Effect on Pension Fund in Indonesia 2021 International Journal of Social Science and Business
3. Dinamika Komposisi Penduduk: Dampak Potensi Pandemi Covid-19 terhadap Demografi di Indonesia 2020 Jurnal Populasi



Eddy Gunawan, M.A., M.Ec., Ph.D. Lahir 25 Juli 1976. Pendidikan: S1 Ar Raniry State Islamic University Banda Aceh Indonesia 1995-1999, S2 Master of Economics International Islamic University Malaysia (IIUM), Kuala Lumpur-Malaysia tahun 2002-2004, S3 PhD in Economics. Durham University Business School, University of Durham, UK2010 – 2015.

Research and Publication

1. Fadliansah, O., Suriani, S., & Gunawan, E. (2021). The Effect of Zakat on Income Disparity in Aceh Province. *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 2(2), 57-64..
2. Gunawan, E., Sartiyah; Aidar, N. (2021). Understanding of Tourism Industries in the Development of Halal Tourism in Aceh. *International Journal of Islamic Economics*, 2(2), 126-135. Fajri, I., Muksal, Gunawan, E., & Kesuma, T. M. (2020). Risk Management Analysis in Gala Financing Procedures in Sharia Bank. *International Conference on Economic and Social Science (ICONESS)*.
3. Zahara, M., Suriani, Gunawan, E. (2020). Causality of the Islamic Stock Market and the Indonesia-Malaysia Macroeconomic Variables. *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management*, 3(1), 14-24.
4. Akmal, I. B., Majid, M. S. A., & Gunawan, E. (2020). Does Zakat Matter for Human Development? An Empirical Evidence from Indonesia. *Regional Science Inquiry*, 12(2), 195-208.



Dr. Fauzia Afriyani, S.Pd., M.Si. Pendidikan: (1) S1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP, Alih Program Universitas Sriwijaya. Lulus tahun 2004, (2) S2 Ekonomi SDM Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya lulus tahun 2014. (3) S3 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya lulus tahun 2021.

Jabatan: (1) Sekretaris Umum Gerakan Muslimat Indonesia Pusat (2) Sekretaris Koalisi Kependudukan Kota Palembang (3) Kepala Biro Kemahasiswaan, Alumni dan Bursa Kerja Universitas IGM

Publikasi

1. Achieving Welfare Through Improvement Human, Social, and Financial Capital 2022, The 8th GoGreen Summit 2022
2. The Influence Of Human Capital, Innovation Capability, Self-efficacy On Civil Servant Productivity And Its Implications For The Performance Of Local Government Organizations In South Sumatera Province 2021, International Journal of Entrepreneurship Volume 25, Special Issue 4, 2021
3. The Influence Of Intellectual Capital And Innovation Capability On Productivity Of Civil Servants In Education Services Of Palembang City 2020, Eurasia: Economics & Business, 8(38), August 2020.

Speaker

1. Asia for earth "The 8th GoGreen Summit 2022"
2. Bimtek Pengelolaan Dana Bos Bagi Kepala sekolah & Bendahara Se-Sumatera Selatan 2020
3. Kampung KB Kota Palembang "Sosialisasi Dampak Pengendalian Penduduk " 2019.

